



**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Pemerintah Daerah  
Kota Dumai

# LKIP

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH

KOTA DUMAI

TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini disusun berdasarkan dokumen perencanaan tahunan serta mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

Melalui laporan ini, kami berupaya menampilkan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2024, termasuk hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Harapannya, LKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi, refleksi, sekaligus dasar pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah, mitra kerja, serta masyarakat Kota Dumai atas dukungan dan partisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sepanjang tahun 2024. Kami juga mengharapkan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja yang objektif serta menjadi referensi dalam peningkatan pelayanan publik menuju Kota Dumai yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Dumai, Maret 2025  
Wali Kota Dumai,

H. Paisal, SKM., MARS

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai .....	2
1.4 Data Kepegawaian .....	9
1.5 Isu Strategis .....	13
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	26
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026.....	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	28
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	30
BAB III    CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH .....	31
3.1 Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat Sejahtera	34
SASARAN I (S1) : .....	37
Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah.....	37
SASARAN I (S1) : .....	40
Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah.....	40
SASARAN I (S1) : .....	44
Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah.....	44
SASARAN I (S1) : .....	48
Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah.....	48
SASARAN II (S2) : .....	52
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	52
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	56

SASARAN II (S2) :	59
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai.....	59
SASARAN III (S3) :	63
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah .....	63
3.2 Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera .....	69
SASARAN IV (S4) .....	72
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai .....	72
SASARAN V (S5) : .....	80
Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai.....	80
SASARAN VI (S6) : .....	86
Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai.....	86
SASARAN VI (S6) : .....	89
Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai.....	89
3.3 Mewujudkan Infrastrktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan .....	92
SASARAN VII (S7) : .....	95
Meningkatkan Infrastruktur Kota .....	95
SASARAN VIII (S8) : .....	98
Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten .....	99
SASARAN IX (S9) : .....	103
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup .....	103
SASARAN IX (S9) : .....	107
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup .....	107
3.4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi.....	110
SASARAN X (S10) : .....	113
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah .....	113
SASARAN X (S10) : .....	116
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah .....	116
SASARAN X (S10) : .....	119
Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah .....	119

SASARAN XI (S11) : .....	122
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	122
SASARAN XI (S11) : .....	126
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	126
SASARAN XI (S11) : .....	130
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	130
3.5 Realisasi Anggaran.....	134
3.6 Analisis Efisiensi .....	135
BAB IV PENUTUP .....	137

## DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Perjanjian Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2024 .....	28
Tabel II-2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 .....	30
Tabel III-1 Capaian atau Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2024 .....	32
Tabel III-2 Prestasi Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2024 .....	68
Tabel III-3 Prestasi dan Penghargaan Bidang Kesehatan Kota Dumai .....	75
Tabel III-4 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	77
Tabel III-5 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pendidikan .....	83
Tabel III-6 Prestasi dan Penghargaan terkait SPBR dan Bidang Informasi .....	128
Tabel III-7 Prestasi dan Penghargaan terkait Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 .....	132
Tabel IV-1 Tabel Efisiensi Anggaran per IKU Kota Dumai 2024 .....	135

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Peta Proses Pada Peta Proses Bisnis Kota Dumai .....	3
Gambar I-2	Peta Relasi Pada Peta Proses Bisnis Kota Dumai.....	6
Gambar I-3	Jumlah ASN Kota Dumai Tahun 2024 .....	10
Gambar I-4	Jumlah ASN Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 .....	10
Gambar I-5	Komposisi Generasi PNS Kota Dumai Tahun 2024 .....	11
Gambar I-6	Komposisi Generasi PPPK Kota Dumai Tahun 2024.....	11
Gambar I-7	Grafik Tingkat Pendidikan ASN Kota Dumai Tahun 2024	12
Gambar III-1	Capaian Tujuan Perekonomian yang Mandiri dan masyarakat Sejahtera Tahun 2024.....	34
Gambar III-2	Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2020 - 2024.....	34
Gambar III-3	Tren Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK (milyar) Kota Dumai 2020 - 2024.....	38
Gambar III-4	Tren Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB (milyar) Kota Dumai 2020-2024 .....	41
Gambar III-5	Pemerintah Daerah Kota Dumai Mendapatkan penghargaan dalam kategori Koperasi berprestasi di tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi.....	43
Gambar III-6	Tren indikator PDRB Per Kapita ADHK (juta) Kota Dumai 2020-2024 .....	45
Gambar III-7	Tren Indikator PDRB Perkapita ADHB (Juta) Kota Dumai 2020-2024 .....	48
Gambar III-8	Tren Indikator Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2020-2024	53
Gambar III-9	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai .....	54
Gambar III-10	Tren Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Dumai 2020 - 2024.....	56

Gambar III-11	Tren Indikator Tingkat Kemiskinan Kota Dumai 2020-2024 .....	59
Gambar III-12	Tren Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Dumai 2020-2024.....	63
Gambar III-13	Capaian Tujuan Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera Tahun 2024 .....	69
Gambar III-14	Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai 2020 - 2024 .....	70
Gambar III-15	Tren Capaian Indeks Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022- 2023 .....	72
Gambar III-16	Tren Indikator Indeks Pendidikan Kota Dumai 2022-2024	80
Gambar III-17	Tren Indikator Indeks Pengeluaran Kota Dumai 2022- 2023 .....	86
Gambar III-18	Capaian Tujuan Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2024.....	92
Gambar III-19	Tren Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah Kota Dumai 2022-2024.....	95
Gambar III-20	Tren Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan Kota Dumai 2023-2024 .....	99
Gambar III-21	Tren Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai 2023-2024.....	103
Gambar III-22	Tren Indikator Cakupan Pelayanan Persampahan Kota Dumai 2020-2024.....	107
Gambar III-23	Capaian Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kota Dumai Tahun 2024.....	110
Gambar III-24	Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Dumai 2022 - 2024.....	111

Gambar III-25	Tren Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun Kota Dumai 2020-2024 .....	113
Gambar III-26	Tren Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai 2020-2024.....	116
Gambar III-27	Tren Indeks Manajemen Resiko Kota Dumai 2022-2024	119
Gambar III-28	Tren Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Dumai 2020-2024 .....	122
Gambar III-29	Tren Indikator Indeks Layanan SPBE Kota Dumai 2021-2024 .....	126
Gambar III-30	Tren Indikator Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2024 .....	130
Gambar IV-1	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran Kota Dumai Tahun 2024.....	134



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pelaporan terhadap kinerja dan anggaran instansi pemerintah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mengevaluasi

pencapaian sasaran strategis serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Laporan ini disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Dengan adanya LKIP, diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

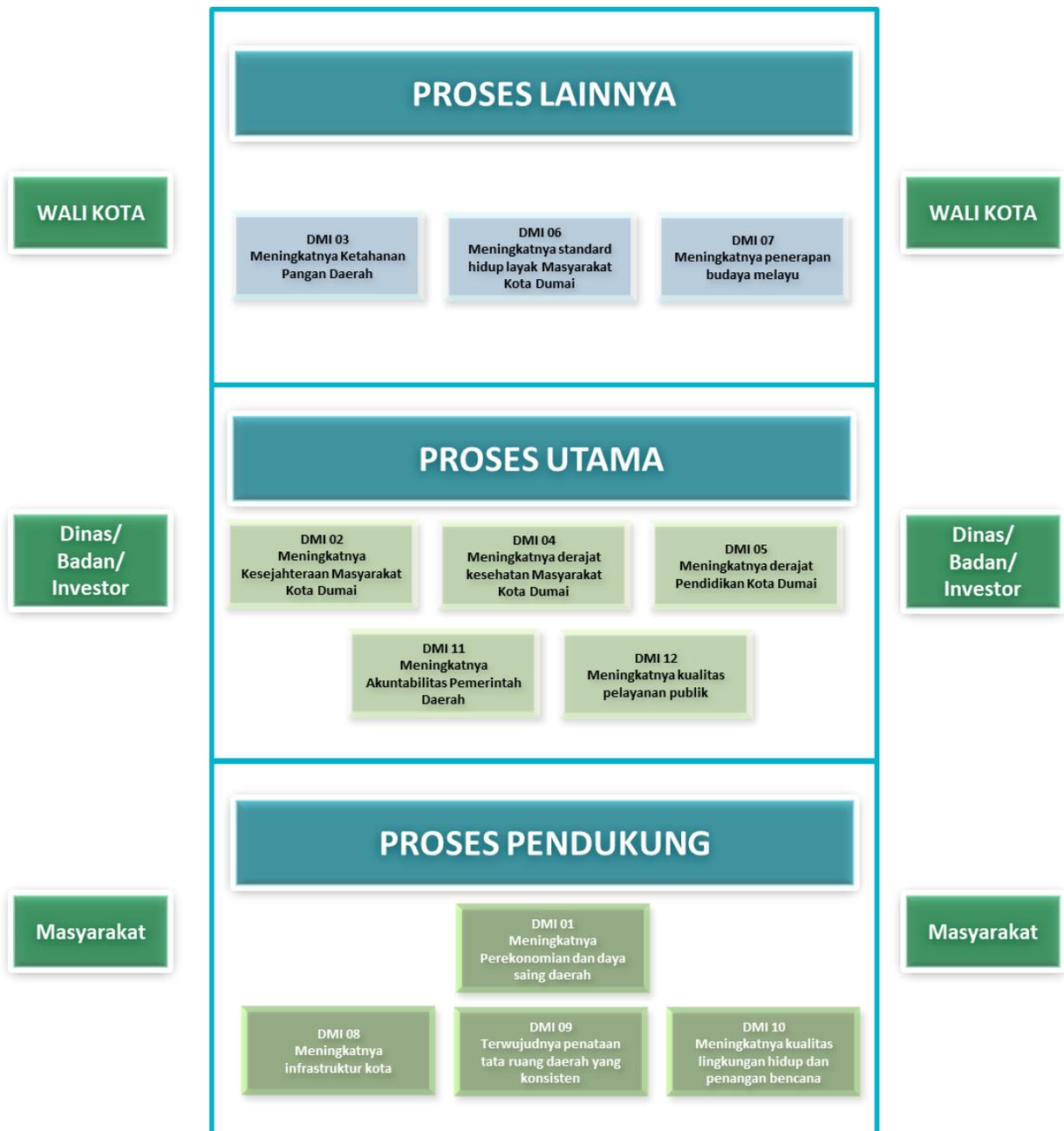
## 1.3 Gambaran Umum Organisasi

### 1.3.1 Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai merupakan struktur organisasi yang terdiri dari berbagai instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Susunan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Dumai menerapkan peta proses bisnis yang menggambarkan sistem kerja dan mekanisme operasional antarinstansi. Peta proses bisnis ini memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan kerja antar

perangkat daerah, mekanisme pelayanan publik, serta alur kerja dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Peta proses bisnis Kota Dumai diatur dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 991 Tahun 2022 tentang Penetapan Proses Bisnis, adapun gambaran peta proses bisnis Kota Dumai dapat dilihat pada gambar berikut ini :

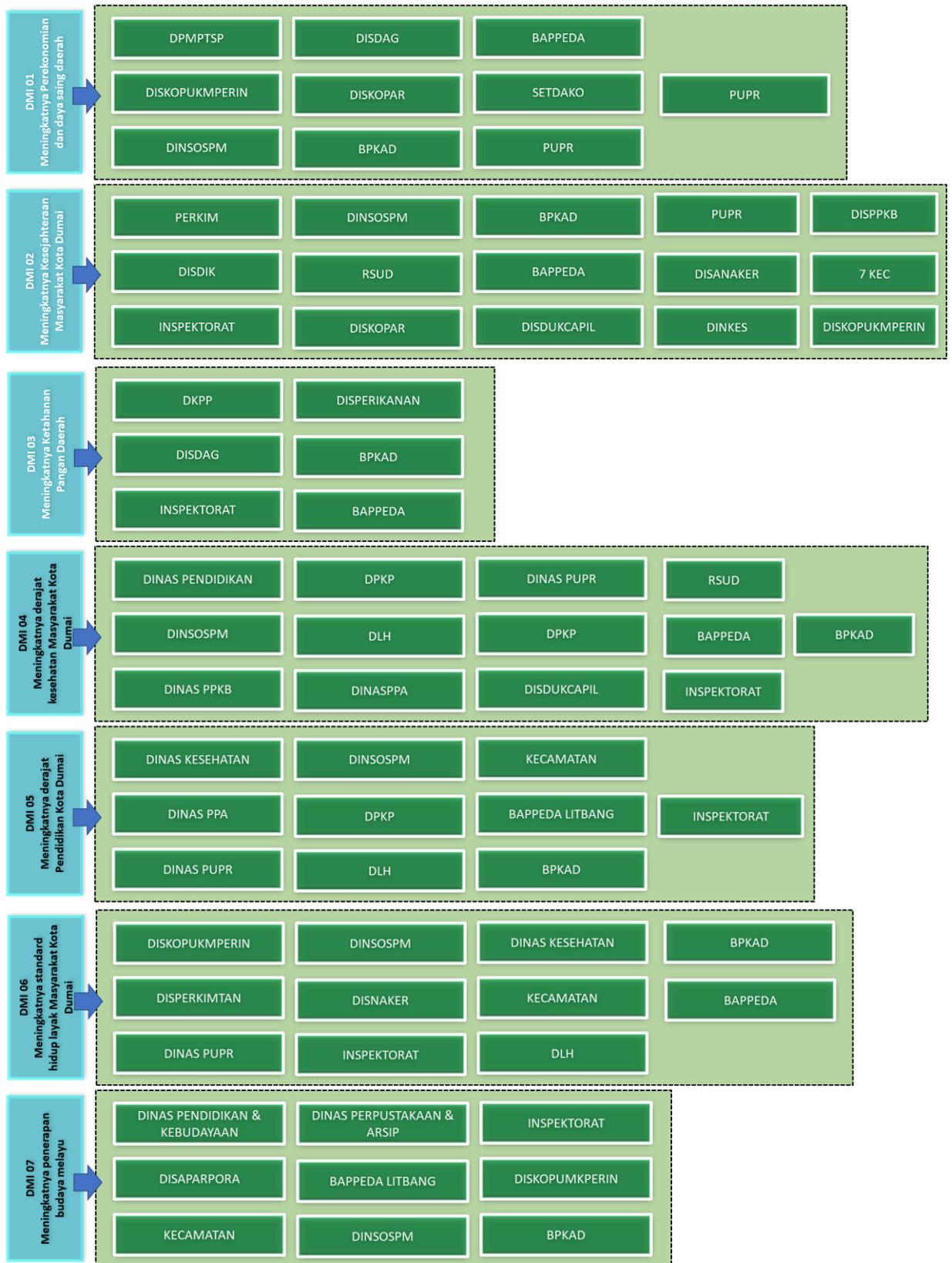


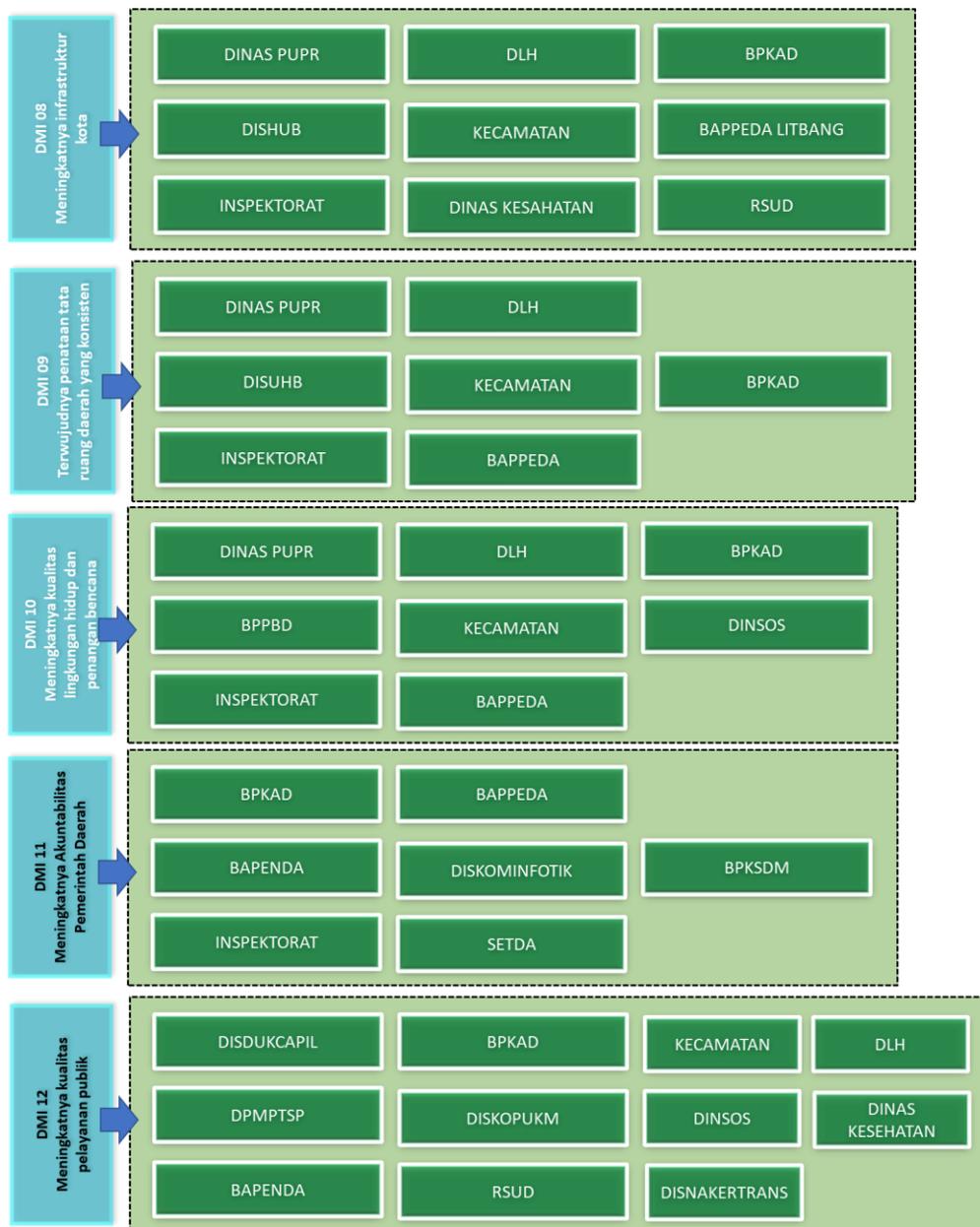
Gambar I-1 Peta Proses Pada Peta Proses Bisnis Kota Dumai

Berdasarkan gambar diatas Peta proses bisnis Kota Dumai melibatkan berbagai aktor utama, yakni Wali Kota, Dinas/Badan/Investor, dan Masyarakat. Proses dimulai dengan tahap perencanaan dan regulasi, di mana Wali Kota menetapkan kebijakan dan regulasi, sementara Dinas atau Badan terkait menyusun perencanaan dan kajian strategis. Pada saat yang sama, investor dan masyarakat memberikan masukan serta aspirasi untuk pembangunan kota. Setelah itu, dalam tahap investasi dan perizinan, investor mengajukan izin kepada Dinas atau Badan terkait, yang kemudian melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi.

Wali Kota akan memberikan persetujuan terhadap izin strategis jika diperlukan. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan dan pengawasan, Dinas atau Badan menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan, diikuti dengan pelaksanaan investasi oleh pihak investor sesuai dengan perizinan yang diberikan.

Masyarakat juga terlibat dalam memberikan umpan balik selama proses berlangsung. Terakhir, dalam tahap evaluasi dan pengembangan, Dinas atau Badan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan, dan Wali Kota mengambil langkah strategis berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Investor dan masyarakat turut memberikan respons terhadap hasil pembangunan untuk perbaikan lebih lanjut.





**Gambar I-2 Peta Relasi Pada Peta Proses Bisnis Kota Dumai**

Untuk itu susunan organisasi dan tata kelola pemerintah kota dumai di atur dalam peraturan wali kota dumai nomor 15 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai. Adapun perangkat daerah sebagaimana diatur dalam perwako tersebut adalah :

- a. Sekretariat Daerah Kota

- b. Sekretariat DPRD Kota
- c. Inspektorat Daerah Kota
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri atas:
  - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - 2. Dinas Kesehatan
    - Unit Pelaksana Teknislaboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Airkelas A
    - Unit Pelaksana Teknisinstalasi Farmasi Kelas A
    - Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
  - 3. RSUD
  - 4. Dinas Pekerjaan Umum
    - UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A
    - UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A
    - UPT Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A
  - 5. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
  - 6. Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
  - 7. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
    - Unit Pelaksana Teknis Rumah Perlindungan Sosial Serai Serumpun Kelas A Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
  - 8. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  - 9. Dinas Lingkungan Hidup
    - Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
    - Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan Kelas A Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai
  - 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
    - Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai

11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Peradangan
14. Dinas Perhubungan
  - Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kelas A
  - Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A
15. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
  - Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Kelas A
  - Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Hewan Dan Laboratorium Veteriner Kelas A
16. Dinas Tenaga Kerja
17. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
18. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
  - Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Dan Ekonomi Kreatif Bukit Gelanggang Kelas A Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Dumai
19. Dinas Perikanan
  - Unit Pelaksana Teknis Benih Ikan Air Tawar Kelas A
  - Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau Kelas A
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
  - Unit Pelaksana Teknis Latihan Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Industri Kelas A Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Dumai
21. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
22. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

- e. Badan Daerah Kota, terdiri atas :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  2. Badan Riset Dan Inovasi Daerah
  3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
  4. Badan Pendapatan Daerah
  5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
  8. Kecamatan
  9. Kelurahan

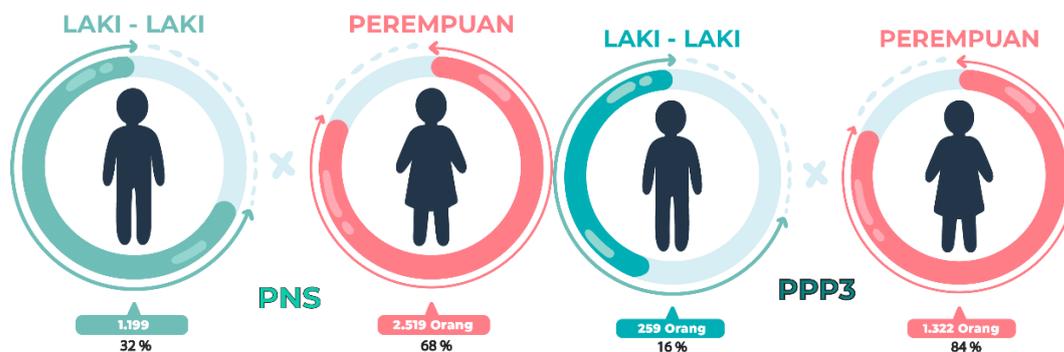
## 1.4 Data Kepegawaian

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Dumai mengambil berbagai langkah penting terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Formasi ASN di Kota Dumai sendiri berjumlah 5.299 orang, yang terdiri dari 3.718 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1.581 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

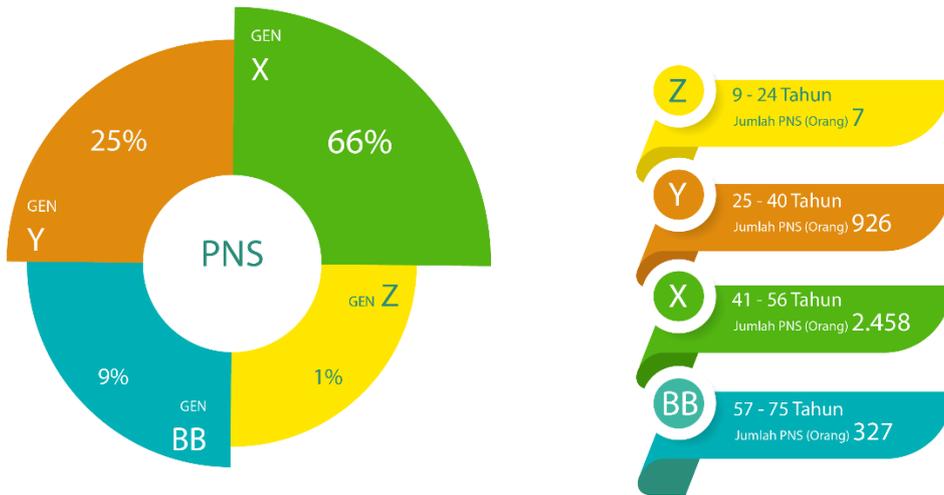
Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga menekankan pentingnya netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024. Wali Kota Dumai menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/1905/BKPSDM-P2KP yang melarang ASN terlibat dalam kampanye politik atau sosialisasi calon kepala daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih lengkap terkait ASN Kota Dumai tahun 2024 dapat dilihat pada gambar – gambar berikut:



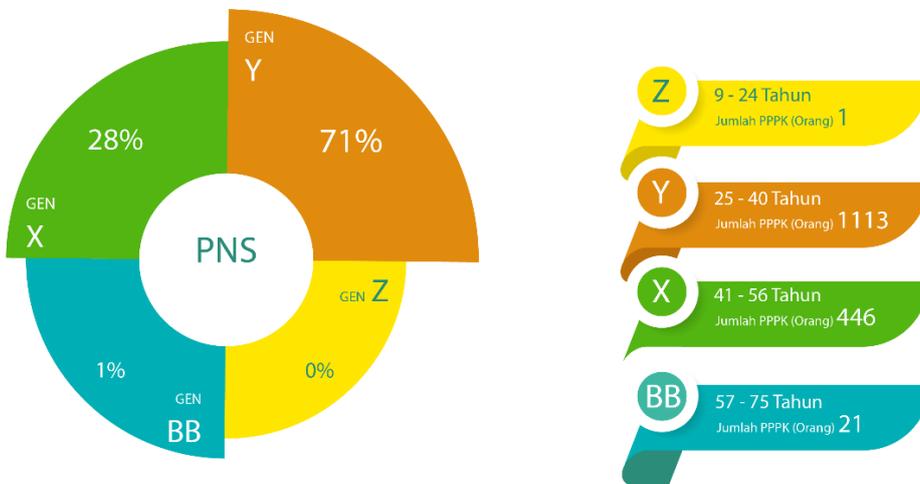
Gambar I-3 Jumlah ASN Kota Dumai Tahun 2024



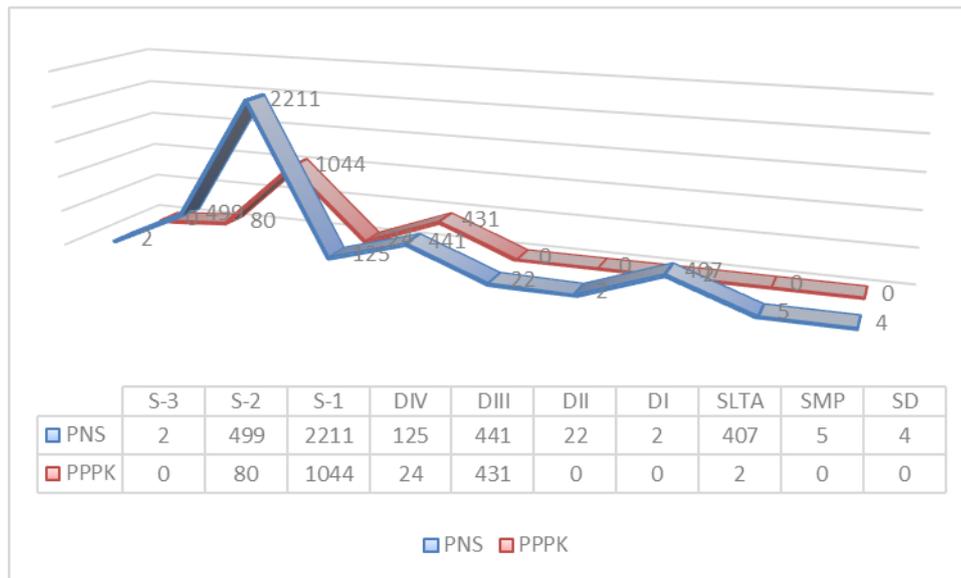
Gambar I-4 Jumlah ASN Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



**Gambar I-5 Komposisi Generasi PNS Kota Dumai Tahun 2024**



**Gambar I-6 Komposisi Generasi PPPK Kota Dumai Tahun 2024**



**Gambar I-7 Grafik Tingkat Pendidikan ASN Kota Dumai Tahun 2024**

Pemerintah Kota Dumai terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN secara berkala. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti kepemimpinan, manajemen pemerintahan, serta peningkatan keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Selain itu, ASN juga didorong untuk mengikuti pendidikan lanjutan, baik melalui beasiswa maupun pelatihan berbasis digital guna meningkatkan profesionalisme dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Di samping pelatihan, Pemerintah Kota Dumai juga menerapkan sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi. Penilaian dilakukan secara objektif untuk memastikan bahwa ASN yang berprestasi mendapatkan penghargaan dan kesempatan pengembangan karier yang lebih baik. Reformasi birokrasi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan SDM, dengan menekankan pada budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan zaman, ASN Kota Dumai dibekali dengan pemahaman mengenai digitalisasi administrasi pemerintahan. Penggunaan teknologi dalam pelayanan publik semakin diperkuat, sehingga ASN dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Pemerintah juga menanamkan nilai-nilai etika dan integritas untuk memastikan ASN bekerja dengan penuh tanggung jawab serta menjaga netralitas dalam berbagai aspek, terutama pada proses Pilkada 2024.

Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Kota Dumai berharap dapat menciptakan ASN yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi tantangan masa depan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

## 1.5 Isu Strategis

Sebagaimana diuraikan dalam Perubahan - RPJMD Tahun 2021-2026 dan didasarkan hasil analisis situasi lingkungan strategis eksternal dan internal serta perhatian khusus, terdapat 7 (tujuh) isu strategis pembangunan Kota Dumai yaitu:

- 1. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.**

Permasalahan terkait UMKM dan koperasi di Kota Dumai mencerminkan berbagai tantangan yang perlu segera diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa faktor utama yang menghambat perkembangan sektor ini antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, rendahnya kesadaran anggota, serta terbatasnya akses pasar dan promosi bagi UMKM.

Salah satu kendala utama dalam perkembangan koperasi di Kota Dumai adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan koperasi. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa koperasi dapat menjadi wadah untuk

meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui prinsip gotong royong dan ekonomi berbasis keanggotaan. Selain itu, pengurus dan pengawas koperasi sering kali kurang memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pengelolaan koperasi menjadi tidak profesional. Hal ini berakibat pada naik turunnya jumlah koperasi dari tahun ke tahun, yang menunjukkan bahwa banyak koperasi yang tidak mampu bertahan dalam jangka panjang.

Kesadaran anggota koperasi terhadap hak dan kewajiban mereka juga masih rendah. Banyak anggota yang hanya bergabung tanpa benar-benar aktif berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Akibatnya, koperasi sulit berkembang karena tidak adanya kontribusi yang optimal dari anggotanya. Selain itu, terbatasnya tenaga teknis pembina koperasi menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada koperasi agar dapat dikelola secara lebih profesional dan modern.

Di sisi lain, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan usaha juga menjadi tantangan besar. Banyak pelaku UMKM yang belum mengadopsi metode pengelolaan usaha yang modern dan berdaya saing. Mereka masih kesulitan dalam menerapkan strategi bisnis yang berbasis digital, manajemen keuangan yang baik, serta inovasi produk yang dapat menarik minat pasar.

Terbatasnya akses pasar juga menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM di Kota Dumai. Kurangnya jaringan distribusi serta minimnya inovasi dalam produksi barang dan jasa menyebabkan produk UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, promosi hasil produksi UMKM masih sangat terbatas. Banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan media digital atau strategi pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas.

Permasalahan lain yang juga berpengaruh adalah belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kader ini seharusnya berperan dalam memberikan pendampingan

kepada pelaku usaha dan koperasi, namun kurangnya pelatihan dan pembinaan menyebabkan fungsi ini belum berjalan dengan baik.

Kemudian dari Isu pengangguran, dimana penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan sosial politik secara keseluruhan. Secara umum tingginya tingkat pengangguran dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan Pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, dimana peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Rumah Terampil - Latihan Kerja yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan.

Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai memiliki mencapai 4,66%. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai Pendidikan maksimal tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan tinggi merupakan bagian terkecil dari seluruh angkatan kerja.

Dari aspek investasi di Kota Dumai, pada tahun 2024 pada dasarnya mengalami peningkatan dari aspek Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rupiah) sebesar Rp. 10.224.124.528.217 dibandingkan tahun 2023 yang hanya 3.386.922.760.000. Namun signifikansi nilai besaran investasi ini

tidak dibarengi dengan kuantitas perusahaan yang melakukan investasi di Kota Dumai, dimana pada tahun 2024 ini hanya 1 (satu) perusahaan saja menjadi investor baru di Kota Dumai.

## **2. Optimalisasi Pembangunan Dan Pengembangan Sektor Pertanian Daerah Untuk Ketahanan Pangan Daerah**

Pembangunan bidang Pertanian dan pangan harus merupakan usaha yang terpadu dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dengan demikian sektor pertanian dituntut untuk tumbuh dan berkembang dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan seperti penyediaan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2024 produksi pertanian di Kota Dumai mengalami penurunan dimana hasil produksi pertanian hanya sebesar 25.318 Ton, bila dibandingkan dengan tahun 2023 dengan total produksi sebanyak 32.272 Ton. Kendala ini mencakup ketergantungan pada bantuan pemerintah, keterbatasan lahan, serta pengaruh iklim dan ketiadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan sektor pertanian di Kota Dumai adalah adanya kelompok tani yang tidak mampu mengembangkan hasil pertanian sebagai modal untuk tahun berikutnya. Beberapa kelompok tani yang telah menerima bantuan dari pemerintah justru bergantung pada bantuan tersebut, tanpa adanya upaya untuk meningkatkan hasil pertanian secara mandiri. Hal ini menyebabkan pertumbuhan produksi menjadi stagnan dan tidak berkelanjutan, sehingga target peningkatan sektor pertanian sulit tercapai.

Kondisi pertanian di Kota Dumai yang masih mengandalkan sawah tadah hujan atau ladang juga menjadi faktor penghambat produksi, khususnya dalam sektor tanaman pangan seperti padi. Karena sistem pertanian ini hanya mengandalkan curah hujan sebagai sumber air utama, maka penanaman padi hanya dapat

dilakukan satu kali dalam setahun. Hal ini sangat berbeda dengan daerah yang memiliki sistem irigasi yang baik, di mana penanaman dapat dilakukan dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga produktivitas pertanian jauh lebih tinggi.

Selain itu, iklim dan cuaca di Kota Dumai masih sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Perubahan cuaca yang tidak menentu, seperti curah hujan yang tinggi atau musim kemarau yang berkepanjangan, dapat menyebabkan kegagalan panen atau penurunan produktivitas. Ketergantungan pada faktor alam ini semakin diperburuk dengan kurangnya infrastruktur penunjang seperti sistem irigasi yang baik, teknologi pertanian modern, dan ketersediaan pupuk yang stabil.

Faktor penghambat lainnya adalah belum adanya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Dumai. Lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang, terutama dalam menghadapi alih fungsi lahan yang semakin marak. Tanpa adanya lahan pertanian yang dikelola secara berkelanjutan, sektor pertanian di Kota Dumai akan semakin terancam dan sulit berkembang.

### **3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Merata.**

Permasalahan pendidikan di Kota Dumai mencerminkan berbagai tantangan yang menghambat akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Kendala ini mencakup aspek keterjangkauan pendidikan, kualitas tenaga pengajar, serta keterbatasan fasilitas dan data yang mendukung perencanaan kebijakan pendidikan.

Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Faktor utama yang menyebabkan hal ini bisa berasal dari kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, atau terbatasnya fasilitas pendidikan di

sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, daya tampung satuan pendidikan sekolah dasar yang masih kurang juga menjadi hambatan dalam memberikan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kota Dumai. Kekurangan ini dapat menyebabkan anak-anak kesulitan mendapatkan tempat di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga berpotensi meningkatkan angka putus sekolah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga menjadi kendala dalam membangun fondasi pendidikan yang kuat bagi anak-anak. Pendidikan di usia dini berperan penting dalam membentuk perkembangan kognitif dan sosial anak sebelum masuk ke jenjang sekolah dasar. Namun, masih banyak orang tua yang menganggap PAUD sebagai sesuatu yang tidak wajib, sehingga tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan usia dini masih rendah. Selain itu, jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) negeri yang terbatas semakin memperburuk kondisi ini, karena banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke TK swasta yang berbiaya lebih tinggi.

Faktor ekonomi juga menjadi kendala besar dalam dunia pendidikan di Kota Dumai. Masih banyak masyarakat yang kesulitan secara finansial untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Meskipun ada program bantuan dari pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), namun terkadang akses terhadap program ini masih terbatas atau tidak merata. Kurangnya data yang akurat mengenai jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah juga menjadi tantangan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang tepat sasaran guna mengatasi permasalahan pendidikan di daerah ini.

Selain tantangan dalam akses pendidikan, masalah dalam sektor tenaga pendidik juga menjadi perhatian. Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya kuota penerimaan

Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Tidak hanya itu, proses seleksi untuk masuk ke dalam program PPG juga cukup sulit, sehingga tidak semua guru bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui jalur ini. Akibatnya, masih banyak guru di Kota Dumai yang memiliki tingkat pendidikan di bawah S1/DIV, padahal standar minimal pendidikan bagi seorang guru saat ini adalah sarjana.

Permasalahan lainnya adalah masih adanya guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah guru di bidang tertentu, sehingga sekolah terpaksa menempatkan guru pada mata pelajaran yang bukan keahliannya. Kondisi ini berimbas pada rendahnya kualitas pembelajaran, karena guru tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam bidang yang diajarkan. Selain itu, guru-guru yang mengajar di luar bidang keahliannya juga akan kesulitan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPG, sehingga kesempatan mereka untuk meningkatkan kompetensi menjadi semakin kecil.

#### **4. Peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu**

Berbagai permasalahan sosial yang berkembang masih relatif tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di kota Dumai. Di tahun 2024 jumlah PPKS di kota Dumai sebanyak 132.811 jiwa (sumber data bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (data DTKS) dan Rehabilitasi Sosial). Permasalahan Kesejahteraan Sosial timbul dari dapat atau tidaknya kebutuhan manusia terpenuhi. Permasalahan kesejahteraan sosial ada yang secara nyata berpangkal pada hambatan-hambatan dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu faktor kebutuhan layanan sosial meningkat adalah jumlah PPKS yang masih relatif tinggi.

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial sarana dan prasarana serta SDM mempunyai peran yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah sarana mobilitasi operasional dan tenaga Profesional dalam proses penanganan sosial yang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan. Ketersediaan sarana, prasarana dan SDM yang masih minim tentunya mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga masalah ini menjadikan suatu hambatan tersendiri.

Masalah lainnya terkait, data dalam penyaluran bantuan menjadi masalah urgent di Indonesia. Hal ini selalu menjadi masalah utama ketika Pemerintah melalui Kementerian atau Dinas terkait akan menyalurkan bantuan-bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial lainnya yang di danai oleh APBD yang bersifat accidental ataupun terprogram. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah Pusat mengambil data kemiskinan dengan indikator kemiskinan tersendiri. Akibatnya terjadi data yang tidak sesuai dengan tujuan bantuan, data ganda yang mendapat bantuan, dan yang tidak mendapatkan bantuan.

Terkait dengan penerapan budaya melayu di Kota Dumai Pengaruh globalisasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat capaian persentase objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan pengembangan. Arus budaya dari luar yang semakin kuat menyebabkan banyak tradisi budaya lokal mulai ditinggalkan, terutama oleh generasi muda yang lebih tertarik pada budaya modern. Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengonsumsi budaya global dibandingkan menggali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan lokal. Minimnya integrasi budaya Melayu Riau dalam platform digital yang menarik membuat daya tarik budaya ini semakin berkurang.

Selain itu, rendahnya pengetahuan dan edukasi mengenai kebudayaan Melayu Riau juga menjadi kendala dalam

pengembangannya. Kurangnya materi dan kurikulum pendidikan yang mengajarkan budaya lokal di sekolah-sekolah menyebabkan generasi muda tidak memiliki pemahaman yang kuat terhadap warisan budaya mereka sendiri. Minimnya sosialisasi dan program edukasi kebudayaan yang melibatkan masyarakat juga membuat banyak orang tidak mengetahui nilai-nilai penting dari kebudayaan Melayu Riau serta cara melestarikannya. Selain itu, kurangnya regenerasi pelaku budaya, seperti seniman, budayawan, dan ahli warisan budaya, semakin memperburuk kondisi ini.

**5. Peningkatan Kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.**

Permasalahan infrastruktur yang ditangani Kota Dumai mencakup berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan kelangsungan pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kerusakan infrastruktur, seperti jalan dan drainase, yang tidak sebanding dengan laju pembangunannya. Jalan yang rusak dan sistem drainase yang tidak optimal menyebabkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terganggu. Infrastruktur yang ada sering kali mengalami kerusakan lebih cepat daripada pembangunan atau perbaikannya, sehingga menimbulkan ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan fasilitas yang memadai.

Selain itu, jumlah dan kualitas infrastruktur yang belum optimal juga menjadi masalah serius. Banyak wilayah di Kota Dumai yang masih membutuhkan pembangunan jalan dan drainase yang lebih baik agar dapat menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Kualitas infrastruktur yang ada juga perlu ditingkatkan agar lebih tahan lama dan dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pertumbuhan kota.

Kerentanan terhadap genangan banjir juga menjadi isu penting, di mana ketinggian air bisa mencapai 0,25 hingga 0,5 meter di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh sistem drainase yang

belum optimal, curah hujan tinggi, serta kondisi geografis kota yang membuat air sulit mengalir dengan baik. Genangan banjir tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat tetapi juga dapat merusak infrastruktur yang sudah ada.

Di samping itu, kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir serta perairan laut menjadi masalah yang semakin serius. Aktivitas industri dan banyaknya perusahaan yang beroperasi di kawasan pesisir meningkatkan pencemaran lingkungan, baik dari limbah industri maupun eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, tingginya tingkat abrasi pantai akibat gelombang laut dan kurangnya upaya perlindungan pesisir menyebabkan erosi yang semakin parah, mengancam permukiman dan ekosistem pesisir.

Selain infrastruktur pembangunan, permasalahan yang dihadapi adalah Jaringan perpipaan yang belum merata, Terbatasnya jumlah unit SR dan Kemampuan keuangan yang terbatas juga menjadi isu yang perlu perbaikan kedepannya.

#### **6. Peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan, banjir dan rob, serta potensi penurunan muka tanah**

Pada tahun 2024, Kota Dumai menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup, serta penanganan bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, kebakaran perkotaan, banjir, rob, dan potensi penurunan muka tanah.

Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan ruang dan lingkungan hidup yang belum optimal. Pertumbuhan industri dan permukiman yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang baik, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama di kawasan hutan dan pesisir, berkontribusi terhadap peningkatan risiko bencana serta penurunan kualitas lingkungan

hidup. Pencemaran udara dan perairan akibat aktivitas industri dan transportasi juga menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem daerah.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius, terutama pada musim kemarau. Jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar di Kota Dumai pada tahun 2024 adalah sebanyak 138.95 hektare. Lahan gambut yang luas di sekitar Kota Dumai memiliki sifat yang mudah terbakar, dan praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang melarangnya. Selain itu, kebakaran di kawasan perkotaan juga menjadi isu penting, terutama akibat instalasi listrik yang tidak layak, kurangnya kesadaran akan bahaya kebakaran, serta keterbatasan infrastruktur pemadam kebakaran.

Banjir dan rob juga menjadi tantangan utama, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. Sistem drainase yang belum optimal, ditambah dengan curah hujan tinggi dan kenaikan permukaan air laut, menyebabkan banjir dan rob yang semakin sering terjadi. Hal ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat serta kerusakan infrastruktur dan properti.

Selain itu, potensi penurunan muka tanah di Kota Dumai juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Faktor utama yang menyebabkan fenomena ini adalah eksploitasi air tanah secara berlebihan serta tekanan dari beban infrastruktur dan bangunan di atasnya. Jika tidak segera diatasi, penurunan muka tanah dapat meningkatkan risiko banjir rob, memperburuk kondisi drainase, serta menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Selain itu, untuk kinerja Kualitas air di Kota Dumai tahun 2024 sudah masuk dalam kategori angka baik, namun dengan kondisi air sungai merupakan badan gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi sehingga hasil uji nilai parameter BOD dan COD melebihi baku mutu.

## **7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.**

Bila merujuk pada Indeks Profesionalitas Aparatur (IPA) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, data menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir IPA Kota Dumai dikategorikan rendah dengan tolak ukur yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Khususnya pada dimensi kompetensi, target 20 JP per tahun melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh ASN di Kota Dumai dalam rangka pengembangan kompetensi belum tercapai.

Selain itu, kualitas penyelenggara SDM Kota Dumai juga mengalami permasalahan terkait, belum adanya kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan talent pool dan rencana suksesi.

Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang ditandai dengan belum berfungsinya struktur manajemen risiko secara efektif. Hal ini mengakibatkan lemahnya identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program pemerintah. Tanpa sistem manajemen risiko yang baik, Pemerintah Kota Dumai berpotensi menghadapi berbagai tantangan, seperti inefisiensi penggunaan anggaran, ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan, serta meningkatnya risiko penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, kurangnya keseriusan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Penilaian Mandiri implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi kendala dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum optimal dalam menilai dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri, sehingga perbaikan tata kelola dan efektivitas program yang dijalankan menjadi lambat.

Dari sisi perencanaan kinerja, banyak perangkat daerah yang belum memenuhi 100% kriteria perencanaan yang dipersyaratkan,

baik dalam penyusunan dokumen perencanaan maupun implementasinya. Kualitas perencanaan yang rendah berdampak pada pelaksanaan program yang tidak efektif dan kurangnya sinergi antara kebijakan daerah dengan kebutuhan masyarakat.

Masalah lainnya adalah sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum memiliki definisi operasional yang jelas, serta belum dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment. Tanpa indikator yang terukur dan jelas, sulit untuk menilai sejauh mana keberhasilan suatu OPD dalam mencapai target kinerjanya. Selain itu, tanpa mekanisme penghargaan dan sanksi yang berbasis kinerja, motivasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas kerja menjadi rendah.

Terakhir, pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi dan kebijakan. Idealnya, laporan kinerja tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi utama dalam menentukan langkah strategis ke depan. Namun, di Kota Dumai, laporan kinerja belum digunakan secara maksimal untuk melakukan perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif



# BAB II PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021-2026

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan merupakan tahun ke-empat yang menandakan perkembangan pembangunan telah berada pada tahap penting dalam menuju pencapaian target pada akhir masa RPJMD. Visi Kota Dumai yang

berfokus pada "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)" tetap konsisten. Dalam mewujudkan visi ini, "keunggulan dalam kepelabuhanan dan industri" serta "kearifan budaya Melayu" menjadi dua aspek utama dalam pembangunan yang dijalankan.

Pemerintah Kota Dumai tetap berkomitmen pada empat misi yang mencakup berbagai sektor strategis. Misi 1 bertujuan untuk mengembangkan perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan serta industri. Misi 2 fokus pada upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu. Misi 3 berkaitan dengan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Terakhir, Misi 4 berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Keempat misi tersebut

dijabarkan lebih lanjut melalui 4 tujuan, 11 sasaran strategis, dan 22 indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan pencapaian yang optimal.



## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan RPJMD dan RKPD Perubahan Tahun 2024, berikut Perjanjian Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2024

*Tabel II-1 Perjanjian Kinerja Utama Kota Dumai Tahun 2024*

No	Sasaran	No	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6
T1	Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan masyarakat sejahtera	T1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,36-5,07	%
S1	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	S1.1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	30,25-30,45	Rp. Triliun
		S1.2	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	52,42-53,37	Rp. Triliun
		S1.3	PDRB Perkapita ADHK	90,83-91,45	Rp. Juta
		S1.4	PDRB Perkapita ADHB	157,42-160,27	Rp. Juta
S2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	S2.5	Indeks Gini	0,314-0,340	Poin
		S2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,89 -5,27	%
		S2.7	Tingkat Kemiskinan	2,93 -3,07	%
S3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	S3.8	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	73,66	Indeks
TII	Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saingdan Sejahtera	T2	Indeks Pembangunan Manusia	75,72-75,95	Indeks
S4	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	S4.9	Indeks Kesehatan	0,790-0,791	Indeks

No	Sasaran	No	Indikator	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6
S5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	S5.10	Indeks Pendidikan	0,714-0,717	Indeks
S6	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	S6.11	Indeks Pengeluaran	0,769 – 0,773	Indeks
		S6.12	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	92,35	%
TIII	<b>Tujuan : Mewujudkan Infrastruktural dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>	T3	<b>Persentase Infrastruktural dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas</b>	<b>60,23</b>	<b>%</b>
S7	Meningkatnya Infrastruktur Kota	S7.13	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	64,72	%
S8	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	S8.14	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	50,26	%
S9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	S9.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	Indeks
		S9.16	Cakupan Pelayanan Persampahan	65,7	%
TIV	<b>Tujuan : Meningkatkan Reformasi Birokrasi</b>	T4	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B</b>	<b>Indeks</b>
S10	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	S10.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	WTP	Opini
		S10.18	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	B	Nilai
		S10.19	Indeks Manajemen Resiko	73,66	Indeks
S11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S11.20	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,65	Indeks
		S11.21	Indeks Layanan SPBE	3	Indeks
		S11.22	Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00	Skor

## 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan penjabaran Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2024 Perubahan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. terdapat penambahan pada belanja daerah sebesar Rp 458.762.189.073,00 dari Rp 1.855.078.807.189,00 menjadi Rp 2.313.840.996.262,00. Secara lebih detail, Perubahan APBD dirinci sebagai berikut :

*Tabel II-2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024*

Uraian	Semula	Bertambah/ Berkurang	Menjadi
Volume APBD 2024	1.855.078.807.189	458.762.189.073	2.313.840.996.262
Pendapatan Daerah	1.780.011.716.015	508.267.772.955	2.288.279.487.970
Belanja Daerah	1.823.078.807.189	458.762.189.073	2.281.840.996.262
Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan Pembiayaan	75.067.091.174	- 49.505.583.882	25.561.507.292
b. Pengeluaran Pembiayaan	32.000.000.000	0	32.000.000.000
Pembiayaan Netto	43.067.091.174	-49.505.583.882	-6.438.492.708



## BAB III

# CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, yang memasuki tahun keempat. Tahap ini menjadi momentum penting dalam memastikan pencapaian target pembangunan hingga akhir periode RPJMD.

Visi pembangunan Kota Dumai tetap konsisten dengan "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, keunggulan dalam kepelabuhanan dan industri serta kearifan budaya Melayu menjadi dua aspek utama yang terus diperkuat dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berdasarkan empat misi utama, yang mencakup berbagai sektor strategis:

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan serta industri.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu.
3. Membangun infrastruktur wilayah yang berkualitas.

4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Untuk memastikan pencapaian yang optimal, keempat misi ini dijabarkan lebih lanjut melalui 4 tujuan, 11 sasaran strategis, dan 22 indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Kota Dumai.

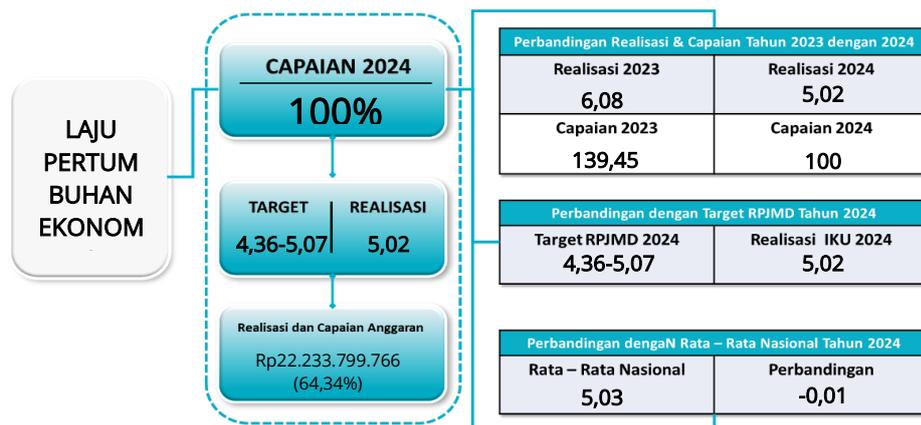
**Tabel III-1 Capaian atau Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Dumai Tahun 2024**

No	Sasaran	No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu</b>						
<b>MISI I Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri</b>						
<b>T1</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan masyarakat sejahtera</b>	<b>T1</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>4,36-5,07</b>	<b>5,02</b>	<b>100</b>
S1	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	S1.1	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) ADHK	30,25-30,45	30,88	100
		S1.2	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) ADHB	52,42-53,37	52,67	100
		S1.3	PDRB Perkapita ADHK	90,83-91,45	92,72	100
		S1.4	PDRB Perkapita ADHB	157,42-160,27	158,15	100
S2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	S2.5	Indeks Gini	0,314-0,340	0,33	105,09
		S2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,89 -5,27	4,66	103,9
		S2.7	Tingkat Kemiskinan	2,93 -3,07	3,14	98
S3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	S3.8	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	73,66	76,3	103,58
<b>MISI II Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu</b>						
<b>TII</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera</b>	<b>T2</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>75,72-75,95</b>	<b>77,03</b>	<b>101,7</b>

No	Sasaran	No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
S4	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	S4.9	Indeks Kesehatan	0,790-0,791	0,78	98,73
S5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	S5.10	Indeks Pendidikan	0,714-0,717	0,714	100
S6	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	S6.11	Indeks Pengeluaran	0,769 – 0,773	0,778	100
		S6.12	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	92,35	100	108,28
<b>MISI III</b>	<b>Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas</b>					
<b>TIII</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Infrastruktuktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>	<b>T3</b>	<b>Persentase Infrastruktuktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas</b>	<b>60,23</b>	<b>55,03</b>	<b>91,37</b>
S7	Meningkatnya Infrastruktur Kota	S7.13	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	64,72	48,39	74,76
S8	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	S8.14	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	50,26	50,26	100
S9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	S9.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	20,83	33,72
		S9.16	Cakupan Pelayanan Persampahan	65,7	61,04	92,9
<b>MISI IV</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik</b>					
<b>TIV</b>	<b>Tujuan : Meningkatkan Reformasi Birokrasi</b>	<b>T4</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100</b>
S10	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	S10.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	WTP	WTP	100
		S10.18	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	B	B	100
		S10.19	Indeks Manajemen Resiko	73,66	76,3	103,58
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S11.20	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,65	89,78	104,8
		S11.21	Indeks Layanan SPBE	3	3,9	130%
		S11.22	Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00	54,7	156,2

### 3.1 Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat Sejahtera

Pemerintah Kota Dumai bertujuan untuk membangun perekonomian yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Adapun pelaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat dari indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III-1 Capaian Tujuan Perekonomian yang Mandiri dan masyarakat Sejahtera Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai mengalami fluktuasi pencapaian. Bila melihat pada Capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah sebesar 100% dari sebesar 4,36 – 5,07 terilisasi sebesar 5,02. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi penurunan dimana sebelumnya berada pada besaran 6,08. Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar III-2 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2020 - 2024

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2024 berada dalam rentang target RPJMD yakni 4,36-5,07. Pada level nasional sedikit dibawah capaian nasional yakni kurang dari 0,01, dimana pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03. Terkait dengan realisasi anggaran, pada tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat Sejahtera. Realisasi anggaran untuk tujuan ini berada pada jumlah Rp22.233.799.766 dari total pagu sebesar Rp34.555.980.096, dimana capaian anggaran sebesar 64,34% dimana efisiensi anggaran sebesar 35,66% dengan selisih Rp12.322.180.330.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga sasaran utama yang menjadi fokus dalam penguatan sektor ekonomi dan ketahanan daerah. Pertama, meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah melalui penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan perizinan, fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal. Dengan strategi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih cepat dan berkelanjutan.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui berbagai program peningkatan keterampilan dan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat diharapkan dapat memperoleh penghasilan yang lebih layak dan hidup lebih sejahtera.

Ketiga, meningkatkan ketahanan pangan daerah dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan lokal, efisiensi distribusi hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan. Selain itu, penerapan teknologi

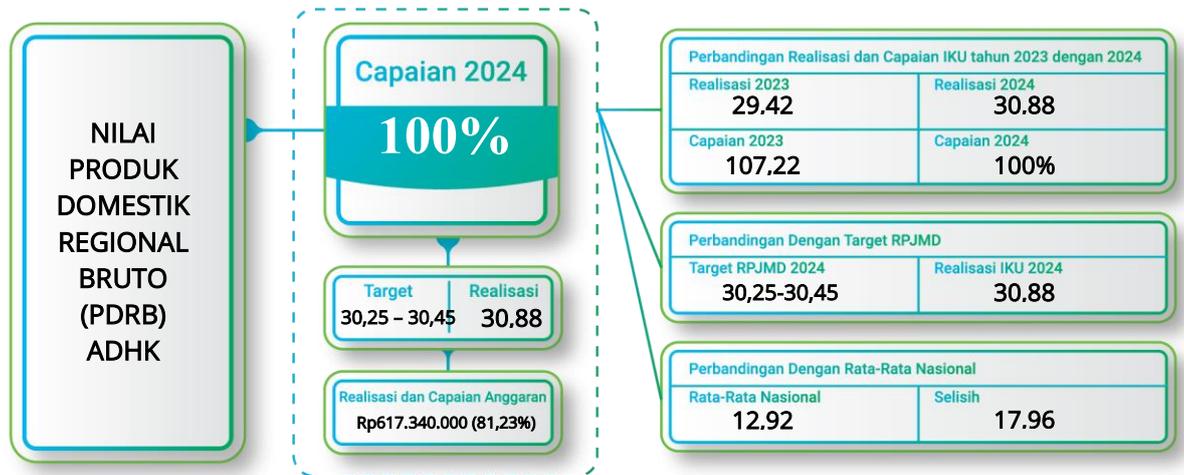
pertanian modern dan diversifikasi produk pangan juga menjadi bagian dari strategi untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan ketiga sasaran tersebut dalam kebijakan pembangunan, diharapkan Kota Dumai dapat menjadi daerah dengan perekonomian yang lebih mandiri, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

Penjelasan masing - masing sasaran dalam tujuan mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat Sejahtera adalah sebagai berikut:



## SASARAN I (S1) : Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah



### S1.1 Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB ADHK menunjukkan perkembangan ekonomi dengan menghilangkan pengaruh perubahan harga sehingga lebih mencerminkan pertumbuhan riil suatu wilayah. Kota Dumai sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Riau memiliki dinamika PDRB yang menarik untuk dianalisis, terutama dengan membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024.

Perkembangan PDRB ADHK Kota Dumai Berdasarkan data yang tersedia, nilai realisasi PDRB ADHK Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana **Realisasi Tahun 2023** adalah sebesar 29,42 milyar

meningkatkan pada **Realisasi Tahun 2024** sebesar 30,88 milyar dengan **Capaian Tahun 2024** sebesar 100%.



**Gambar III-3 Tren Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK (milyar) Kota Dumai 2020 - 2024**

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan nilai PDRB ADHK sebesar 1,46 poin dari tahun 2023 ke tahun 2024. Namun, capaian terhadap target mengalami penurunan dari 107,22% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan nilai PDRB, target yang ditetapkan untuk tahun 2024 lebih realistis dibandingkan tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap Target RPJMD 2024 Dalam dokumen perencanaan daerah, target RPJMD 2024 untuk PDRB ADHK Kota Dumai ditetapkan dalam rentang 30,25 - 30,45. Dengan realisasi sebesar 30,88 milyar, dapat disimpulkan bahwa target tersebut telah terlampaui. Hal ini menunjukkan adanya kinerja ekonomi yang baik serta perencanaan pembangunan yang efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional realisasi PDRB ADHK Kota Dumai telah memenuhi target daerah, nilai tersebut juga berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 12,92 milyar. Dengan perbedaan 17,96 milyar, ini menunjukkan adanya bahwa capaian Kota Dumai lebih tinggi dari an rata-rata nasional. Untuk realisasi anggaran pada indikator

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. **Struktur Ekonomi Kota Dumai:** Sektor dominan dalam perekonomian Dumai mungkin memiliki pertumbuhan yang positif dibandingkan sektor unggulan di tingkat nasional.
2. **Perencanaan Pembangunan:** Kota Dumai mungkin masih berkembang dalam pemenuhan infrastruktur dan investasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. **Sektor Unggulan:** Jika ekonomi Dumai bergantung pada sektor tertentu seperti industri minyak dan gas, fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB secara signifikan.

Pemerintah Kota Dumai telah berupaya untuk meningkatkan PDRB melalui berbagai strategi, terbukti dengan meningkatnya Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB diangka 14,43% pada tahun 2024. Kemudian melihat Ekspor Bersih Perdagangan berdasarkan PDRB ADHK menurut Pengeluaran tahun 2024 telah mencapai 7.775,00 Milyar. Peningkatan ini **didukung** oleh faktor minat pelaku UMKM ekspor yang tinggi untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Namun, masih terdapat faktor **penghambat** berupa Komoditi yang diekspor relatif masih sama dari tahun ke tahun, dan masih bersifat bahan mentah.

Dumai mengalami peningkatan PDRB ADHK dari tahun 2023 ke tahun 2024 dan mampu melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan. Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dimana pagu anggaran sebesar Rp760.000.000 dengan realisasi sebesar Rp617.340.000 dan ketercapaian sebesar 81,23%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp142.660.000 atau setara 18,77%.

# SASARAN I (S1) :

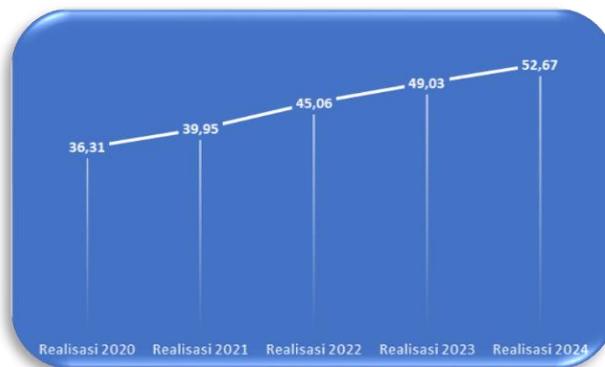
## Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah

### S1.2 Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah salah satu indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu daerah dalam nilai nominal. PDRB ADHB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun, tanpa menyesuaikan perubahan harga atau inflasi. Kota Dumai, sebagai salah satu kota strategis di Provinsi Riau, mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks pencapaian target pembangunan daerah.

Perkembangan PDRB ADHB Kota Dumai Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai menunjukkan tren pertumbuhan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dimana **Realisasi Tahun 2023 sebesar 49,03** milyar meningkat kemudian pada **Realisasi Tahun 2024 sebesar 52,67** milyar dengan **Capaian Tahun 2024** yakni sebesar 100%.



**Gambar III-4 Tren Indikator Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB (milyar) Kota Dumai 2020-2024**

Dari data di atas, terdapat peningkatan nilai PDRB ADHB sebesar 3,64 poin dari tahun 2023 ke 2024. Meskipun capaian target mengalami penurunan dari 118,09% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024, realisasi PDRB tetap berada dalam rentang yang ditetapkan dalam RPJMD 2024, yaitu 50,42–53,37.

Evaluasi terhadap Target RPJMD 2024 Target RPJMD 2024 untuk PDRB ADHB Kota Dumai ditetapkan dalam kisaran 50,42–53,37. Dengan realisasi sebesar 52,67 milyar, Kota Dumai telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai perencanaan dan strategi pembangunan daerah.

Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Meskipun PDRB ADHB Kota Dumai telah mencapai target daerah, nilai ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 22,14 milyar. Dengan selisih sebesar 30,53 milyar, Kota Dumai masih memiliki upaya peningkatan ekonomi yang cukup besar dibandingkan dengan tingkat nasional. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian ini meliputi:

1. **Struktur Ekonomi Daerah:** Ketergantungan Kota Dumai pada sektor tertentu, seperti minyak dan gas, dapat mempengaruhi tingkat PDRB jika sektor ini mengalami fluktuasi.

2. **Investasi dan Infrastruktur:** keterbukaan terhadap investasi dan pembangunan infrastruktur dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. **Daya Saing dan Produktivitas:** Tingkat produktivitas dan daya saing daerah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia juga mengalami perkembangan.

Kota Dumai mengalami peningkatan PDRB ADHB yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Selain itu, realisasi PDRB ADHB tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Dan dibandingkan dengan rata-rata nasional, nilai PDRB Kota Dumai telah melampaui rata - rata nasional, yang mencerminkan adanya peningkatan daya saing ekonomi.

Adapun faktor **pendukung** peningkat indikator ini tidak lepas dari beberapa hal seperti didorong oleh penyerapan tenaga kerja yang signifikan, akumulasi modal, dan kerjasama pemerintah daerah dalam sektor tersebut. Namun, terdapat beberapa faktor **penghambat** yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Dumai. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terbatasnya modal investasi dapat menghambat perluasan sektor industri dan perdagangan.

Pemerintah Kota Dumai terus mendorong optimalisasi sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, serta penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Dinas Koperasi dalam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 802.937.200 dengan realisasi Rp. 521.499.513 atau 64,95% tingkat efisiensinya (191,89%) adalah berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (64,95%).



**Gambar III-5 Pemerintah Daerah Kota Dumai Mendapatkan penghargaan dalam kategori Koperasi berprestasi di tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi**

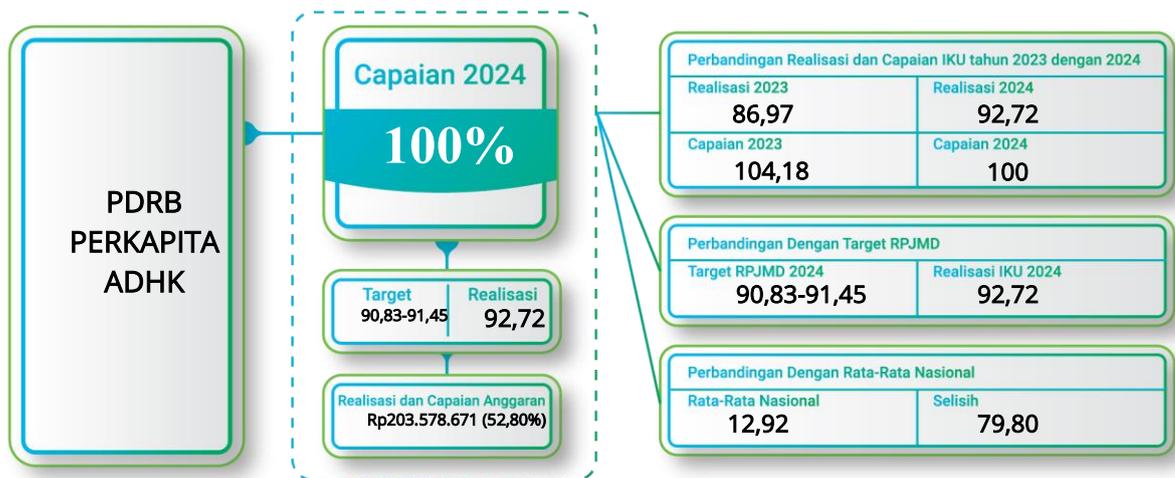
Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan, dimana pagu anggaran sebesar Rp549.992.100 dengan realisasi sebesar Rp366.519.300 dan ketercapaian sebesar 66,64%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp183.472.800 atau setara 33,36%.



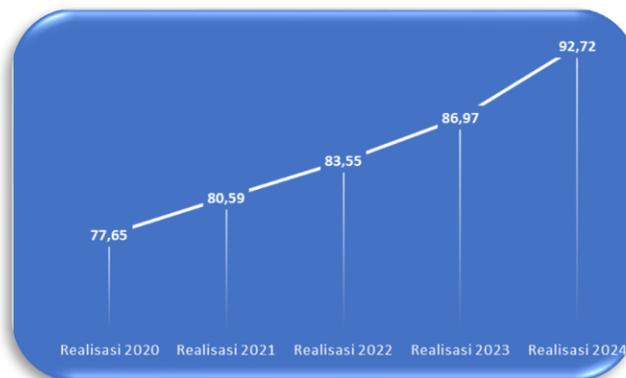
# SASARAN I (S1) :

## Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah

### S1.3 Indikator PDRB Perkapita ADHK



Pendahuluan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Indikator ini menunjukkan nilai rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per individu di suatu wilayah dengan mempertimbangkan inflasi dan perubahan harga dari waktu ke waktu. Kota Dumai sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlu dianalisis dalam konteks pencapaian target pembangunan daerah.



**Gambar III-6 Tren indikator PDRB Per Kapita ADHK (juta) Kota Dumai 2020-2024**

Perkembangan PDRB Per Kapita ADHK Kota Dumai Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan nilai PDRB per kapita ADHK Kota Dumai menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Dimana **Realisasi Tahun 2023** adalah sebesar 86,97 juta meningkat pada **Realisasi Tahun 2024 sebesar 92,72 juta** dengan **Capaian Tahun 2024** sebesar 100%. Kemudian bila melihat pada **Target RPJMD 2024** dengan rentang 90,83 – 91,45 juta, dimana realisasi tahun 2024 telah melebihi target tersebut dengan capaian 100%. Dari data di atas, terlihat bahwa Kota Dumai mengalami peningkatan PDRB per kapita ADHK dari tahun 2023 ke 2024.

Evaluasi terhadap Target RPJMD 2024 Pencapaian PDRB per kapita ADHK tahun 2024 yang mencapai 92,72 menunjukkan bahwa Kota Dumai berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabil, serta menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.

Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Pada data yang tersedia, nilai rata-rata nasional untuk PDRB per kapita ADHK sebesar 12,92 juta, bila dibandingkan dengan realisasi Kota Dumai tahun 2024 sebesar 92,72 juta. maka, pencapaian Kota Dumai dalam melampaui penacapaian nasional

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berada dalam tren positif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan PDRB Per Kapita ADHK Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDRB per kapita ADHK di Kota Dumai meliputi:

1. **Pertumbuhan Sektor Ekonomi Utama:** Performa sektor industri, perdagangan, dan jasa yang dominan di Kota Dumai memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
2. **Investasi dan Infrastruktur:** Peningkatan investasi serta pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi per kapita.
3. **Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja:** Kenaikan produktivitas masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita.
4. **Stabilitas Ekonomi Daerah:** Keberlanjutan kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dari pemerintah daerah turut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Kota Dumai telah berhasil mencapai dan bahkan melampaui target RPJMD 2024 dalam hal PDRB per kapita ADHK. Peningkatan nilai dari 92 pada tahun 2023 menjadi 92,72 pada tahun 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan terarah.

Perwujudan terhadap upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai yakni dengan membuka keran investasi. Pada tahun 2024 jumlah investor baru berskala nasional (PMDN/PMA) tercatat sebanyak 1 (satu) perusahaan telah berinvestasi di Kota Dumai dengan nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) sebesar Rp.10.224.124.528.217. Terdapat beberapa faktor yang **mendukung** pencapaian ini diantaranya, Iklim Investasi Daerah yang Kondusif, Infrastruktur Sarana dan prasaran di daerah kawasan

industri yang semakin membaik. Faktor keamanan daerah sangat kondusif untuk pembangunan sebuah investasi.

Namun, masih terdapat faktor **penghambat** yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal di Kota Dumai seperti Kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terhadap progres kegiatan penanaman modal di daerah. Masih kurangnya pelatihan dan Bimtek terkait pengawasan kegiatan penanaman modal bagi SDM yang ada. Oleh karena itu, perlu upaya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang masuk ke daerah. Serta Lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal aliran investasi yang masuk ke Kota Dumai.

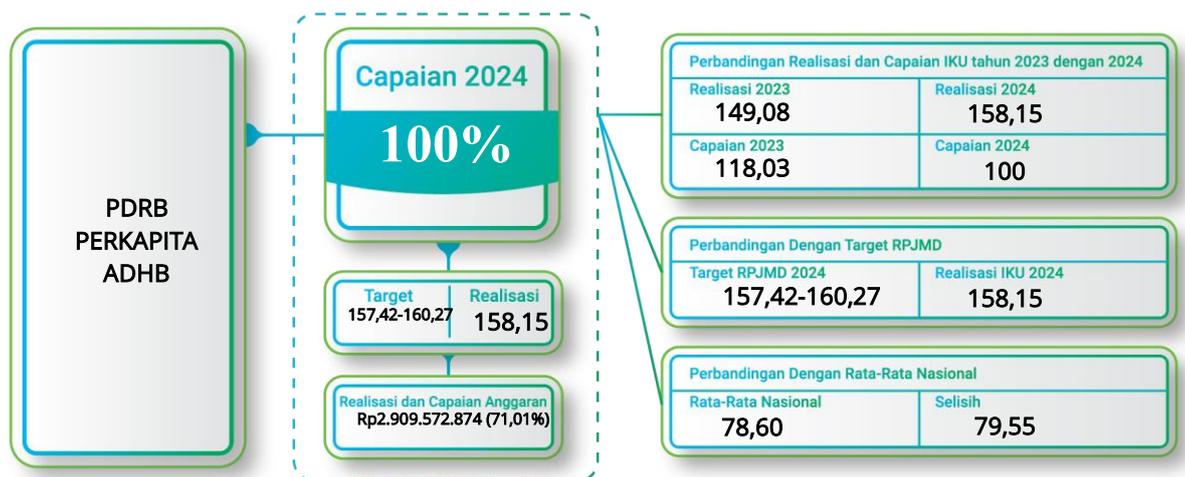
Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, dimana pagu anggaran sebesar Rp4.097.402.427 dengan realisasi sebesar Rp2.909.572.874 dan ketercapaian sebesar 71,01%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp1.187.829.553 atau setara dengan 71,01%



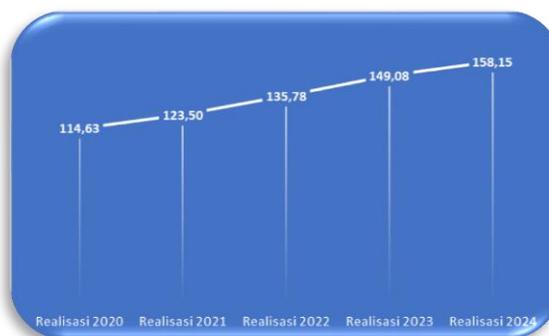
## SASARAN I (S1) :

Meningkatnya  
Perekonomian dan Daya  
Saing Daerah

### S1.4 Indikator PDRB Perkapita ADHB



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan mempertimbangkan faktor inflasi. Kota Dumai sebagai salah satu pusat ekonomi di Provinsi Riau mengalami dinamika pertumbuhan ekonomi yang perlu dianalisis untuk melihat pencapaian terhadap target pembangunan daerah.



Gambar III-7 Tren Indikator PDRB Perkapita ADHB (Juta) Kota Dumai 2020-2024

Perkembangan PDRB ADHB Kota Dumai Berdasarkan data yang tersedia, perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024, dimana **Realisasi Tahun 2023** mencapai 149,08 juta yang kemudian meningkat pada **Realisasi Tahun 2024** diangka 158,15 juta. Dari aspek capaian, **capaian Tahun 2023** berada pada persentase 118,03% dan **Capaian Tahun 2024** berada pada persentase 100%. Untuk perbandingan **Target RPJMD 2024** dengan besaran 157,42 – 160,27 juta, **Realisasi Indikator 2024** telah berada pada rentang tersebut dengan besaran 158,15 juta.

Dari data di atas, terlihat bahwa PDRB ADHK Kota Dumai mengalami peningkatan 9,07 juta dari tahun 2023 ke tahun 2024. Meskipun capaian target mengalami penurunan dari 118,03% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024, realisasi tahun 2024 berada dalam rentang target RPJMD, yaitu 157,42 – 160,27.

Evaluasi terhadap Target RPJMD 2024 Pencapaian PDRB ADHK tahun 2024 sebesar 158,15 menunjukkan bahwa Kota Dumai berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan.

Perbandingan dengan Rata-Rata Nasional Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada angka 78,60 juta, maka realisasi PDRB ADHK Kota Dumai berada jauh di atas rata-rata nasional, dengan selisih mencapai 79,55 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Dumai memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan PDRB ADHK** Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PDRB ADHK di Kota Dumai meliputi:

1. **Pertumbuhan Industri dan Perdagangan:** Kota Dumai sebagai daerah industri dan perdagangan utama di Riau mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

2. **Investasi dan Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. **Sumber Daya Alam dan Hilirisasi Industri:** Sektor minyak dan gas serta industri pengolahan berkontribusi besar terhadap perekonomian Kota Dumai.
4. **Stabilitas Kebijakan Ekonomi Daerah:** Keberlanjutan kebijakan ekonomi yang efektif dari pemerintah daerah turut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

Kota Dumai telah mencapai target RPJMD dalam hal PDRB ADHK. Peningkatan dari 149,08 pada tahun 2023 menjadi 158,15 pada tahun 2024 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

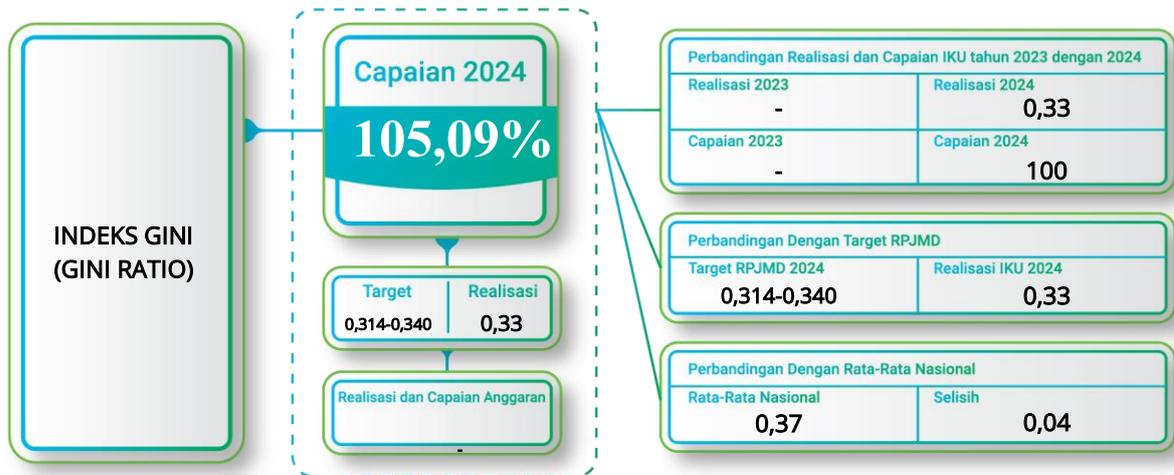
Pemerintah Kota Dumai juga berupaya untuk melaksanakan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting. Pada tahun 2025 melalui Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perdagangan telah dilakukan Operasi Pasar dan Pengawasan LPG 3 Kg di beberapa pangkalan LPG dan distributor bahan pokok dan barang penting lainnya di Kota Dumai. Faktor **pendukung** dalam pencapaian indikator ini adalah pengawasan terhadap komoditas barang yang didukung dengan melakukan pemantauan rencana terkait ketersediaan kebutuhan barang pokok dan harga ke distributor. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan **hambatan** berupa kurangnya ketersediaan komoditi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca dan angkutan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Dumai terus berupaya memberikan sosialisasi dan edukasi ke tingkat agen dan distributor serta melakukan pemantauan secara berkala.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengembangan Ekspor, program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi, Program pendidikan

dan latihan perkoperasian, rogram pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, Program perencanaan dan pembangunan industri, Program pengelolaan sistem informasi industri nasional, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan pagu anggaran sebesar Rp4.097.402.427 yang kemudian terealisasi sebesar Rp2.909.572.874 dimana ketercapaiannya sebesar 71,01%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp1.187.829.553 atau setara 28,99%.



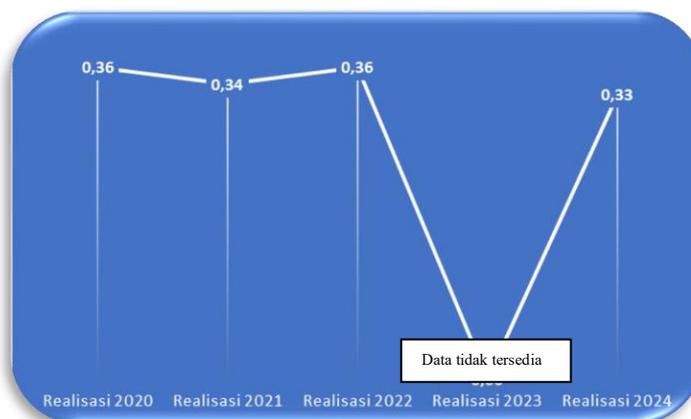
## SASARAN II (S2) : Meningkatnya Kesejahteraan



### Masyarakat Kota Dumai

#### S2.5 Indeks Gini

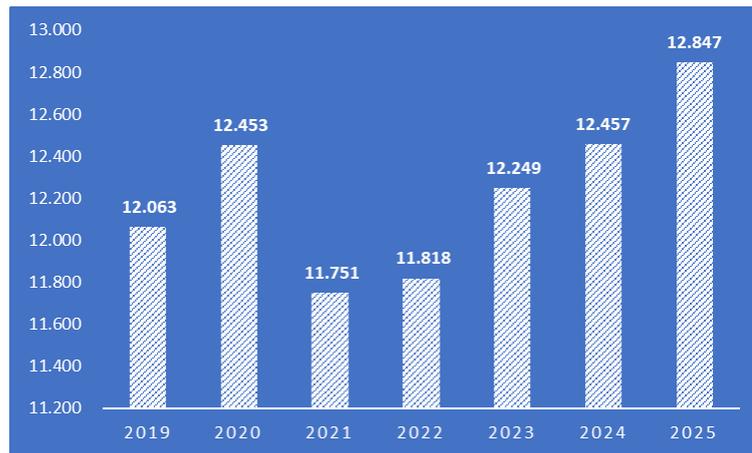
Pada indikator *Gini Ratio 1* Indeks gini Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 2022 dimana pada tahun tersebut indeks gini Kota Dumai berada pada 0,36 yang kemudian pada tahun 2024 berada pada angka 0,33. Perbandingan pada tahun 2023 tidak dapat dilakukan karena ketidaktersediaan data.



***Gambar III-8 Tren Indikator Indeks Gini Kota Dumai Tahun 2020-2024***

Capaian indikator indeks Gini tahun 2024 mencapai angka 105,09% artinya melebihi dari target yang telah ditetapkan. Begitu pula bila melihat ketercapaian dengan target RPJMD tahun 2024 yang berada pada kisaran 0,314-0,340 maka realisasi tahun 2024 ini telah berada dalam rentang tersebut dan tercapai 100%. Kemudian, bila melihat atau membandingkan dengan rata-rata nasional (indeks gini nasional) tahun 2024 yang berada pada angka 0,37, maka realisasi Kota Dumai masih berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih sebesar 0,04.

Indeks Gini merupakan salah satu indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah. Nilai indeks ini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata, artinya setiap individu memiliki pendapatan yang relatif sama. Sebaliknya, semakin mendekati angka 1, menunjukkan bahwa ketimpangan semakin tinggi, di mana hanya sebagian kecil penduduk yang menguasai sebagian besar pendapatan. Secara umum, nilai Indeks Gini di bawah 0,30 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah, antara 0,31 hingga 0,50 tergolong sedang, dan di atas 0,50 dianggap sebagai ketimpangan tinggi. Indeks Gini sering digunakan sebagai alat evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam melihat dampak kebijakan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Dumai pertahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Gambar III-9 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Kota Dumai**

Pada tahun 2018, pengeluaran per kapita tercatat sebesar 12.063 ribu rupiah, lalu mengalami peningkatan menjadi 12.453 ribu rupiah pada tahun 2019, menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup stabil. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 11.751 ribu rupiah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Memasuki tahun 2021, pengeluaran per kapita mengalami sedikit kenaikan menjadi 11.818 ribu rupiah, menandakan awal dari proses pemulihan ekonomi. Tren pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi 12.249 ribu rupiah, dan semakin membaik di 2023 dengan nilai mencapai 12.457 ribu rupiah.

Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita kembali meningkat menjadi 12.847 ribu rupiah, yang mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat serta peningkatan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan tajam akibat pandemi, pengeluaran per kapita di Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, mencerminkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut hingga tahun 2024.

Untuk meningkatkan pengeluaran per kapita masyarakat, Pemerintah Kota Dumai dapat mengambil berbagai langkah strategis yang terintegrasi dan

berkelanjutan. Salah satu upaya utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendukung pelaku UMKM, sektor ekonomi kreatif, serta memfasilitasi masuknya investasi di sektor industri dan pariwisata guna menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi prioritas, melalui penguatan akses pendidikan, pelatihan vokasi, dan program kewirausahaan yang mendorong kemandirian ekonomi, terutama bagi generasi muda dan perempuan. Selain itu, perluasan jaminan sosial dan bantuan ekonomi seperti subsidi, bantuan langsung tunai, serta perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan akan membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

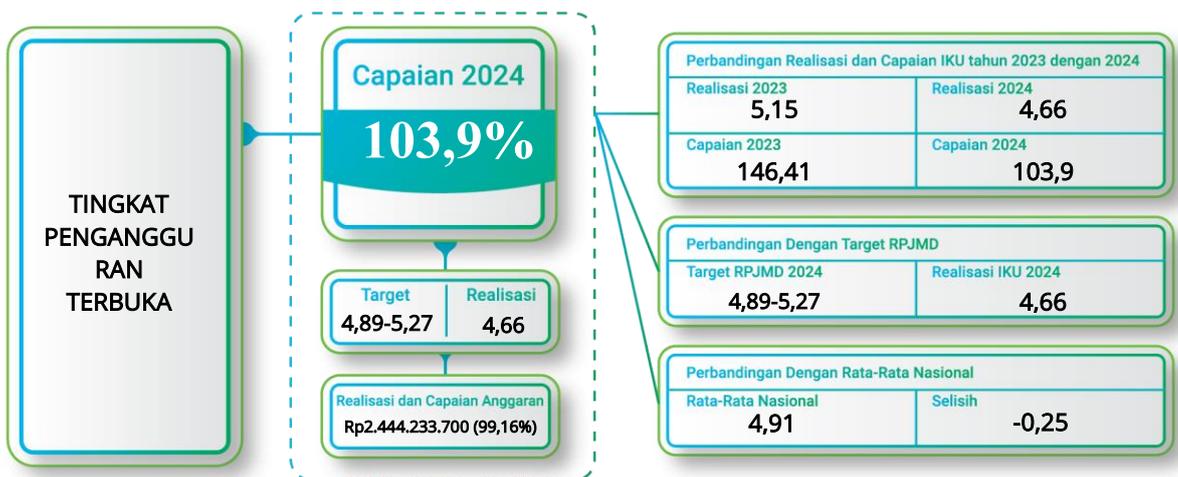
Pemerintah Kota Dumai terus berupaya untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar, akses air bersih, dan jaringan internet untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir yang berkelanjutan, dengan meningkatkan nilai tambah produk hasil laut dan pertanian, juga dapat menjadi sumber peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Terakhir, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, termasuk penyederhanaan perizinan usaha, penting dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pengeluaran per kapita masyarakat Kota Dumai dapat terus meningkat, mencerminkan perbaikan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



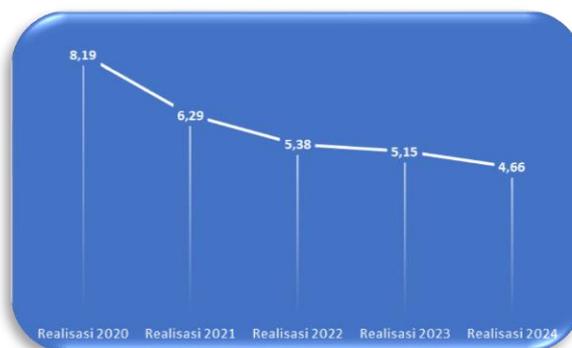
## SASARAN II (S2) :

### Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

#### S2.6 Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi TPT pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,15%, sedangkan pada tahun 2024 semakin menurun menjadi 4,66%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pasar tenaga kerja Kota Dumai, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat.



Gambar III-10 Tren Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Dumai 2020 - 2024

Capaian TPT pada tahun 2023 mencapai 146,41% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2024 capaian tersebut mengalami penurunan menjadi 103,9%. Realisasi TPT tahun 2024 berada melebihi rentang target RPJMD yang ditetapkan, yaitu 4,89% hingga 5,27%. Keberhasilan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai program peningkatan lapangan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, TPT Kota Dumai pada tahun 2024 berada di angka 4,66%, lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 4,91%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Dumai lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional, dengan selisih -0,25%. Keadaan ini dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kota Dumai cukup efektif dalam mengurangi pengangguran.

Beberapa faktor **pendukung** yang dapat berkontribusi terhadap penurunan TPT di Kota Dumai antara lain meningkatnya investasi di sektor industri dan perdagangan, program pelatihan tenaga kerja yang lebih efektif, serta adanya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berperan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja.

Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan, **hambatan** yang dihadapi Kota Dumai terutama dalam mempertahankan tren positif ini. Pemerintah daerah perlu terus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan akses pelatihan bagi pencari kerja, serta mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kota Dumai dapat terus mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Seperti, Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2024 mencapai 4,59%. Kemudian pemerintah Kota Dumai juga berupaya untuk meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mencapai 20,26%.

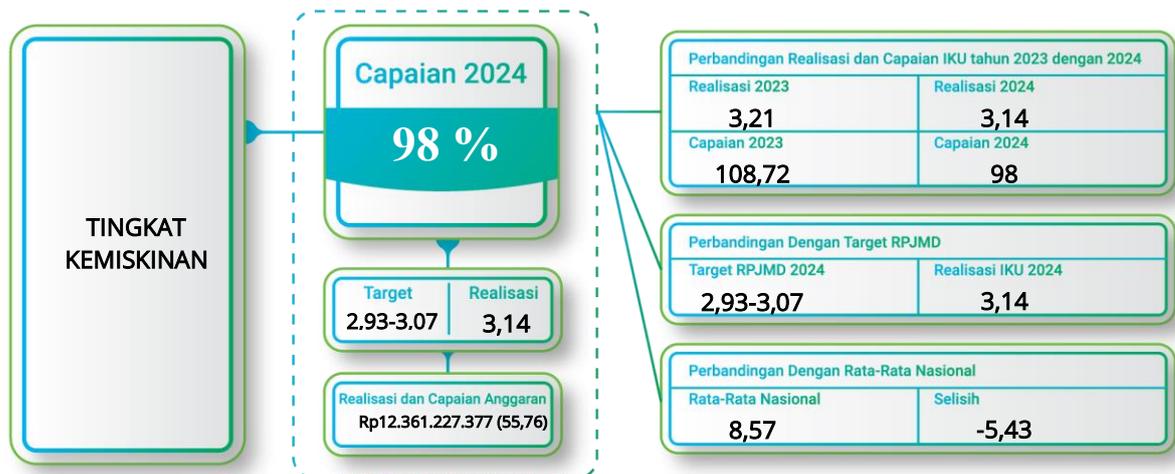
Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga terus berupaya untuk meminimalisir permasalahan – permasalahan ketenagakerjaan dengan perusahaannya melalui penanganan langsung dan advokasi terhadap Kasus Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2024 terdapat sebesar 40,62% Kasus ketenagakerjaan yang dapat diselesaikan. Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Program penempatan tenaga kerja dan Program hubungan industrial, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.465.025.400 yang terealisasi sebesar Rp2.444.233.700 dimana ketercapaiannya sebesar 99,16%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp20.791.700 atau setara 0,84%.



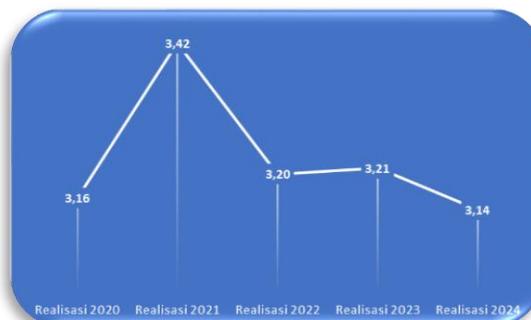
## SASARAN II (S2) :

### Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai

#### S2.7 Indikator Tingkat Kemiskinan



Tingkat kemiskinan di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi tingkat kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,21%, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 3,14%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Dumai, yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.



Gambar III-11 Tren Indikator Tingkat Kemiskinan Kota Dumai 2020-2024

Capaian tingkat kemiskinan pada tahun 2023 mencapai 108,72% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2024 capaian tersebut berada pada angka 98% dari target maksimal. Pencapaian tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dengan selisih 10,72%, angka capaian ini juga belum masuk dalam rentang target RPJMD yang ditetapkan, yaitu antara 2,93% hingga 3,07%. Namun, secara kinerja akhir Pemerintah Kota Dumai telah mampu menurunkan angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 3,21 menjadi 3,14 di tahun 2024. Keberhasilan ini mencerminkan adanya konsistensi dalam kebijakan pengurangan angka kemiskinan serta efektivitas intervensi sosial dan ekonomi yang diterapkan di Kota Dumai.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kemiskinan Kota Dumai pada tahun 2024 berada di angka 3,14%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 8,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Dumai lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata nasional, dengan selisih sebesar -5,43%. Keadaan ini dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan dan strategi yang diterapkan di Kota Dumai cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Dumai antara lain meningkatnya peluang kerja yang tersedia, program bantuan sosial yang lebih terarah, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam mempertahankan tren positif ini dan mencegah munculnya kembali kelompok rentan miskin. Pemerintah daerah perlu terus

mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memastikan efektivitas program bantuan sosial yang ada. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Kota Dumai dapat terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain penanganan terhadap tingkat kemiskinan, Pemerintah Kota Dumai juga berfokus pada permasalahan – permasalahan sosial lainnya di masyarakat seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Tahun 2024 populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis berjumlah 382 jiwa yang terdiri dari : penyandang disabilitas terlantar sebanyak 212 jiwa, anak terlantar 6 jiwa, lanjut usia terlantar 108 jiwa, dan Gelandangan Pengemis (OT) sebanyak 56 jiwa.

Disamping itu, penanganan permasalahan sosial lainnya juga terkait dengan penanganan korban bencana alam dan sosial di Kota Dumai. Dimana, populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat daerah kab/kota berjumlah 317 jiwa yaitu yang terdiri dari : korban bencana alam sebanyak 4 jiwa dan korban bencana sosial 313 jiwa.

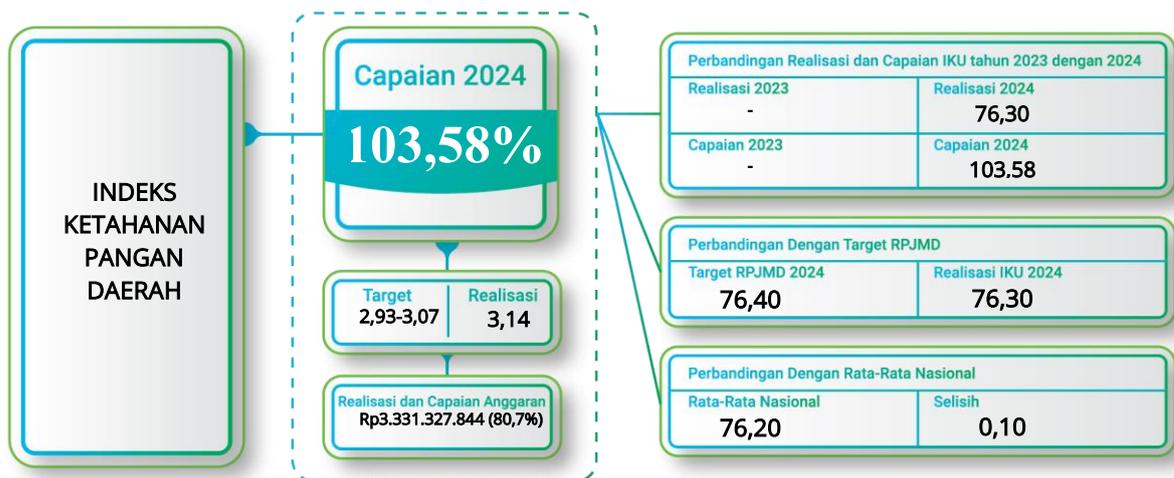
Beberapa **faktor keberhasilan** dalam pengentasan kemiskinan dan permasalahan sosial di Kota Dumai tidak terlepas dari beberapa faktor seperti, adanya koordinasi antar Instansi terkait, akses pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mudah dijangkau, dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Provinsi dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial, serta adanya jejaring /kemitraan antar OPD dan organisasi masyarakat dalam bentuk penanganan atas kebutuhan bagi korban bencana alam dan sosial.



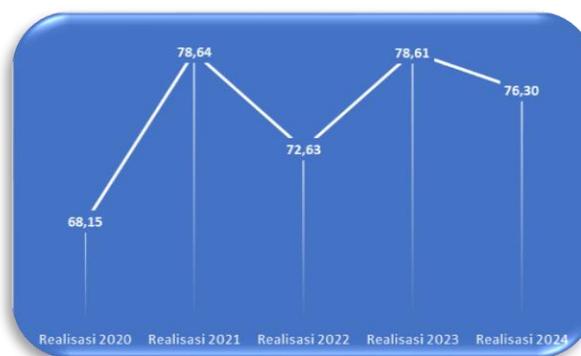
## SASARAN III (S3) :

Meningkatnya  
Ketahanan Pangan  
Daerah

### S3. 8 Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah



Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup positif. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks ketahanan pangan daerah Kota Dumai pada tahun 2024 mencapai angka 76,30. Angka ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kota Dumai relatif baik dan berada dalam kategori yang stabil.



Gambar III-12 Tren Indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Dumai 2020-2024

Capaian indeks ketahanan pangan pada tahun 2024 tercatat sebesar 103,58% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 76,40. Meskipun realisasi indikator berada sedikit di bawah target, pencapaian ini tetap mencerminkan upaya yang cukup berhasil dalam memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pangan bagi masyarakat Kota Dumai.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang berada pada angka 76,20, indeks ketahanan pangan Kota Dumai menunjukkan keunggulan sebesar 0,10 poin. Selisih ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan Kota Dumai berada di atas rata-rata nasional, meskipun dalam margin yang kecil. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa program dan kebijakan yang diterapkan di Kota Dumai dalam menjaga ketahanan pangan telah berjalan dengan baik.

Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, program penguatan sektor pertanian dan perikanan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap bahan pangan yang berkualitas. Selain itu, adanya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas lokal, juga dapat menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Dumai.

Meskipun capaian indeks ketahanan pangan Kota Dumai menunjukkan hasil yang positif, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di tengah dinamika ekonomi dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti diversifikasi sumber pangan, peningkatan efisiensi distribusi, serta penguatan program ketahanan pangan berbasis komunitas agar Kota Dumai dapat terus memastikan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakatnya.

Pemerintah Kota Dumai terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan berfokus kepada beberapa capain kinerja perangkat

daerah. Ketahanan pangan kemudian diukur dengan melihat aspek-aspek terkait, seperti angka kecukupan protein, pembinaan kelompok tani, produksi sektor pertanian dan perkebunan, populasi ternak serta produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya.

Untuk angka kecukupan protein pada Tahun 2024 Kota Dumai mampu meralisasikan capaian sebesar 62,30 gr/kap/hari. Bila dibandingkan dengan angka kecukupan protein nasional yang berada pada angka 57 Gr/Kap/Hari, angka kecukupan protein Kota Dumai telah melibihi capaian nasional. Faktor utama pendorong tingginya angka kecukupan protein di Kota Dumai dikarenakan ketersediaan pangan terutama sumber protein sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kota dumai.

Ketahanan pangan Kota Dumai juga dimaksimalkan dengan terus melakukan upaya pembinaan kelompok tani. Pada tahun 2024 kelompok tani yang mendapatkan pembinaan pemerintah Kota Dumai mencapai 186 kelompok. Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mengoptimalkan pembinaan dengan memberikan bantuan dari Pemerintah Kota Dumai pada sektor pertanian untuk Masyarakat berupa bantuan hibah barang sarana produksi pertanian dan bantuan hibah uang untuk pelatihan kelompok tani. Kedepannya perkembangan jumlah kelompok tani terus meningkat di Kota Dumai setiap tahunnya khususnya pada sektor tanaman pangan dan hortikultura, tidak lepas karena luas wilayah dan potensi pertanian yang masih cukup menjanjikan di Kota Dumai serta menjadi salah satu mata pencaharian utama Masyarakat.

Namun, pemerintah Kota Dumai juga menghadapi penghambat terkait eksistensi dari Kelompok tani terkadang pasang surut, tidak ada kekompakan diantara anggota kelompok, beberapa kelompok tani yang tidak senang jika dilakukan pembinaan oleh penyuluh pertanian dilapangan, serta adanya

kelompok tani hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, setelah itu tidak ada keberlangsungan ataupun keberlanjutan.

Untuk produksi pertanian dan perkebunan Kota Dumai tahun 2024 dengan jumlah produksi pertanian sebesar 25.318 ton dan 86.000 ton untuk produksi perkebunan. Terdapat beberapa **faktor pendukung** pencapaian jumlah produksi ini, salah satunya adalah Kota Dumai ditetapkan Kementerian Pertanian RI sebagai daerah sentra cabe merah dan bawang merah sehingga Kota Dumai mendapat bantuan dari APBD Provinsi maupun APBN. Serta bantuan dari dana APBN melalui BDPKKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) bertugas untuk melaksanakan peremajaan Kelapa sawit rakyat dan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan rakyat sangat membantu masyarakat.

Namun Sektor pertanian dan perkebunan juga memiliki **faktor penghambat** seperti adanya beberapa kelompok tani yang telah menerima bantuan tidak dapat mengembangkan hasil pertanian untuk modal tahun berikutnya, hanya mengharapkan terhadap bantuan dari pemerintah. Masih ada petani yang produktivitasnya rendah karena beberapa faktor diantaranya tidak menggunakan bibit unggul, lokasi perkebunan yang rawa dan lain sebagainya.

Pada aspek populasi ternak, Kota Dumai tahun 2024 terus mendorong untuk meningkatkan populasi ternak hingga mencapai 7.797 Satuan ternak pada tahun ini. Hal ini **didukung** dengan adanya inovasi Sapi Penerusan Manfaat (SAPAAT) yaitu inovasi dimana setiap kelompok tani penerima bantuan bibit ternak sapi harus meneruskan manfaat kepada kelompok lainnya, sehingga tanpa anggaran APBD peningkatan populasi tetap berjalan. Namun, terdapat kendala seperti maraknya wabah penyakit hewan khususnya ternak yang perlu diantisipasi secara cepat dan tepat.

Pada aspek produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya, Kota Dumai di tahun 2024 telah mencapai 3,40 Ton/Ha untuk produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya. Hal ini tidak terlepas dari adanya bantuan hibah barang dari Pemerintah Kota Dumai ke Kelompok Tani berupa sarana produksi pertanian baik tanaman pangan maupun hortikultura sehingga dapat membantu petani dalam peningkatan produktivitas hasil pertaniannya. Namun, terdapat **faktor penghambat** seperti pertanian di Kota Dumai khususnya tanaman pangan (padi) masih mengandalkan sawah tadah hujan / ladang sehingga untuk penanaman hanya satu kali dalam setahun;

Upaya tindak lanjut terus dilakukan pemerintah Kota Dumai, dengan melaksanakan beberapa tindakan preventif seperti :

- Melakukan operasi pasar / pasar murah / bazar produk pertanian dan bahan pangan utama atau sembako;
- Mesosialisasikan Pola konsumsi pangan masyarakat agar memenuhi unsur Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- Penyuluh pertanian dilapangan selalu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok tani di setiap wilayah binaannya
- Pembangunan Jalan usaha tani di sektor perkebunan perlu diprioritaskan agar mobilisasi hasil produksi perkebunan menjadi lebih mudah
- Pelatihan kepada kelompok penerima bantuan harus terus dilakukan agar bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik, serta
- Penyediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar produksi tanaman pangan kedepannya dapat meningkat

Beberapa prestasi yang telah didapatkan pemerintah Kota Dumai terkait ketahanan pangan pada tahun 2024 seperti:

**Tabel III-2 Prestasi Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai tahun 2024**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Penilaian Balai Penyuluhan Pertanian Terbaik (BPP Dumai Selatan) Kec.Dumai Selatan	Juara III	Provinsi Riau	Gubernur Riau
2	Penilaian Petani Berprestasi (Sdr.Wiyono) Kec.Dumai Selatan	Juara III	Provinsi Riau	Gubernur Riau
3	Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani (LKMA Bumiayu) Kec.Dumai Selatan	Juara I	Provinsi Riau	Gubernur Riau
4	Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Riau	Juara I	Provinsi Riau	Kepala Dinas PTPH Prov.Riau

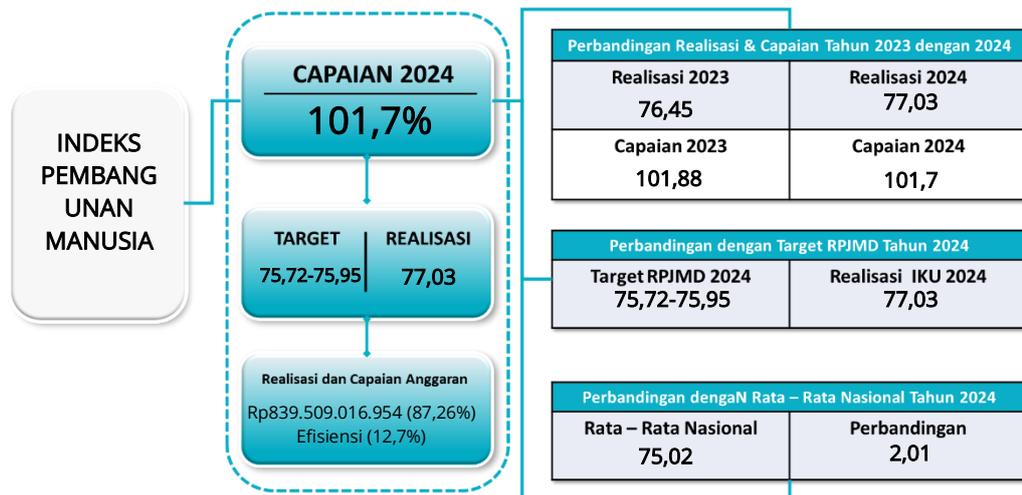


Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Penyuluhan Pertanian, Pengawasan Keamanan pangan, Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan pagu anggaran sebesar Rp760.000.000 yang terealisasi sebesar Rp617.340.000 dimana ketercapaiannya sebesar 81,23%. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp142.660.000 atau setara 18,77%.



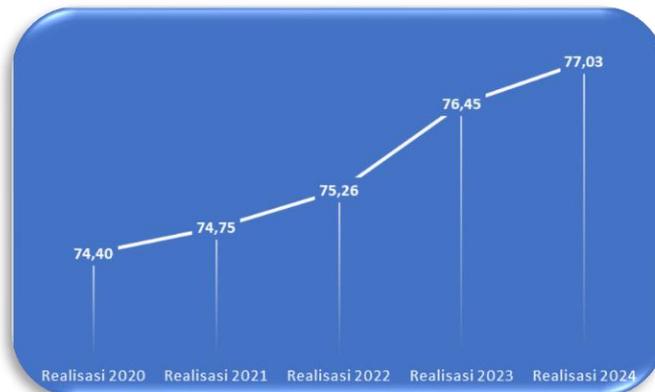
### 3.2 Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang produktif, memiliki daya saing tinggi, dan mencapai kesejahteraan yang merata. Adapun pelaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat dari indikator tujuan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III-13 Capaian Tujuan Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saingdan Sejahtera Tahun 2024

Dalam rangka mencapai tujuan Kota Dumai dalam mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera, maka indikator tujuan yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2024 indeks pembangunan manusia Kota Dumai terus mengalami peningkatan. Bila melihat pada Capaian indeks tahun 2024 adalah sebesar 101,7% dari target dalam rentang 75,72-75,95 terilisasi sebesar 77,03. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terjadi peningkatan dimana sebelumnya berada pada besaran 76,45. Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar III-14 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai 2020 - 2024**

Jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian indikator indeks pembangunan manusia Kota Dumai tahun 2024 berada dalam rentang target RPJMD yakni 75,72-75,95. Pada level nasional indeks pembangunan Kota Dumai melebihi capaian nasional yakni sebesar 2,01, dimana indeks pembangunan manusia berada pada 75,02. Terkait dengan realisasi anggaran, pada tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat Sejahtera. Realisasi anggaran untuk tujuan ini berada pada jumlah Rp 839.509.016.954 dari total pagu sebesar Rp962.041.030.557, dimana capaian anggaran sebesar 87,26% dimana efisiensi anggaran sebesar 12,74% dengan selisih Rp122.532.013.603.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga sasaran utama yang menjadi fokus dalam pembangunan daerah. Pertama, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kota Dumai melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, penguatan sektor usaha kecil dan menengah, serta optimalisasi potensi daerah. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, masyarakat diharapkan dapat menikmati peningkatan taraf hidup yang lebih baik.

Kedua, meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai, yang menjadi kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan

akses pendidikan yang merata, penguatan kurikulum berbasis keterampilan, serta dukungan terhadap inovasi dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

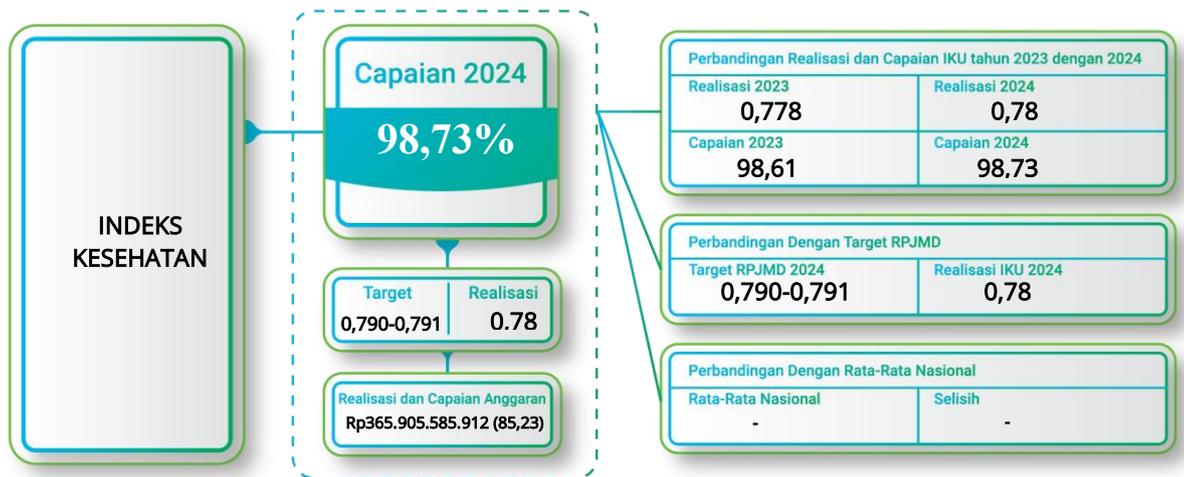
Ketiga, meningkatkan standar hidup layak masyarakat Kota Dumai, yang mencakup penyediaan infrastruktur dasar, layanan kesehatan yang optimal, serta peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki akses terhadap fasilitas publik yang memadai, sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat dan nyaman. Dengan mengintegrasikan ketiga sasaran tersebut dalam kebijakan pembangunan, diharapkan Kota Dumai dapat berkembang menjadi daerah yang lebih maju, dengan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera.



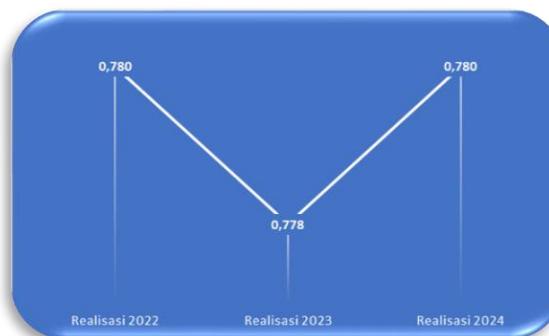
## SASARAN IV (S4)

### Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai

#### S4.9 Indikator Indeks Kesehatan



Indeks Kesehatan Kota Dumai mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks kesehatan pada tahun 2023 berada di angka 0,778, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,78. Meskipun kenaikan ini relatif kecil, hal ini tetap mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat Kota Dumai.



Gambar III-15 Tren Capaian Indeks Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2023

Capaian indeks kesehatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 98,61 dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024 capaian tersebut meningkat menjadi 98,73%. Namun, jika dibandingkan dengan target RPJMD 2024 yang berada pada kisaran 0,790 hingga 0,791, capaian ini masih sedikit di bawah ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam pencapaian indikator kesehatan di Kota Dumai.

Meskipun tidak terdapat data rata-rata nasional sebagai perbandingan, pencapaian indeks kesehatan Kota Dumai tetap menunjukkan tren yang positif. Hal ini dapat dikaitkan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat.

Beberapa **faktor pendukung** yang berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain peningkatan fasilitas layanan kesehatan, program vaksinasi dan imunisasi, serta kampanye kesehatan yang dilakukan secara masif. Selain itu, peran tenaga kesehatan yang profesional dan dukungan dari berbagai sektor dalam memperkuat sistem kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas indeks kesehatan di Kota Dumai.

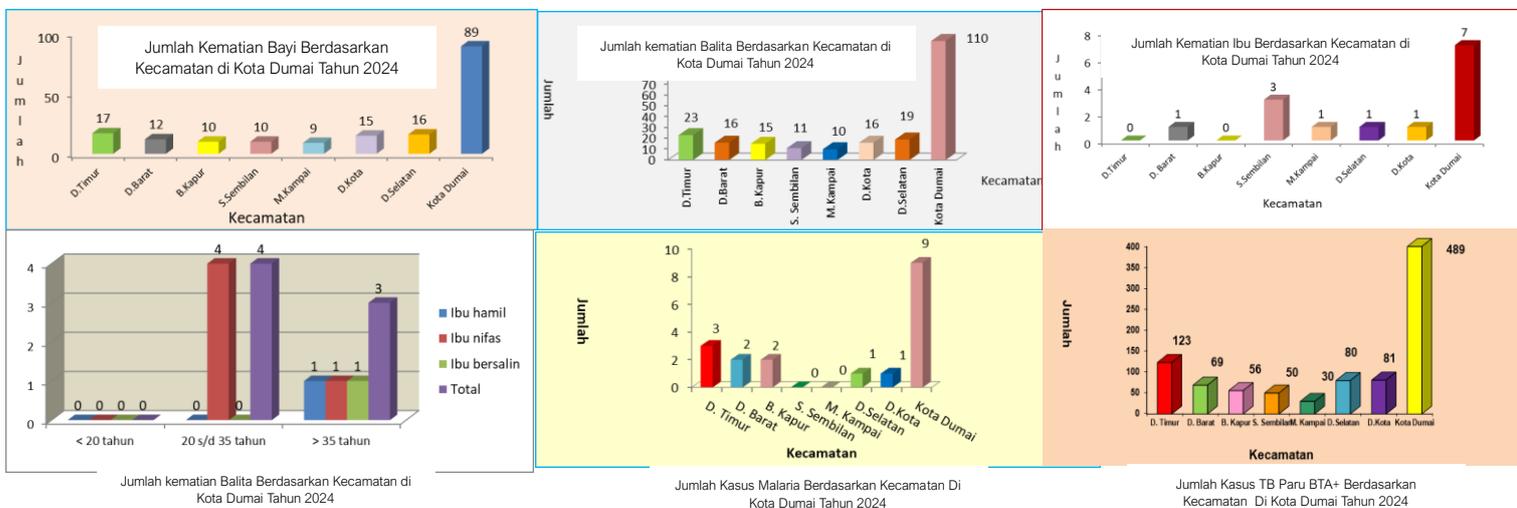
Namun demikian, terdapat **faktor penghambat** terutama dalam upaya mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Seperti peningkatan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, penguatan program promotif dan preventif, serta optimalisasi layanan kesehatan berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan indeks kesehatan Kota Dumai dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah direncanakan.

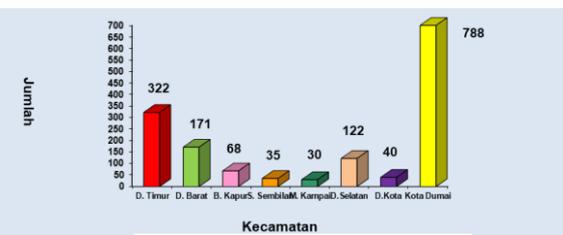
Pemerintah Kota Dumai yang ditunjukkan dengan indikator Indeks Kesehatan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0,790-0,791 realisasi sebesar 0,780 tercapai 98,73% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023

sebesar 0,778 atau tercapai sebesar 98,61%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,12 point.

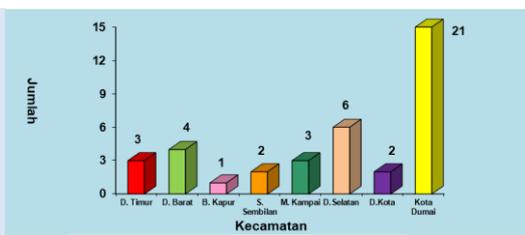
Pencapaian Sasaran Strategis dilihat juga dari meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 71,78 tahun. Bila dibandingkan dengan target AHH Kota Dumai pada tahun 2024 yakni sebesar 71,34-71,37 tahun, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sangat tinggi. Sedangkan untuk

Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2024 sebesar 99,39%. Bila dibandingkan dengan target Cakupan JKN pada tahun 2024 yakni sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 99,39% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat tinggi. Adapun konsisi eksisting kesahatan Kota Dumai dapat dilah pada gambar berikut :

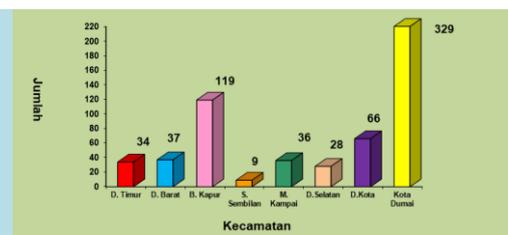




Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2024



Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun



Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Kesehatan mendapatkan beberapa prestasi tingkat nasional seperti :

**Tabel III-3 Prestasi dan Penghargaan Bidang Kesehatan Kota Dumai**

N o	Jenis Penghargaan	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Puskesmas Dumai Kota Sebagai Puskesmas Tempat Kaji Banding Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Terbanyak Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2	Kota Dumai Sebagai Kota Dengan Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
3	Puskesmas Sungai Sembilan Sebagai Puskesmas Terbaik Kategori Terpendek Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
4	Pranto Wati, S.P SMP Negeri 25 Kota Dumai Sebagai Penerima Apresiasi Guru Aktif Dalam Implementasi Perangkat Ajar Kesehatan Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
5	Misnawati Posyandu Mawar Kota Dumai Sebagai Kader Posyandu Berprestasi Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
6.	Kota Dumai Sebagai Pemerintah Daerah Dengan Kategori Utama Dalam Pencapaian Universal Health Coverage Tahun 2024	Nasional	Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana, Pemerintah Kota Dumai turut berperan aktif untuk meningkatkan Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR). Dimana pada tahun 2024 Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR) mencapai 70,3%. Selain itu, bila merujuk pada indeks pembangunan keluarga Kota Dumai tahun 2024 telah mencapai 66,08%.

Adapun **faktor pendorong** ketercapaian ini dikarenakan pemerintah Kota Dumai terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang ada di faskes atau PMB (Praktik Mandiri Bidang), ketersediaan dan keragaman metode kontrasepsi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu, serta mendorong perubahan norma sosial dan budaya dengan cara edukasi atau kampanye yang bertujuan mengubah persepsi negatif terhadap kontrasepsi.

Namun, masih ditemukan beberapa **faktor penghambat** seperti stigma terkait penggunaan kontrasepsi atau isu-isu sosial dan budaya yang melibatkan diskriminasi terhadap individu atau keluarga yang menggunakan kontrasepsi dapat membuat orang enggan mengakses atau mengungkapkan kebutuhan mereka, persepsi negatif terhadap efek samping tertentu atau mitos seputar kontrasepsi dapat mengurangi tingkat penerimaan serta ketidaksetujuan dari pasangan atau keluarga terhadap penggunaan kontrasepsi dapat menjadi hambatan serius.

Pemerintah Kota Dumai juga telah mendapatkan berbagai apresiasi dan penghargaan terkait bidang kesehatan khususnya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang terlihat pada tabel berikut :

**Tabel III-4 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Sekolah Lansia Ceria Kota Dumai	Sekolah Lansia di Bina Keluarga Lansia dengan Jumlah Mitra Terbanyak	Nasional	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Gubernur Riau
2	Kinerja Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023	Terbaik Ke-3	Provinsi	Kepala BKKBN
3	Kompetisi Dapur Sehat Atasi Stunting Kategori Kader Dashat	Terbaik III An. Elviana Kampung KB Bukit Timah	Nasional	Pj. Gubernur Riau
4	Rumah Dataku Keberkahan Bersama	Terbaik 1 RDK Kategori Konvensional dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke 31 tahun 2024	Provinsi	Kepala BKKBN
4	SSK PARIPURNA SMAN 1 Kota Dumai	Juara 1 Nasional lomba Sekolah Siaga kepedudukan Paripurna tahun 2024 kategori SMA/MA/Sederajat	Nasional	Pj. Gubernur Riau
5	SSK PARIPURNA SMAN 1 Kota Dumai	Terbaik 1 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Kategori SMA dalam Memperingati Harganas ke - 31	Provinsi	Pj. Gubernur Riau
6	SSK PARIPURNA SMPN BINSUS Kota Dumai	Terbaik 1 Sekolah Siaga Kependudukan Paripurna Kategori SMP/ Sederajat dalam Memperingati Harganas ke - 31	Provinsi	Kepala BKKBN
7	SSK PARIPURNA SMPN BINSUS Kota Dumai	Juara 2 Nasional lomba Sekolah Siaga kepedudukan Paripurna tahun 2024 kategori SMP/MTs/Sederajat	Nasional	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
8	Penilaian Penyuluh KB ASN Tingkat Propinsi Riau	Juara II PKB ASN	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
9	Penilaian PKB/PLKB Non ASN Terbaik Tingkat Propinsi Riau	Juara III PLKB Non ASN	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
10	Penilaian Kader IMP Tingkat Propinsi Riau	Juara III kader IMP	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
11	Penilaian Pasangan KB Lestari 20 Tahun Tingkat Propinsi Riau	Juara II KB Lestari	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
12	Apresiasi BKR dan PIK R Percontohan Segmentasi Usia (Berani, Beraksi dan Berkolaborasi Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024	Terbaik PIK R Percontohan Segmentasi Berani	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
13	PIK-R Percontohan Segmentasi Berani Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024	PIK R Best SMPN Binsus Kota Dumai	Provinsi	Pj. Gubernur Riau
14	Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreatifitas Remaja Provinsi Riau Tahun 2024	Juara I Putri Duta Genre Provinsi Riau 2024	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
15	Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreatifitas Remaja Provinsi Riau Tahun 2024	Juara III Putra Duta Genre Provinsi Riau 2024	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau
16	Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2024 Region 3	Terbaik I Kelompok KB Pria Bahagia	Regional	Kepala BKKBN
17	Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2024 Nasional	Terbaik 2 Kelompok KB Pria Bahagia	Nasional	Kepala BKKBN
18	Lomba Kelompok KB Pria Tahun 2024 Provinsi	Terbaik 2 Kelompok KB Pria Bahagia	Provinsi	Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Riau



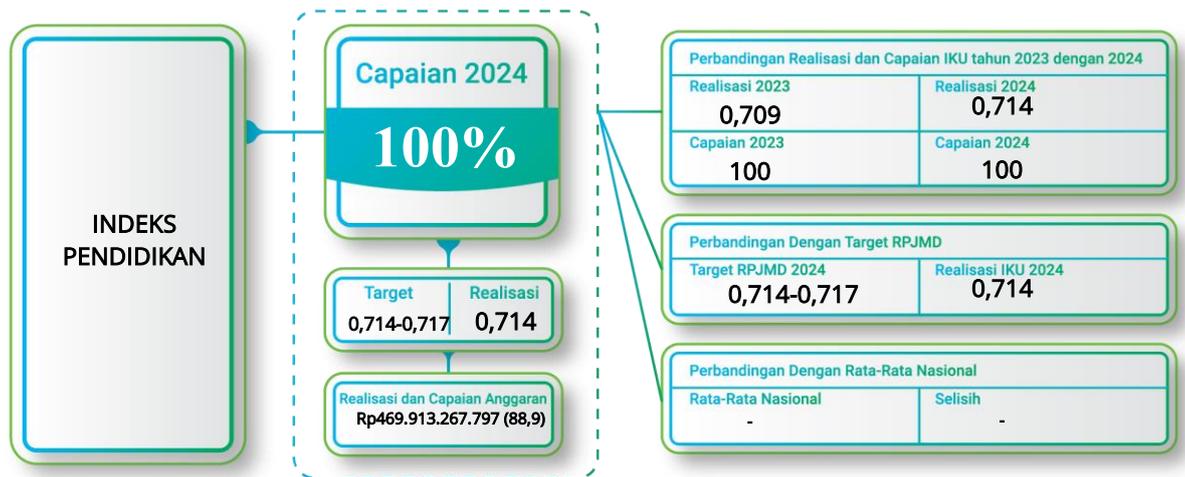
Untuk mendukung pencapaian indikator kesehatan, maka program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, Program sediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan minuman, Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp429.290.610.402, dimana yang terealisasi sebesar Rp365.905.585.912 dengan ketercapaiannya sebesar 85,2%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp63.385.024.490 atau setara 14,7%



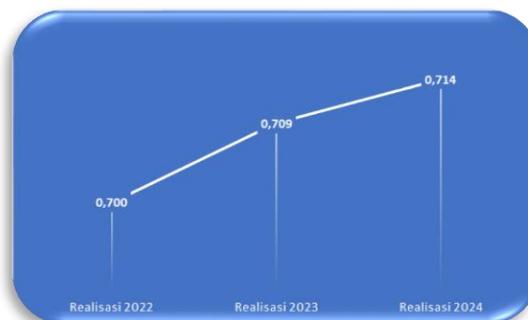
## SASARAN V (S5) :

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai

### S5.10 Indikator Indeks Pendidikan



Indeks Pendidikan Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks pendidikan pada tahun 2023 berada di angka 0,709, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,714. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan di Kota Dumai, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil.



Gambar III-16 Tren Indikator Indeks Pendidikan Kota Dumai 2022-2024

Capaian indeks pendidikan pada tahun 2023 tercatat sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan, begitu pula pada tahun 2024, yang juga mencapai 100%. Target RPJMD 2024 berada dalam kisaran 0,714 hingga 0,717, yang berarti realisasi indikator pada tahun 2024 sudah berada dalam rentang yang diharapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Kota Dumai dalam mencapai target pembangunan pendidikan yang telah direncanakan.

Meskipun tidak terdapat data rata-rata nasional sebagai perbandingan, pencapaian indeks pendidikan Kota Dumai tetap menunjukkan tren yang positif. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta program bantuan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa faktor utama yang **mendukung** terhadap peningkatan indeks pendidikan ini antara lain kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, peningkatan kualitas kurikulum, serta dukungan terhadap pendidikan berbasis teknologi. Selain itu, program beasiswa dan pelatihan bagi guru juga berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kota Dumai.

Namun, **faktor penghambat** tetap ada dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan indeks pendidikan di masa depan. Beberapa hambatan tersebut meliputi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, serta tantangan dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan investasi di sektor pendidikan, penguatan program pelatihan bagi tenaga pendidik, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk

memastikan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Dengan langkah-langkah yang tepat dan strategi yang efektif, diharapkan indeks pendidikan Kota Dumai dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Kondisi faktual pendidikan di Kota Dumai dapat dilihat dari, Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi sebesar 93,69, tercapai 93,69% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 95,81 atau tercapai sebesar 96,50%, maka capaian tahun 2024 menurun 2,81%.

Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A/SDLB menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi sebesar 86,68, tercapai 86,68% atau bernilai kinerja **tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 88,04 atau tercapai sebesar 94,89%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 8,21%. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi sebesar 79,08, tercapai 79,08% atau bernilai kinerja **tinggi**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 84,50 atau tercapai sebesar 107,81%, maka capaian tahun 2024 menurun 28,73%. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B/SMPLB menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi sebesar 70,45, tercapai 70,45% atau bernilai kinerja **sedang**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 71,24 atau tercapai sebesar 106,87%, maka capaian tahun 2024 menurun/meningkat sebesar 36,42%.

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (Pendidikan Sekolah Dasar) adalah 100. Realisasi yang diperoleh sebesar 98,65, tercapai 98,65% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia

13-15 Tahun (Pendidikan Sekolah Menengah Pertama) adalah 100. Realisasi yang diperoleh sebesar 98,65, tercapai 98,65% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**.

Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2024 melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan apresiasi dan penghargaan baik tingkat regional maupun nasional, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III-5 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pendidikan**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam Penghargaan	Penganugerahaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024)	Nasional	Ombudsman RI
2	Sertifikat	Partisipasi dan Dukungannya dalam Kegiatan "Revitalisasi Bahasa Daerah, Bertajuk Festival Tunas Bahasa Ibu Tahun 2024"	Provinsi Riau	Balai Bahasa Provinsi Riau
3	Piagam Penghargaan	Peran serta dan partisipasi aktif Berbagi Cerita Baik Implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam rangka Transformasi satuan Pendidikan	Provinsi Riau	BPMP Provinsi Riau
4	Piagam Penghargaan	Berperan Aktif dalam mendukung Kegiatan SAT LANTAS Polres Dumai dalam Rangka mendukung kegiatan pembinaan Polisi Cilik di tingkat SD se-Kota Dumai Tahun 2024	Kota Dumai	Kepolisian Resor Dumai
5	Piagam Penghargaan	Dukungan Kegiatan HUT TNI ke-79 Tahun 2024	Kota Dumai	Komandan Kodim 0320/Dumai
6	Piagam Penghargaan	Panitia Pelaksana Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024	Nasional	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
7	Piagam Penghargaan	Predikat Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Kota Dumai	Wali Kota Dumai
8	Piagam Penghargaan	Penerima Anugerah Utama-Jambore GTK Hebat 2024 Provinsi Riau	Provinsi Riau	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan



**Disdikbud Dumai Juara 3**  
**Dwi Ina Yanti, S.Pd** Juara 1 (Guru Inovatif SMP)  
**Yuni Jayanti, S.Pd., Gr** Juara 1 (Guru Inovatif PPG Daljab)  
**Dewi Nurmalia, S.Pd., Gr** Juara 2 (Guru Inovatif SD)  
**Rudi Fajrin Amin, S.Pd., Gr** Juara 2 (Guru Inovatif SMP)  
**Rudi Candra, S.Pd., M.Pd** Juara 2 (Kepsek Inovatif SMP)

**Diana Wahyuni, S.Pd., M.Pd** Juara 2 (Kepsek Inovatif SD)  
**Nurmasita S., S.Pd** Juara 3 (Guru Dedikatif SMP)  
**Fera Andriani, S.Pd** Juara 3 (Guru Inovatif PPG Daljab)  
**Fauziah, S.Pd.AUD** Juara 3 (Guru Dedikatif TK)  
**Dr. Neni Suharni Sofyan, S.Ag, M.Pd** Juara 3 (Pengawas Dikdas Inovatif)



**PREDIKAT KEPATUHAN PENYELenggaraAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024**  
**PERINGKAT III PENGANUGERAHAN PREDIKAT KEPATUHAN PENYELenggaraAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024**



**Juara**  
**"Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Prov. Riau Tahun 2024"**  
**Balai Bahasa Riau**



Diskominfotiknas Kota Dumai



Bentuk lain dalam optimalisasi bidang pendidikan juga dilakukan Pemerintah Kota Dumai dengan memastikan sarana pendukung pendidikan seperti pendidikan tersedia dengan baik dan sesuai dengan SNP (Standar Nasional Perpustakaan). Dimana pada tahun 2024 Persentase Perpustakaan yang sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) menunjukkan besaran 60%.

Hal ini tidak lepas dari Kota Dumai telah memiliki asesor guna penilaian Akreditasi Perpustakaan yang ada di Kota Dumai.

Kemudian, Dari aspek literasi Kota Dumai di tahun 2024, pada Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat telah mencapai poin 60,32%. Pencapaian ini tidak lepas dari upaya pembinaan dan peningkatan kinerja bidang perpustakaan dan kearsipan. Sehingga, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Dumai mendapatkan penghargaan atas pencapaian Perpustakaan Terakreditasi terbanyak se Provinsi Riau.

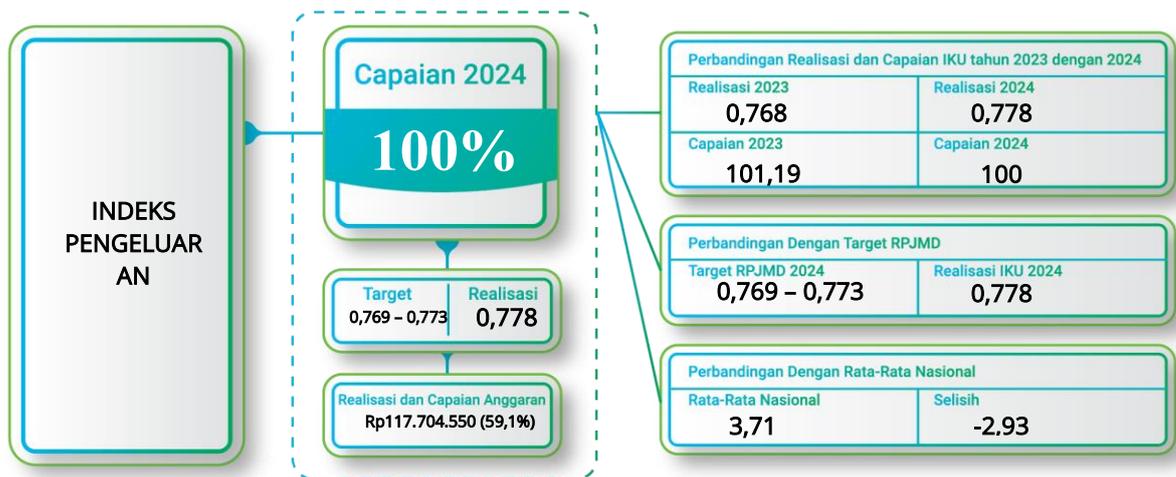
Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pembinaan Perpustakaan, Pengelolaan Arsip, Program perlindungan perempuan, program perlindungan khusus anak, program pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan, Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualitas. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp528.042.525.103, dimana yang terealisasi sebesar Rp469.913.267.797 dengan ketercapaiannya sebesar 88,9%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp58.129.257.306 atau setara 11%.



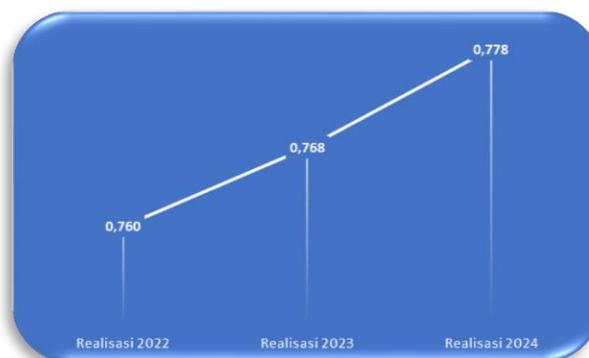
## SASARAN VI (S6) :

Meningkatnya Standard  
Hidup Layak Masyarakat  
Kota Dumai

### S6.11 Indikator Indeks Pengeluaran



Indeks Pengeluaran Kota Dumai menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks pengeluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 0,768, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,778. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai.



Gambar III-17 Tren Indikator Indeks Pengeluaran Kota Dumai 2022-2023

Capaian indeks pengeluaran pada tahun 2023 dan 2024 sama-sama mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan. Bahkan, realisasi tahun 2024 sebesar 0,778 melebihi target RPJMD 2024 yang berada dalam rentang 0,769 hingga 0,773. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pengeluaran rumah tangga.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional yang tercatat sebesar 3,71, realisasi indeks pengeluaran Kota Dumai masih berada di bawah standar nasional dengan selisih sebesar -2,93. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam skala lokal, masih terdapat kesenjangan dengan rata-rata nasional yang perlu menjadi perhatian.

Beberapa **faktor yang mendukung** terhadap capaian indeks pengeluaran ini antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi produktif. Program bantuan sosial, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi di sektor industri dan perdagangan juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan bahan pokok masyarakat, Kota Dumai berupaya untuk memastikan Persentase Pelaksanaan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting mencapai 100% di tahun 2024. Hal ini dilakukan dengan Melakukan pemantauan rencana terkait ketersediaan kebutuhan barang pokok dan harga ke distributor. Pemerintah Kota Dumai juga melakukan pengawasan terhadap Distribusi Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting yang mencakup 7 kecamatan Kota Dumai.

Namun, beberapa **penghambat** yang masih dihadapi berupa masih kurangnya ketersediaan komoditi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca dan angkutan serta masih ditemukan agen dan beberapa

pangkalan LPG 3 Kg tidak memberikan laporan dan menjual diatas HET 3 Kg, penyaluran distribusi yang terlambat akibat cuaca.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp198.889.000, dimana yang terealisasi sebesar Rp117.704.550 dengan ketercapaiannya sebesar 59,1%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp81.184.450 atau setara 40,8%.



## SASARAN VI (S6) :

### Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai

#### S6.12 Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)



Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan di Kota Dumai menunjukkan capaian signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indikator pada tahun 2024 mencapai 100%, yang berarti seluruh objek pemajuan kebudayaan Melayu telah mendapatkan perlindungan. Capaian ini mencerminkan adanya perhatian yang tinggi dari pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya Melayu.

Pada tahun 2024, capaian persentase perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu mencapai 108,28% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu sebesar 92,35%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melampaui ekspektasi yang telah ditentukan. Kinerja yang baik ini dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pelestarian budaya lokal, seperti revitalisasi

situs budaya, dukungan terhadap komunitas budaya, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan seni dan budaya.

Untuk perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya tidak tersedia dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru dalam RPJMD Perubahan Kota Dumai. Meskipun data realisasi pada tahun 2023 tidak tersedia, keberhasilan di tahun 2024 menjadi indikasi positif bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam menjaga warisan budaya Melayu. Selain itu, capaian ini juga dapat berkontribusi terhadap penguatan identitas budaya daerah serta meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya di Kota Dumai.

Dalam konteks perbandingan dengan skala nasional, data mengenai nilai rata-rata nasional tidak tersedia. Namun, dengan capaian 100% pada tahun 2024, Kota Dumai dapat dijadikan sebagai contoh keberhasilan dalam perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu. Upaya ini dapat terus ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas budaya, serta sektor swasta dalam mendukung kegiatan pelestarian budaya yang berkelanjutan.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, program edukasi dan kesadaran budaya perlu terus diperkuat agar keberlanjutan perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu tetap terjaga di masa mendatang.

Persentase target objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Perlindungan adalah 92,35. Realisasi yang diperoleh sebesar 100, tercapai 108,28% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pengembangan adalah 41,33%. Realisasi yang diperoleh sebesar 39,28%, tercapai 95,04% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan untuk indikator

Persentase Penerapan Unsur Kebudayaan Melayu pada Satuan Pendidikan adalah 80%. Realisasi yang diperoleh sebesar 80%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **sangat tinggi**.

Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai **faktor pendukung**, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan anggaran, serta keterlibatan aktif lembaga adat dan komunitas budaya dalam melestarikan warisan budaya Melayu. Selain itu, program-program pelatihan dan pendidikan budaya yang ditujukan kepada generasi muda turut berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu di Kota Dumai.

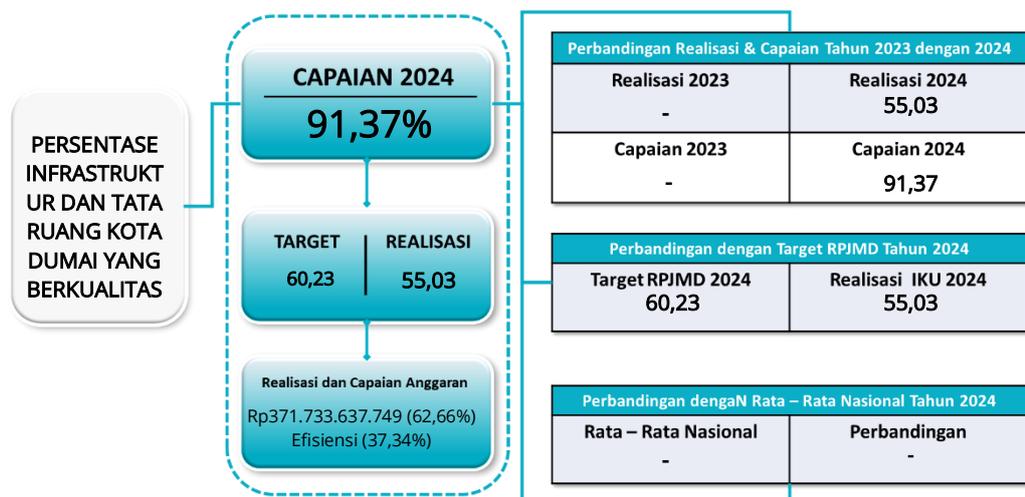
Masih terdapat beberapa **faktor penghambat** yang mempengaruhi upaya ini. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari sebagian masyarakat, terutama generasi muda, dalam pelestarian budaya Melayu. Banyak di antaranya yang lebih tertarik pada budaya luar dan cenderung mengabaikan warisan budaya lokal

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program dan program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp4.509.006.052, dimana yang terealisasi sebesar Rp3.572.458.695 dengan ketercapaiannya sebesar 79,2%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp936.547.357 atau setara 20,7%.



### 3.3 Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk membangun infrastruktur dan tata ruang yang berkualitas serta berwawasan lingkungan guna mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan. Adapun pelaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat dari indikator tujuan yang dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar III-18 Capaian Tujuan Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2024**

Dalam rangka mencapai tujuan Kota Dumai dalam mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan, maka indikator tujuan yang digunakan adalah persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang berkualitas. Pada tahun 2024 persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang Berkualitas, memiliki capaian berada pada angka 91,3% dari target sebesar 60,23 dengan realisasi berada pada angka 55,03.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan tahun – tahun sebelumnya indikator tujuan ini tidak dapat dibandingkan karena indikator sebelumnya adalah indeks infrastruktur daerah. Sedangkan, untuk indikator

pada tahun 2024 menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Dumai yakni menggunakan indikator persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang Berkualitas. Jika dilihat dari capaian indikator persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang Berkualitas tahun 2024 ini masih berada dibawah target RPJMD yakni 60,23. Terkait dengan realisasi anggaran, pada tujuan Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2024. Realisasi anggaran untuk tujuan ini berada pada jumlah Rp371.733.637.749 dari total pagu sebesar Rp593.289.046.436, dimana capaian anggaran sebesar 62,66% dimana efisiensi anggaran sebesar 37,34% dengan selisih Rp221.555.408.687.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga sasaran utama yang menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur dan ruang kota. Pertama, meningkatkan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur dasar yang mencakup jaringan transportasi, sistem drainase, serta sarana dan prasarana publik lainnya. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kota Dumai diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kedua, mewujudkan tata ruang kota yang tertata dengan baik, seimbang, dan mendukung pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan melalui perencanaan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, mitigasi bencana, serta optimalisasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik dan ekonomi.

Ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Dumai melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, pengurangan pencemaran, serta penguatan program penghijauan dan konservasi lingkungan. Pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi

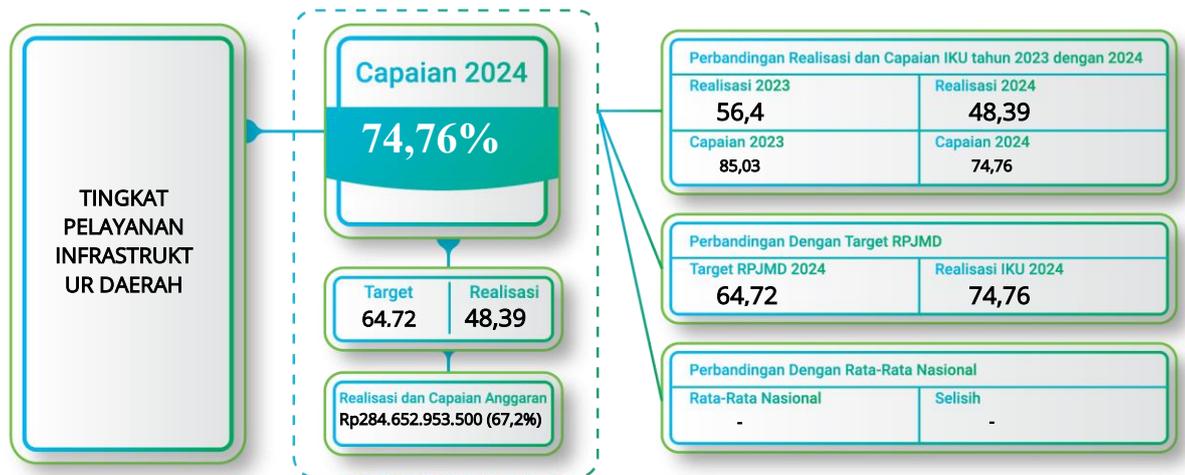
masyarakat dengan menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis keberlanjutan.

Dengan mengintegrasikan ketiga sasaran tersebut dalam kebijakan pembangunan daerah, diharapkan Kota Dumai dapat berkembang menjadi kota yang modern, memiliki infrastruktur yang andal, serta tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

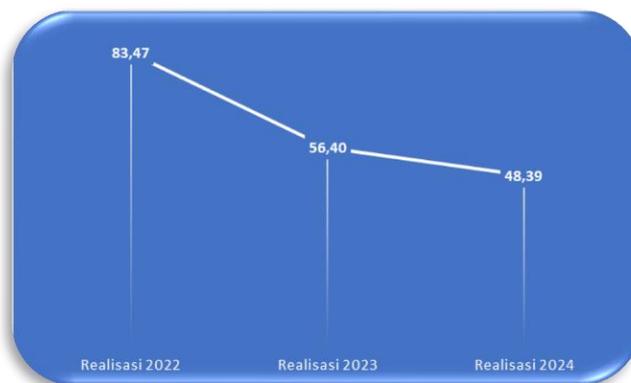


## SASARAN VII (S7) : Meningkatkan Infrastruktur Kota

### S7.13 Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah



Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah di Kota Dumai mengalami penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi tingkat pelayanan infrastruktur pada tahun 2023 mencapai 56,4, sementara pada tahun 2024 turun menjadi 48,39. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur di Kota Dumai.



Gambar III-19 Tren Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah Kota Dumai 2022-2024

Dalam hal capaian, tahun 2023 mencatat angka 85,03% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 74,76%. Target RPJMD untuk tahun 2024 adalah sebesar 64,72, yang berarti meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan infrastruktur, Kota Dumai tetap berusaha memenuhi standar pelayanan yang telah direncanakan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan tingkat pelayanan infrastruktur ini meliputi keterbatasan anggaran, peningkatan kebutuhan infrastruktur akibat pertumbuhan populasi, serta potensi dampak dari kondisi lingkungan dan cuaca. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan strategis yang berfokus pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan.

Dalam konteks nasional, tidak terdapat data pembanding mengenai rata-rata tingkat pelayanan infrastruktur. Namun, dengan capaian 74,76% pada tahun 2024, Kota Dumai menunjukkan komitmen dalam menjaga standar infrastruktur di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kembali tingkat pelayanan infrastruktur di tahun-tahun mendatang.

Sebagai langkah ke depan, pemerintah Kota Dumai perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor penyebab penurunan ini. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas PUPR bertanggung jawab terhadap infrastruktur Kota Dumai. Oleh karena itu terus dioptimalkan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai. Namun, bila melihat persentase Kemantapan Jalan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 61,41% realisasi sebesar 57,58%, tercapai 93,76% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 53,09% atau tercapai sebesar 98,09%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 4,33%. Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 15% realisasi sebesar 15% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0% maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 100%.

Pada tahun 2024, **faktor pendukung** berperan dalam meningkatkan pelayanan infrastruktur di Kota Dumai adalah komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan infrastruktur merata di seluruh daerah Kota Dumai. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat **faktor penghambat** dalam kemantapan jalan diakibatkan oleh belum Sesuainya SHP dan *Google Map* serta terjadinya Pancaroba Cuaca dan Air Pasang Air Laut. Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mengoptimalkan perbaikan infrastruktur yang ada dengan meningkatkan ketersediaan alat dan tenaga kerja yang memadai.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan sumber daya air (sda), program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan jasa konstruksi, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi

Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp423.560.087.510, dimana yang terealisasi sebesar Rp284.652.953.500 dengan ketercapaiannya sebesar 67,20%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp138.907.134.010 atau setara 32,80%.

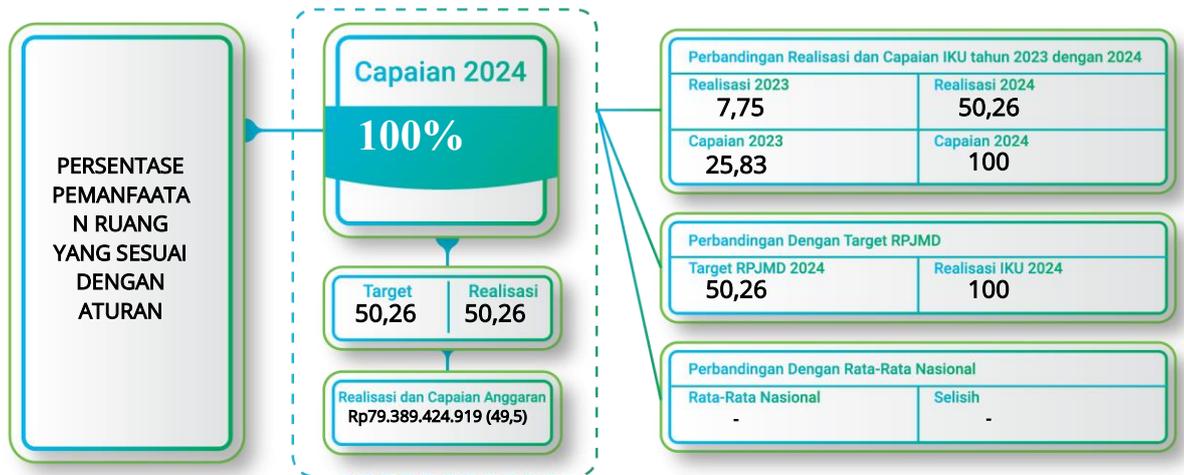
---

## SASARAN VIII (S8) :



## Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten

### S9.14 Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan



Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Aturan di Kota Dumai mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi pemanfaatan ruang pada tahun 2023 hanya mencapai 7,75%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat tajam menjadi 50,26%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang lebih optimal dalam menegakkan aturan tata ruang di Kota Dumai.



**Gambar III-20 Tren Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan Kota Dumai 2023-2024**

Dari segi capaian, tahun 2023 hanya mencapai 25,83% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian tahun 2024 berhasil mencapai 100%. Target RPJMD untuk tahun 2024 sebesar 50,26% telah tercapai sepenuhnya, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan dan implementasi dalam mengelola pemanfaatan ruang di Kota Dumai.

Peningkatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penguatan regulasi tata ruang, peningkatan pengawasan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum juga berkontribusi terhadap pencapaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun tidak terdapat data pembanding nasional dalam konteks ini, keberhasilan Kota Dumai dalam mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola tata ruang secara berkelanjutan. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi pembangunan yang lebih tertata dan berkelanjutan di wilayah Kota Dumai.

Sebagai langkah ke depan, penting bagi pemerintah Kota Dumai untuk terus menjaga dan meningkatkan pengelolaan tata ruang, memastikan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), serta memperkuat koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik. Keberlanjutan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan akan menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan kota yang lebih terencana dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Pada tahun 2024 jika melihat persentase kesesuaian tata ruang yang berada diangka

50,26%, menunjukkan bahwa pemerintah kota terus meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan peruntukannya.

Selain itu pemanfaatan ruang di Kota Dumai juga berfokus pada penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik atau pelayanan penduduk yang berakses sanitasi. Dimana tahun 2024 sebesar 84,40% Penduduk yang telah Berakses Sanitasi. Dalam Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya pada tahun 2024 pemerintah Kota Dumai sudah mencapai angka 50,26%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bangunan dan ruang di Kota Dumai sudah sesuai dengan peruntukannya.

Bila melihat pada kondisi *existing* yang terjadi, **faktor pendorong** pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan ini disebabkan oleh pemerintah Kota Dumai terus berupaya mengembangkan jaringan perpipaan. Untuk aspek sanitasi pemerintah Kota Dumai terus meningkatkan penambahan pelayanan akses sanitasi di area berisiko sanitasi berdasarkan dokumen SSK. Selain itu, untuk pemanfaatan gedung/ bangunan sesuai peruntukannya salah satu faktor pendukung utama adalah karena kejelasan tata ruang Kota Dumai serta adanya kejelasan status tanah lokasi pembangunan gedung kantor.

Namun, dalam implementasinya pemerintah Kota Dumai masih **menemukan penghambat** seperti penerima manfaat pelayanan akses sanitasi yang belum tepat sasaran. Serta, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemanfaatan bangunan gedung pemerintah.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan Dan

Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program

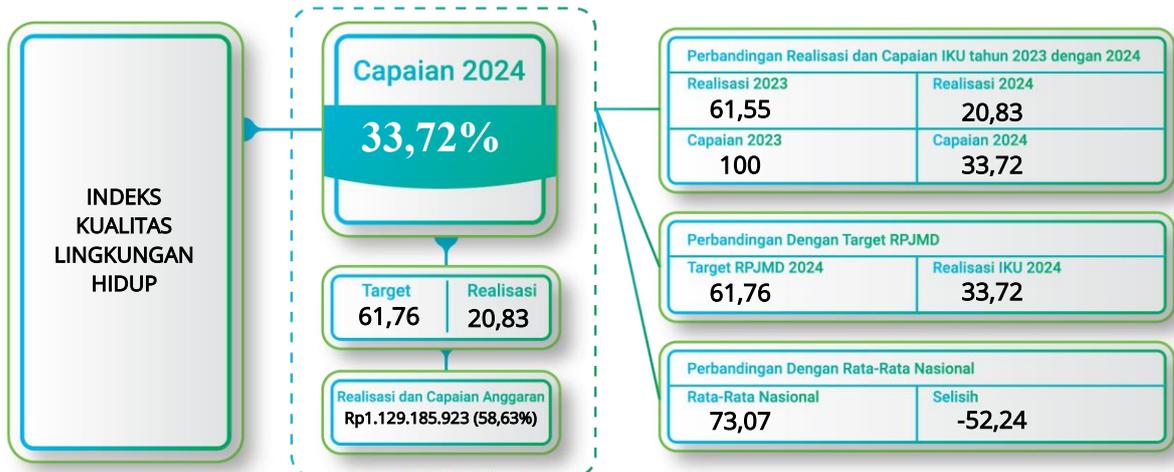
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dan Program Penatagunaan Tanah. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp160.092.853.867, dimana yang terealisasi sebesar Rp79.389.424.919 dengan ketercapaiannya sebesar 49,59%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp80.703.428.948 atau setara 50,41%.



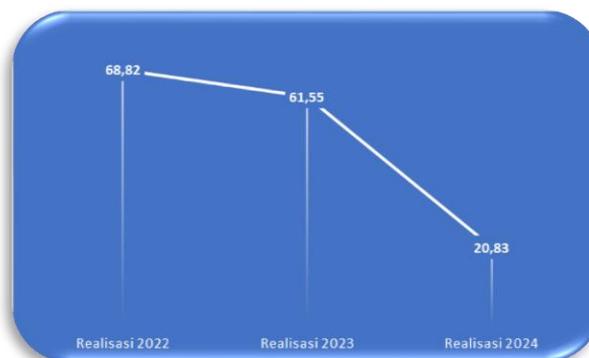
## SASARAN IX (S9) :

### Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

#### S9.15 Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu indikator utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang mencerminkan kondisi lingkungan secara keseluruhan, termasuk kualitas udara, air, dan lahan.



**Gambar III-21** Tren Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai 2023-2024

Pada tahun 2024, realisasi indeks ini tercatat sebesar 20,83, jauh di bawah target yang ditetapkan sebesar 61,76, dengan capaian kinerja hanya 33,72%.

Hasil ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Dumai.

Penurunan signifikan dalam indeks kualitas lingkungan hidup ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor, termasuk peningkatan aktivitas industri, pertumbuhan populasi, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian ini antara lain polusi udara dari sektor transportasi dan industri, pencemaran air akibat limbah domestik dan industri, serta degradasi lahan yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali.

Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai langkah strategis telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, seperti peningkatan regulasi lingkungan, pengawasan ketat terhadap industri yang berpotensi mencemari lingkungan, serta kampanye kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Selain itu, program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta optimalisasi sistem drainase perkotaan menjadi bagian dari upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Kota Dumai.

Meskipun capaian tahun 2024 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, upaya perbaikan terus dilakukan guna memastikan peningkatan kualitas lingkungan di masa mendatang. Tantangan yang perlu diantisipasi ke depan meliputi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan, penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan, serta inovasi dalam penerapan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekologi di Kota Dumai. Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan kualitas lingkungan hidup dapat terus meningkat, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam, dan daya saing kota dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Indeks kualitas air menunjukkan capaian yang meningkat dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53,4 realisasi sebesar 50,8 dengan capaian kinerja sebesar 95,2% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 45,6 atau capaian kinerja sebesar 85,5 % maka capaian kinerja tahun 2024 meningkat sebesar 9,9 %. **Faktor pendukung** berupa kebijakan terkait pengelolaan Lingkungan dalam bidang pengawasan lingkungan hidup dan mengoptimalkan aktivitas merumuskan kebijakan, mengembangkan sarana prasarana, teknologi, serta pembinaan terhadap berbagai aktifitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. **Faktor penghambat** berupa kondisi air sungai merupakan badan gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi sehingga hasil uji nilai parameter BOD dan COD melebihi baku mutu

Indeks kualitas udara menunjukkan capaian yang menurun dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 71,1 realisasi sebesar 88 dengan capaian kinerja sebesar 124,8% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 89,7 atau capaian kinerja sebesar 126,3% maka capaian kinerja tahun 2024 menurun sebesar 2,6 %. indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan capaian yang meningkat dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 61,5 realisasi sebesar 58,8 dengan capaian kinerja sebesar 95,2% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 53,3 atau

capaian kinerja sebesar 87,3% maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 7,9 %.

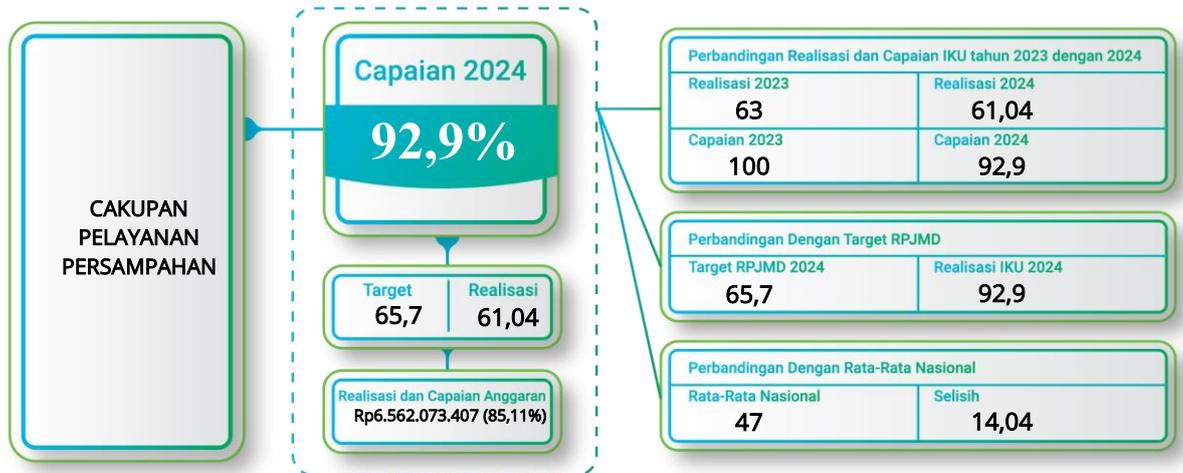
Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp1.926.023.600, dimana yang terealisasi sebesar Rp1.129.185.923 dengan ketercapaiannya sebesar 58,63%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp796.837.677 atau setara 41,37%.



## SASARAN IX (S9) :

### Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

#### S9.16 Indikator Cakupan Pelayanan Persampahan



Cakupan Pelayanan Persampahan di Kota Dumai mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi cakupan pelayanan persampahan pada tahun 2023 mencapai 63%, sedangkan pada tahun 2024 turun menjadi 61,04%. Meskipun terjadi penurunan, cakupan pelayanan masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional.



Gambar III-22 Tren Indikator Cakupan Pelayanan Persampahan Kota Dumai 2020-2024

Dari segi capaian, tahun 2023 berhasil mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sedangkan capaian tahun 2024 berada pada angka 92,9%. Target RPJMD 2024 sebesar 65,7% tidak tercapai sepenuhnya, namun tetap menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup baik.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional sebesar 47%, cakupan pelayanan persampahan Kota Dumai pada tahun 2024 masih berada di atas standar nasional dengan selisih 14,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Dumai memiliki sistem pengelolaan persampahan yang lebih baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

Namun, penurunan cakupan pelayanan ini perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa **faktor penghambat** yang mungkin memengaruhi penurunan ini adalah peningkatan jumlah penduduk dan limbah yang tidak sebanding dengan kapasitas layanan, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, serta tantangan dalam pengelolaan logistik pengangkutan sampah.

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan persampahan ke depannya, **faktor pendukung** yang terus didorong berupa optimalisasi sistem pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas armada pengangkutan, penguatan regulasi dalam pengelolaan sampah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah domestik. Dengan strategi yang tepat, Kota Dumai dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan cakupan pelayanan persampahan guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakatnya.

Persentase sampah yang tertangani menunjukkan capaian yang menurun dari tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 65,7% realisasi sebesar 61,1% dengan capaian kinerja sebesar 92,9% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 61,5 % atau capaian kinerja sebesar 93,6 % maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,7 %.

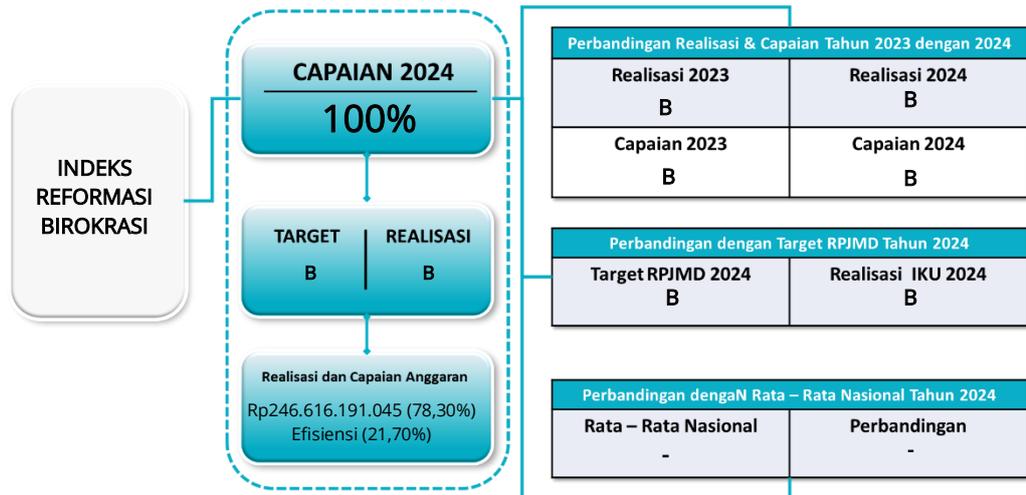
Pemerintah Kota Dumai telah berupaya dalam mengatasi permasalahan persampahan, salah satunya melalui optimalisasi TPA dengan metode yang berbeda. Pengelolaan sampah di TPA dengan menggunakan metode pengurangan sampah terpadu dengan sistim daur ulang MASARO (Masalah Sampah Zero) sehingga mengurangi masalah sampah pada tahun 2024. Namun permasalahan yang sering dihadapi masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang telah di sediakan di TPS masing-masing.

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp7.710.081.459, dimana yang terealisasi sebesar Rp6.562.073.407 dengan ketercapaiannya sebesar 85,11%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp1.148.008.052 atau setara 14,89%.



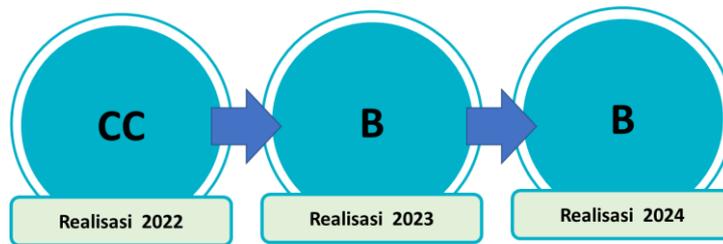
### 3.4 Meningkatkan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk meningkatkan reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Adapun pelaksanaan tujuan tersebut dapat dilihat dari indikator tujuan yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



*Gambar III-23 Capaian Tujuan Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kota Dumai Tahun 2024*

Dalam rangka mencapai tujuan Kota Dumai dalam Meningkatkan Reformasi Birokrasi Kota Dumai Tahun 2024, maka indikator tujuan yang digunakan adalah persentase indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2024 indeks reformasi birokrasi, memiliki capaian berada pada angka 100% dari target pada predikat B dengan realisasi berada pada predikat B. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 indikator tujuan ini berada pada predikat B. Untuk perbandingan capaian indikator pertahun dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar III-24 Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Dumai 2022 - 2024**

Jika dilihat dari capaian indikator indeks reformasi birokrasi tahun 2024 ini telah mencapai 100% sesuai dengan target RPJMD yakni predikat B. Jika dilihat dari capaian indikator persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang Berkualitas tahun 2024 ini masih berada dibawah target RPJMD yakni 60,23. Terkait dengan realisasi anggaran, pada tujuan meningkatkan reformasi birokrasi Kota Dumai Tahun 2024. Realisasi anggaran untuk tujuan ini berada pada jumlah Rp246.616.191.045 dari total pagu sebesar Rp314.973.969.075, dimana capaian anggaran sebesar 78,30% dimana efisiensi anggaran sebesar 21,70% dengan selisih Rp68.357.778.030.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua sasaran utama yang menjadi fokus dalam reformasi birokrasi di Kota Dumai. Pertama, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang lebih transparan dan berbasis kinerja. Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan keterbukaan informasi publik. Dengan tata kelola yang lebih akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah semakin meningkat.

Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah Kota Dumai berupaya melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan yang responsif dan profesional. Selain itu,

penguatan inovasi dalam pelayanan publik terus didorong untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

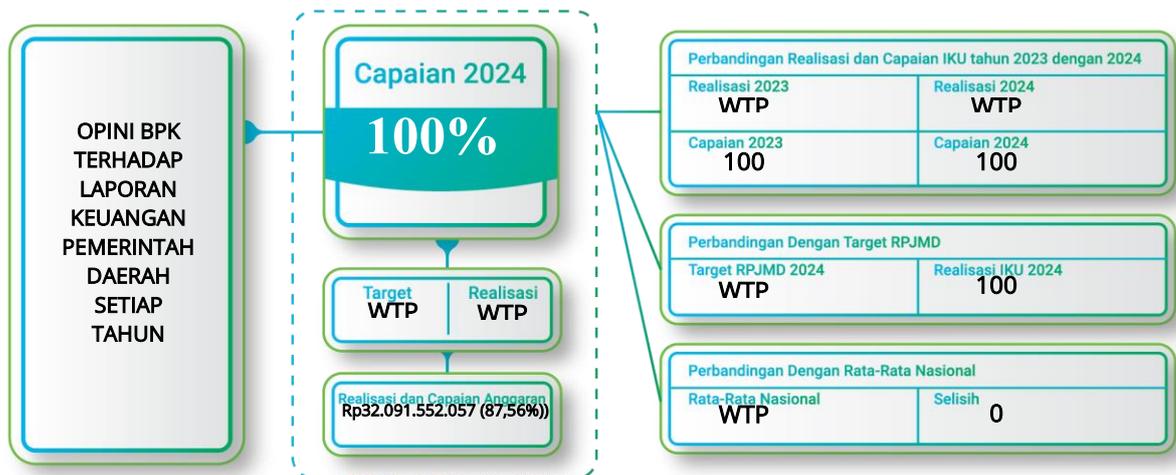
Dengan mengintegrasikan kedua sasaran tersebut dalam kebijakan reformasi birokrasi, diharapkan Kota Dumai dapat memiliki pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan berdaya saing. Reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik akan menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.



## SASARAN X (S10) :

### Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

S10.17 Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun



Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Dumai dalam dua tahun terakhir menunjukkan konsistensi yang baik. Berdasarkan data yang tersedia, Kota Dumai memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023 dan mempertahankan opini yang sama pada tahun 2024.



Gambar III-25 Tren Indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun Kota Dumai 2020-2024

Dari segi capaian, kedua tahun tersebut berhasil mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2024, yaitu memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kota

Dumai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, Kota Dumai berada pada tingkat yang sama dengan daerah lain yang juga mendapatkan opini WTP. Realisasi terhadap rata-rata nasional menunjukkan selisih nol, yang berarti Kota Dumai berhasil memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik seperti yang diharapkan secara nasional.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini **didukung** oleh komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Namun, **faktor penghambat** ke depan tetap ada, seperti peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk terus mempertahankan opini WTP, Pemerintah Kota Dumai perlu memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas terus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Selain itu, evaluasi dan perbaikan sistem keuangan secara berkala akan membantu mengidentifikasi potensi risiko serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Pemerintah Kota Dumai terus berupaya mempertahankan opini WTP ini dengan melakukan upaya peningkatan kompetensi berupa sosialisasi, pendampingan dan rekonsiliasi laporan keuangan bulanan/ semesteran/ tahunan terhadap para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kota Dumai untuk mewujudkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kota Dumai melalui BPKAD memperoleh prestasi dalam hal Penghargaan Terbaik III Pemerintah Daerah dengan Ketepatan Penyajian LKPD dan Penyelesaian Tindak Lanjut BPK oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

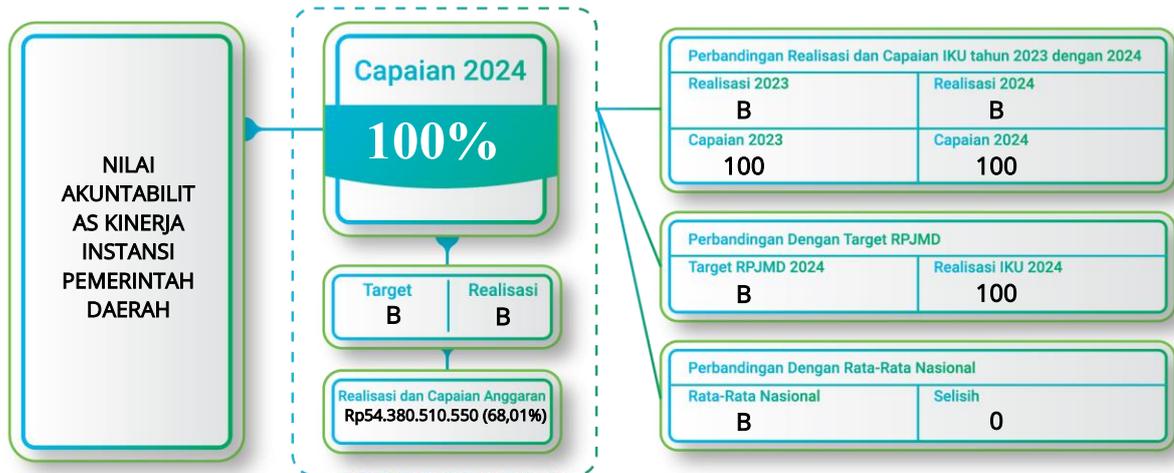
Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp36.649.496.537, dimana yang terealisasi sebesar Rp32.091.552.057 dengan ketercapaiannya sebesar 87,56%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp4.557.944.480 atau setara 12,44%.



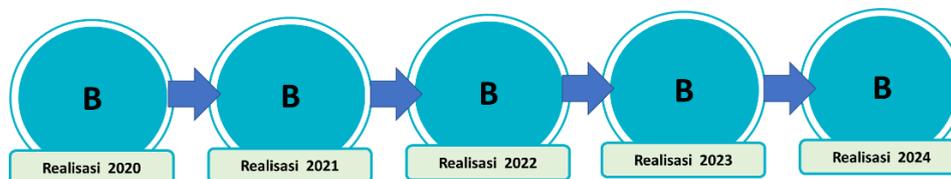
## SASARAN X (S10) :

### Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

#### S10.18 Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah



Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam dua tahun terakhir menunjukkan stabilitas yang baik. Berdasarkan data yang tersedia, Kota Dumai memperoleh nilai "B" pada tahun 2023 dan berhasil mempertahankan nilai yang sama pada tahun 2024.



**Gambar III-26** Tren Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Dumai 2020-2024

Dari segi capaian, kedua tahun tersebut mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2024, yaitu memperoleh nilai "B". Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Dumai telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, Kota Dumai berada pada tingkat yang sama dengan daerah lain yang juga memperoleh nilai "B".

Realisasi terhadap rata-rata nasional menunjukkan selisih nol, yang berarti Kota Dumai berhasil memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang baik sebagaimana yang diharapkan secara nasional.

Keberhasilan mempertahankan nilai "B" ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kinerja pemerintahan. Namun, tantangan ke depan tetap ada, seperti meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperbaiki mekanisme evaluasi kinerja, serta memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja di masa mendatang, Pemerintah Kota Dumai perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaporan kinerja, meningkatkan kapasitas aparatur dalam manajemen kinerja, serta memastikan setiap program dan kegiatan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kota Dumai dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencapai tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.

Penyelenggaran pengawasan internal pemerintah Kota Dumai terus didorong untuk menciptakan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah daerah. Hal ini melalui penilaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada tahun 2024 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kota Dumai berada pada besaran 3,297. Terdapat **faktor pendorong** yakni dengan dilaksanakannya penilaian atau evaluasi atas implementasi SAKIP internal

kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal. SAKIP yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai implementasi SAKIP Kota Dumai Pada tahun 2024 beradapa angka 63,58.

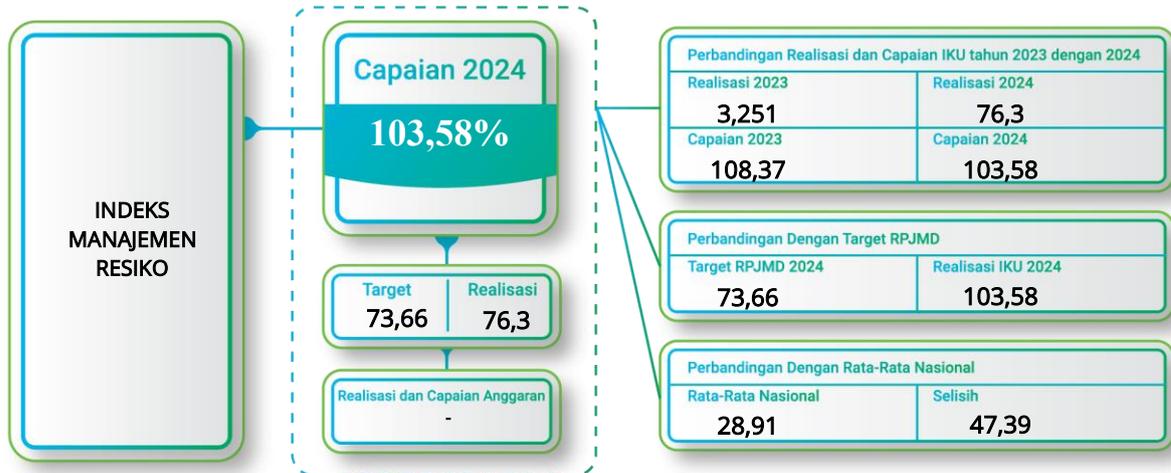
Tentunya proses pengawasan intern ini memerlukan komitmen dari berbagai perangkat daerah Kota Dumai. Pada Tahun 2024 dimana bila melihat Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP berada pada realisasi sebesar 84,34%. Faktor yang kemudian menjadi **hambatan** selama ini adalah temuan/rekomendasi yang sama berlanjut ke tahun-tahun berikutnya.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp79.954.432.091, dimana yang terealisasi sebesar Rp79.954.432.091 dengan ketercapaiannya sebesar 68,01%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp25.573.921.541 atau setara 31,99%.

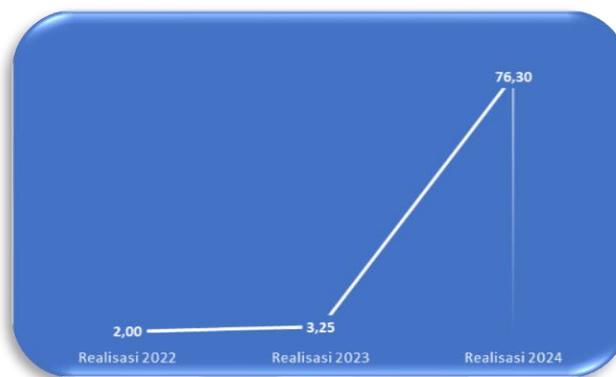
## SASARAN X (S10) :

### Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

#### S10.19 Indikator Indeks Manajemen Resiko



Indeks Manajemen Risiko Kota Dumai mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks pada tahun 2023 adalah 3,251 dan meningkat drastis menjadi 76,3 pada tahun 2024.



**Gambar III-27 Tren Indeks Manajemen Resiko Kota Dumai 2022-2024**

Dari segi capaian, Kota Dumai mencatatkan angka 108,37% pada tahun 2023 dan 103,58% pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2024, yaitu sebesar 73,66. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan

risiko di Kota Dumai telah mengalami perbaikan yang signifikan dan melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional yang sebesar 28,91, realisasi Kota Dumai berada jauh di atas angka tersebut dengan selisih 47,39 poin. Ini mengindikasikan bahwa manajemen risiko di Kota Dumai sudah berada pada level yang sangat baik dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Indonesia.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Implementasi strategi mitigasi risiko yang lebih efektif serta peningkatan kapasitas dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

Namun, meskipun telah mencapai hasil yang sangat baik, Pemerintah Kota Dumai tetap perlu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan sistem manajemen risiko tetap efektif dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen risiko dapat menjadi langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini di tahun-tahun mendatang.

Pada dasarnya, pemerintah Kota Dumai terus berupaya untuk turut andil serta aktif dalam manajemen risiko khususnya dalam lingkup internal pemerintah Kota Dumai. Hal ini terlihat dari **dorongan** upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam setiap temuan – temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi yang diindikasikan terjadi di Kota Dumai.

Di tahun 2024 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2024 adalah sebesar 81,17%. Serta Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan APIP tahun 2024 adalah sebesar

84,34%. **Faktor yang menjadi penghambat** yakni Pemerintah Daerah tidak mengetahui bahwa sebenarnya sudah menindaklanjuti temuan karena bukti tindak lanjut tidak disampaikan kepada BPK.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Dumai untuk meningkatkan kualitas pengawasan yakni dengan mengoptimalkan *Quality Assurance (QA)* atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kota Dumai oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Dumai telah berada pada "Level 3 atau kategori *Delivered*" dengan skor sebesar 3,32. Tentunya, ini akan menjadi jaminan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Dumai.



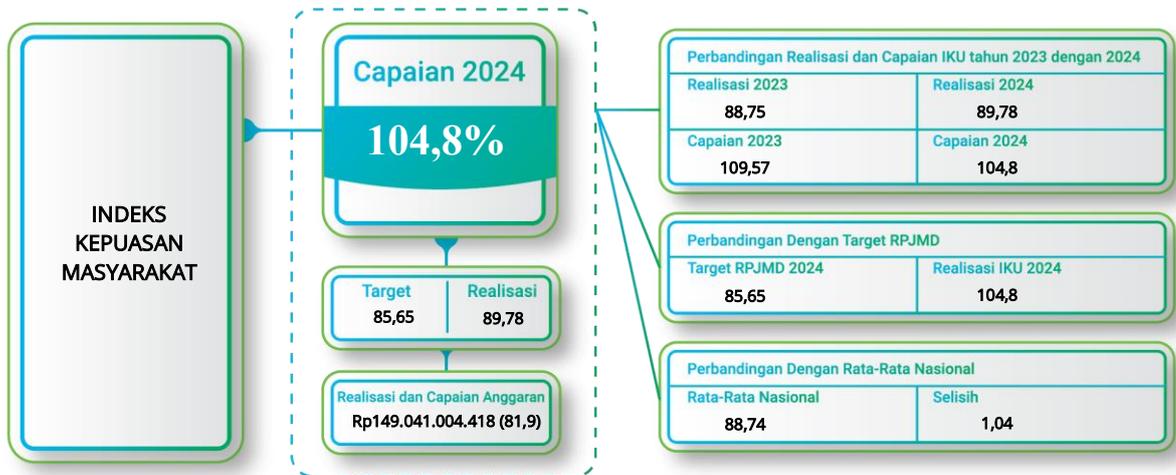
Pendampingan Penilaian SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP Bersama



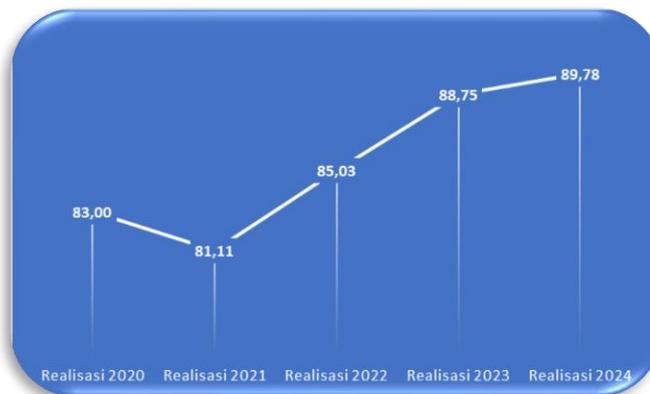
Dokumentasi Audit oleh Auditor

## SASARAN XI (S11) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### S11.20 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat



Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Dumai menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks pada tahun 2023 adalah 88,75 dan mengalami peningkatan menjadi 89,78 pada tahun 2024.



*Gambar III-28 Tren Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Dumai 2020-2024*

Dari segi capaian, Kota Dumai mencatat angka 109,57% pada tahun 2023 dan 104,8% pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

2024, yaitu sebesar 85,65. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terus meningkat dan melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional yang sebesar 88,74, realisasi Kota Dumai berada sedikit di atas angka tersebut dengan selisih 1,04 poin. Ini mengindikasikan bahwa layanan publik di Kota Dumai sudah berada pada level yang kompetitif dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Faktor utama yang **mendorong** terhadap pencapaian ini dapat mencakup peningkatan efisiensi pelayanan, penerapan sistem digital dalam administrasi publik, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, meskipun telah mencapai hasil yang baik, Pemerintah Kota Dumai tetap perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap **faktor penghambat** seperti, transparansi dalam pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, serta penguatan sistem pengaduan dan umpan balik dari masyarakat. Dimana ini dapat menjadi langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah Kota Dumai terus mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat. Salah satunya, terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang meningkat/ menurun/ tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 90 realisasi sebesar 94,71 tercapai 105,2% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,2% .atau tercapai sebesar 105,73 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 101.62.%.

Terdapat beberapa **faktor pendorong** meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kota Dumai, yakni :

- Penerapan pelayanan terpadu di Mall Pelayanan Publik, meningkatkan fasilitas pelayanan di Kecamatan.
- Penerapan Pelayanan Daring.
- Kemudahan Prosedur Pelayanan;
- Kejelasan Persyaratan Pelayanan;
- Kepastian dan Kejelasan Petugas;
- Kedisiplinan Petugas;
- Tanggung jawab Petugas;
- Kemampuan Petugas;
- Kesopanan dan Keramahan Petugas;
- Keadilan untuk Mendapatkan Pelayanan;
- Ketepatan Pelaksanaan terhadap Jadwal;

Salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat di Kota Dumai adalah Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sumber Daya Manusia dan Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelayanan publik di Kantor Camat. Karena kemampuan dan ketrampilannya dalam memberikan pelayanan publik mempengaruhi kepuasan masyarakat

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Kepegawaian daerah, Pengembangan sumber daya manusia, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan

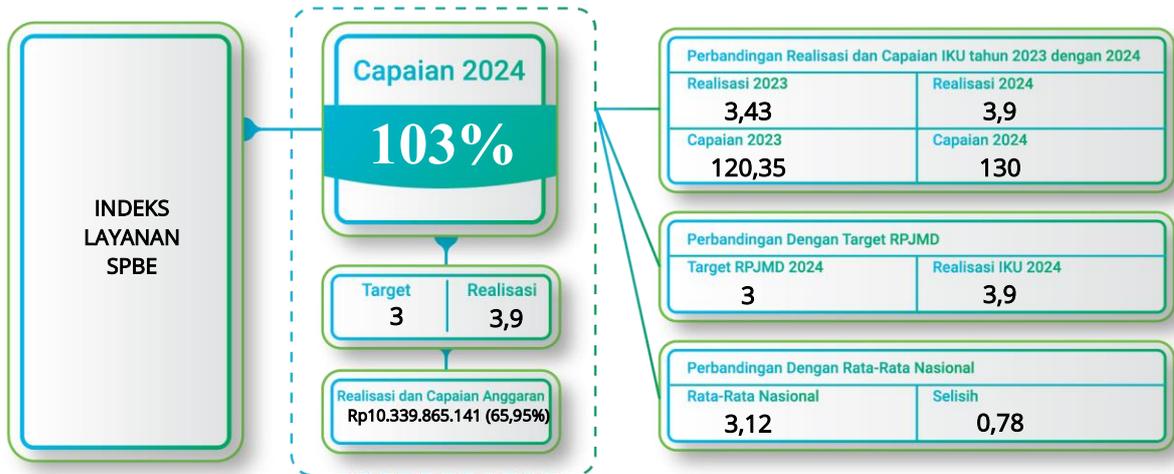
Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp181.877.966.538, dimana yang terealisasi sebesar Rp149.041.004.418 dengan ketercapaiannya sebesar 81,95%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp32.836.962.120 atau setara 18,05%.



# SASARAN XI (S11) :

## Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

### S11.21 Indikator Indeks Layanan SPBE



Indeks Layanan SPBE Kota Dumai menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks pada tahun 2023 adalah 3,43 dan mengalami peningkatan menjadi 3,9 pada tahun 2024.



Gambar III-29 Tren Indikator Indeks Layanan SPBE Kota Dumai 2021-2024

Dari segi capaian, Kota Dumai mencatat angka 120,35% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 130% pada tahun 2024 dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2024, yaitu sebesar 3. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai telah mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan melampaui target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional yang sebesar 3,12, realisasi Kota Dumai berada di atas angka tersebut dengan selisih 0,78 poin. Ini mengindikasikan bahwa layanan digital pemerintahan di Kota Dumai telah mencapai tingkat yang lebih baik dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem digitalisasi pelayanan publik. **Faktor utama yang berkontribusi** terhadap pencapaian ini dapat mencakup peningkatan infrastruktur teknologi informasi, penguatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi, serta pengembangan aplikasi dan layanan digital yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun telah mencapai hasil yang baik, Pemerintah Kota Dumai tetap perlu memperhatikan **faktor penghambat** berupa peningkatan integrasi layanan digital, optimalisasi keamanan siber, serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat menjadi langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks layanan SPBE di masa mendatang.

Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Formatik (DISKOMINFO) terkait Indeks Layanan SPBE menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 3,00 Indeks, dengan realisasi sebesar 3,90 tercapai atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 3,43 atau tercapai sebesar

120,35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 130%. Serta Persentase Akses Jaringan Internet yang disediakan Pemerintah Daerah menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 67,23% realisasi sebesar 98,93% tercapai bahkan melebihi target Indikator atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 221 titik akses, sedangkan 2024 sebesar 267 titik akses bila di persentasekan capaian tahun 2024 meningkat sebesar 120,81%.

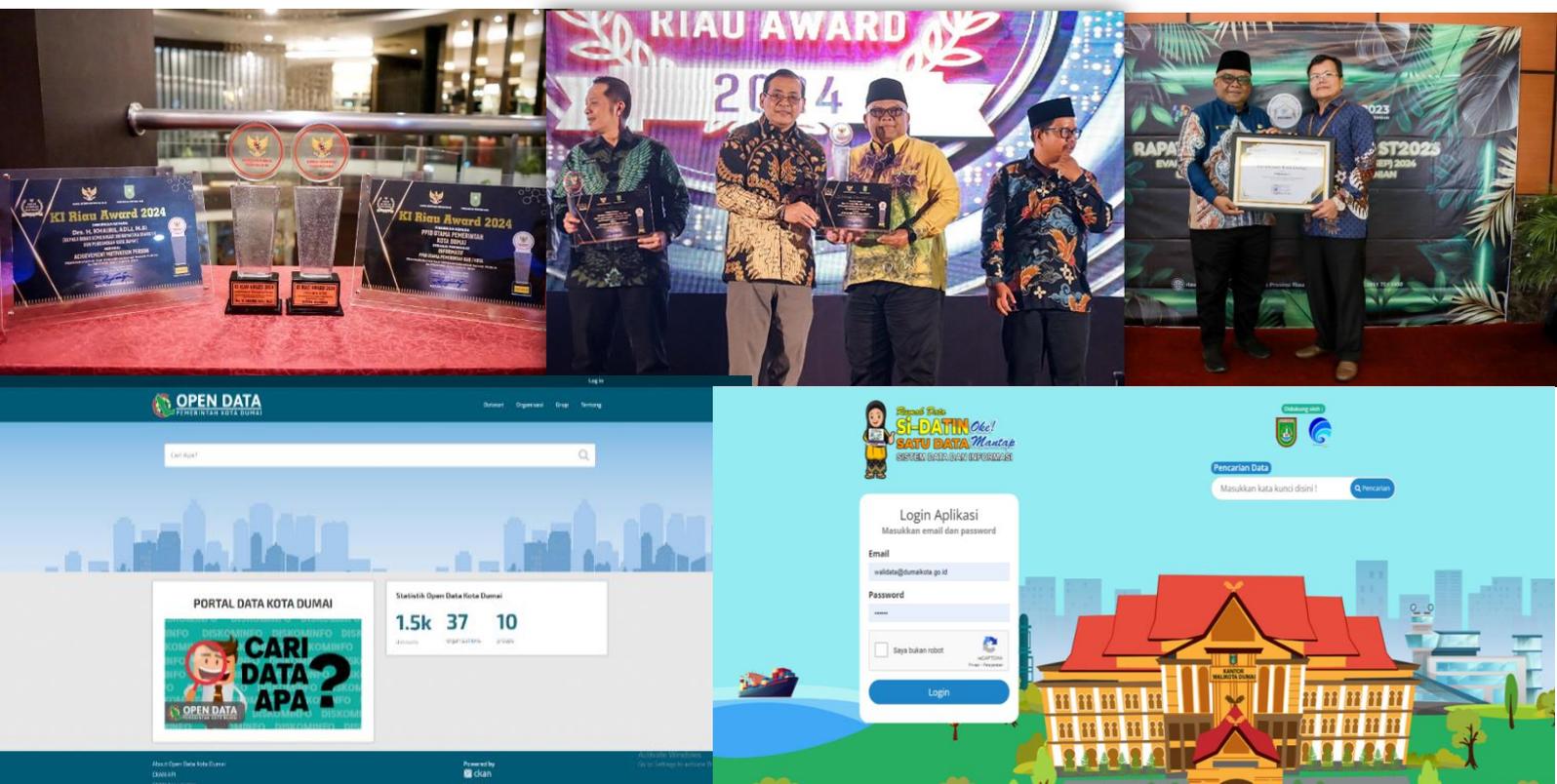
Adapun prestasi yang didapat Kota Dumai terkait SPBE dan informasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-6 Prestasi dan Penghargaan terkait SPBR dan Bidang Informasi**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau	Peringkat I (pertama)	Nasional	Kemenpan-RB
2	KI RIAU AWARD 2024 se-Provinsi Riau : 1. Untuk PPID Pemerintah Kota Dumai 2. Untuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai	1. INFORMATIF PPID UTAMA PEMERINTAH KAB/KOTA 2. ACHIEVEMENT MOTIVATION PERSON	Provinsi	Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau
3	Laporan semeseter 1 Pengelolaan SP4N-LAPOR!	Peringkat I (Pertama)	Provinsi	Kemepan-RB
4	Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 di Provinsi Riau	Peringkat II se-Provinsi Riau	Provinsi	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program penyelenggaraan statistik sektoral, Program

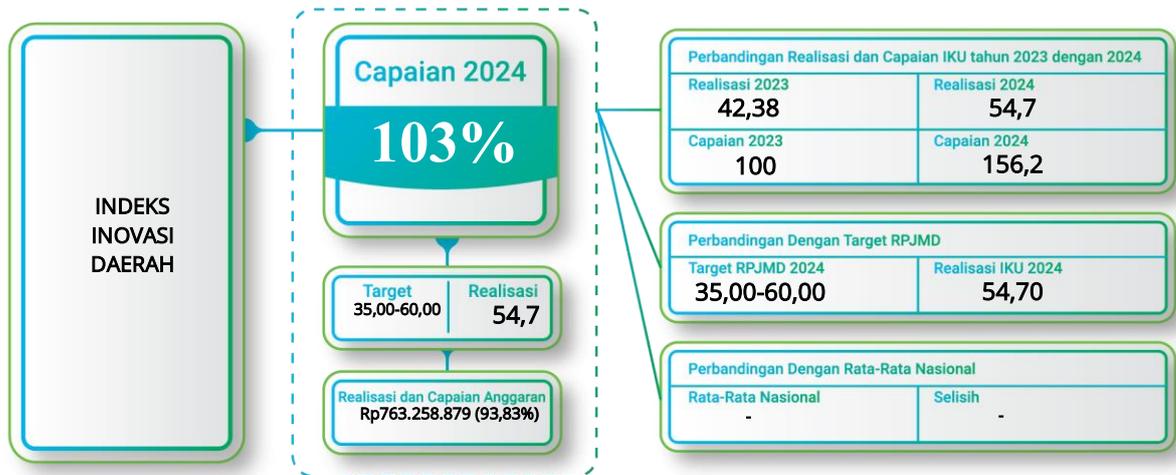
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penanggulangan Bencana. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp15.678.604.329, dimana yang terealisasi sebesar Rp10.339.865.141 dengan ketercapaiannya sebesar 65,95%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp5.338.739.188 atau setara 34,05%.



## SASARAN XI (S11) :

### Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

#### S11.22 Indeks Inovasi Daerah



Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indeks inovasi daerah pada tahun 2024 mencapai 54,7, sementara pada tahun 2023 tidak terdapat data yang tersedia dikarenakan indikator inovasi daerah merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026.



**Gambar III-30** Tren Indikator Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai Tahun 2023-2024

Pada tahun 2023 Pencapaian indikator kinerja kelitbang yang dikelola oleh Bappedalitbang dengan memperoleh skor indeks inovasi sebesar 42.38 juga mencapai target 100 %. Dari segi capaian, Kota Dumai mencatat angka 156,2% pada tahun 2024, jauh melampaui target RPJMD yang berkisar antara 35,00 hingga 60,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah berhasil mendorong inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan anggaran untuk program inovasi, kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, serta penguatan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan inovasi. Selain itu, implementasi teknologi digital dan pendekatan berbasis data dalam pengambilan kebijakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks inovasi daerah.

Meskipun capaian ini sangat positif, tantangan tetap ada. Pemerintah Kota Dumai perlu memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi secara berkala terhadap kebijakan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dorongan untuk menciptakan ekosistem inovasi yang lebih inklusif menjadi langkah strategis ke depan.

Dengan mempertahankan tren positif ini, Kota Dumai berpotensi menjadi salah satu daerah dengan ekosistem inovasi yang unggul di tingkat nasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam upaya mendukung dan meningkatkan Inovasi daerah Kota Dumai, pemerintah daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Dumai mendorong peningkatan Persentase Hasil Kelitbang yang Implementatif. Dimana pada tahun 2024 Kota Dumai mampu sebesar 66,6% untuk hasil riset yang dapat diimplementasikan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah dengan adanya dukungan Kepala Daerah serta Dukungan Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan yang diusulkan. Adanya koordinasi dan sinergitas antara Brista Kota Dumai dengan OPD lainnya. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam mendukung riset. Koordinasi dan Konsultasi serta Bimbingan yang kontinyu antara BRIDA Kota Dumai dengan Bappedalitbang Propinsi Riau dan BRIN Republik Indonesia.

Namun dalam prakteknya masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan kemampuan SDM serta Sarana dan Prasarana penunjang yang ada pada perangkat daerah dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan di daerah. Keterbatasan Alokasi Anggaran pada Setiap Perangkat Daerah untuk melakukan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung Peningkat Kualitas pelayanan publik. Belum tersedianya tenaga fungsional Peneliti dan Analis Kebijakan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Belum tersedianya fungsional perencana Pada BRIDA Kota Dumai.

Adapun prestasi terkait bidang riset dan inovasi daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III-7 Prestasi dan Penghargaan terkait Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024**

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Piagam Penghargaan	Manajemen Tata Kelola IDSD untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah <b>Ter-KOMPAK (Kolaboratif, Optimis, Mandiri, Proaktif, Adaptif, Kompetitif)</b>	Nasional	Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia
2	Sertifikat	Narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis BRIDA/BAPPERIDA dengan tema : <b>Penguatan Manajemen Riset dan Inovasi Daerah</b>	Nasional	Deputi Badan Riset dan Inovasi Daerah

Adapun program yang mendukung pencapaian indikator sasaran ini adalah Program Penelitian dan Pengembangan. Adapun pagu anggaran pada indikator sasaran ini sebesar Rp813.469.580, dimana yang terealisasi sebesar

Rp763.258.879 dengan ketercapaiannya sebesar 93,83%. Untuk Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar Rp50.210.701 atau setara 6,17%.



Kerjasama Dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tentang Kajian Dan Penelitian RP2P

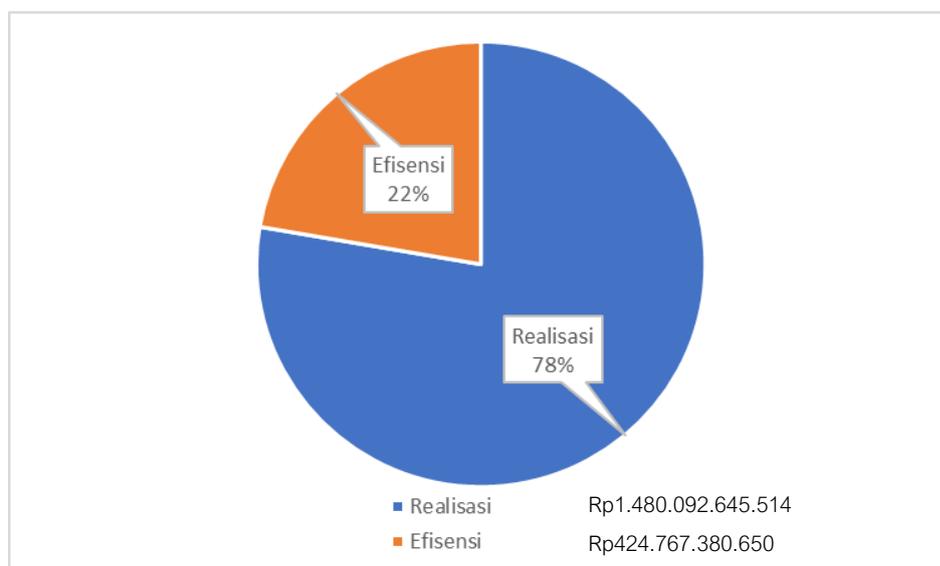


Penyerahan Kepada Walikota Dumai Laporan Akhir Kegiatan Penelitian RP2P



### 3.5 Realisasi Anggaran

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai selama Tahun 2024 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp1.904.860.026.164,00. Pada akhir Tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 1.480.092.645.514,00 dengan capaian akhir sebesar 77,7 %. Jika dilihat realisasi anggaran per tujuan sasaran, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 5 yaitu Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan serapan anggaran sebesar 88,99% dan sasaran 4 yaitu Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan capaian sebesar 85,32%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 20, yaitu pada sasaran Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten dengan capaian hanya sebesar 49,59%.



**Gambar III-31 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Pencapaian Sasaran Kota Dumai Tahun 2024**

### 3.6 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing masing sasaran. Dari 11 sasaran, terdapat 8 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 22 % atau senilai Rp. 424.767.380.650,00. Secara rinci, analisis efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel III-8 Tabel Efisiensi Anggaran per IKU Kota Dumai 2024*

No	Sasaran	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Capaian (%)	Selisih	Efisiensi
1	2	5	6	7	8	9
<b>TI</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan masyarakath sejahtera</b>	<b>Rp34.555.980.096</b>	<b>Rp22.233.799.766</b>	<b>64,34%</b>	<b>Rp12.322.180.330</b>	<b>35,66%</b>
S1	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Rp549.992.100	Rp366.519.300	66,64%	Rp183.472.800	33,36%
S2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Rp24.634.967.560	Rp14.805.461.077	60,10%	Rp9.829.506.483	39,90%
S3	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Rp4.128.058.009	Rp3.331.327.844	80,70%	Rp796.730.165	19,30%
<b>TII</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Masyarakat Dumai Yang Produktif, Berdaya Saingdan Sejahtera</b>	<b>Rp962.041.030.557</b>	<b>Rp839.509.016.954</b>	<b>87,26%</b>	<b>Rp122.532.013.603</b>	<b>12,74%</b>
S4	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Rp429.290.610.402	Rp365.905.585.912	85,23%	Rp63.385.024.490	14,77%
S5	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Rp528.042.525.103	Rp469.913.267.797	88,99%	Rp58.129.257.306	11,01%

No	Sasaran	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Capaian (%)	Selisih	Efisiensi
1	2	5	6	7	8	9
S6	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Rp4.707.895.052	Rp3.690.163.245	78,38%	Rp1.017.731.807	21,62%
<b>TIII</b>	<b>Tujuan : Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan</b>	<b>Rp593.289.046.436</b>	<b>Rp371.733.637.749</b>	<b>62,66%</b>	<b>Rp221.555.408.687</b>	<b>37,34%</b>
S7	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Rp423.560.087.510	Rp284.652.953.500	67,20%	Rp138.907.134.010	32,80%
S8	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	Rp160.092.853.867	Rp79.389.424.919	49,59%	Rp80.703.428.948	50,41%
S9	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Rp9.636.105.059	Rp7.691.259.330	79,82%	Rp1.944.845.729	20,18%
<b>TIV</b>	<b>Tujuan : Meningkatkan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Rp314.973.969.075</b>	<b>Rp246.616.191.045</b>	<b>78,30%</b>	<b>Rp68.357.778.030</b>	<b>21,70%</b>
S10	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Rp116.603.928.628	Rp86.472.062.607	74,16%	Rp30.131.866.021	25,84%
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rp198.370.040.447	Rp160.144.128.438	80,73%	Rp38.225.912.009	19,27%

## BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan indikator kinerja utama yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026. Laporan ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Dumai selama tahun anggaran 2024.

Pemerintah Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik dengan rata-rata 100%. Sebagian besar sasaran strategis RPJMD sudah mencapai bahkan beberapa indikator melebihi target yang ditetapkan. Dari 22 IKU, sebanyak 16 berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain tingginya komitmen dan kolaborasi perangkat daerah.

Sebagian kecil sasaran strategis RPJMD belum mencapai kinerja sesuai dengan harapan. Terdapat 4 target IKU yang tidak tercapai yaitu; Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Salah satu faktornya penyebabnya adalah pergeseran prioritas program serta Masih banyaknya lahan konsesi di daerah Pemerintah Kota Dumai sehingga mempersulit izin melakukan penghijauan di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Dumai menyadari bahwa capaian kinerja yang dipaparkan dalam laporan ini masih memiliki ruang untuk peningkatan. Oleh

karena itu, Pemerintah Kota Dumai berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pemerintah Daerah Kota Dumai pada tahun 2024 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar Rp1.904.860.026.164,00. anggaran ini terealisasi sebesar Rp 1.480.092.645.514,00 dengan capaian akhir 77,7 %. Dengan efisiensi sebesar 22% atau senilai Rp. 424.767.380.650,00.

Pemerintah Kota Dumai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Dumai. Masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 ini disampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif mengenai kinerja Pemerintah Kota Dumai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



**Pemerintah Daerah  
Kota Dumai**

**Tahun 2024**

*"Dumai Berkhidmat"*







No	Sasaran	No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 terhadap Target RPJMD 2024	Rata - Rata Nasional 2024	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata - Rata Nasional	Perangkat Daerah Terkait	KUPO Yang Terkait	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Nama Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Partisipasi Sekolah: Penduduk Usia 7-12 Tahun (Pendidikan Sekolah Dasar)	100	98,65	98,65	Perencanaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualitas	Rp18.003.600	Rp48.825.631	35,23
																	Angka Partisipasi Sekolah: Penduduk Usia 13-15 Tahun (Pendidikan Sekolah Menengah Pertama)	100	98,65	98,65				
																	Angka Partisipasi Sekolah: Penduduk Usia 7-16 Tahun (Pendidikan Nonformal)	100	37,26	37,26				
																	Penyentase Guru PAUD berkekuifiasi Minimal S/D	60,12	66,2	110,11				
																	Penyentase Guru SD berkekuifiasi Minimal S/D	97,55	90,66	96,01				
																	Penyentase Guru SMP berkekuifiasi Minimal S/D	92,55	97,73	105,6				
																	Proporsi PTK PAUD Berasasial	32,12	23,54	73,29				
																	Proporsi PTK SD Berasasial	88,55	51,11	57,72				
																	Proporsi PTK SMP Berasasial	91,55	48,25	52,7				
																	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	28	27,69	98,89				
																	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	30,8	29,15	94,64				
																	Penyentase satuan PAUD dengan Akreditasi Minimal B	43,36	48,44	111,72				
																	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	61,57	63,27	102,76				
																	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	44,23	53,24	120,37				
																	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	73,32	74,65	101,81				
																	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71,98	64,39	89,46				
																	Indeks Keamanan SD	79,34	76,4	101,41				
																	Indeks Kebhinekaan SD	80,43	74,33	92,42				
																	Indeks Inklusitas SD	64,72	58,91	91,02				
																	Indeks Keamanan SMP	75,28	73,03	97,01				
																	Indeks Kebhinekaan SMP	76,21	73,54	96,5				
																	Indeks Inklusitas SMP	62,52	60,61	96,94				
56	Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	56.11	Indeks Pengeluaran	0,769 - 0,773	0,78	100,00	0,76	0,77	101,19	1,19	0,01	0,769 - 0,773	100,00	3,71	-2,93	Dinas Perdagangan	Mewujudkan Pengisian terhadap Dibutuhkan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting	7	7	100	Program Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp108.089.000	Rp117.704.550	59,19
		56.12	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan (%)	92,35	100,00	108,28	-	-	-	-	-	92,35	108,28	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Perlindungan	92,35	100	108,28	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp4.232.051.352	Rp3.495.881.695	82,6
																	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pengembangan	41,33	39,28	95,04	Program Pengembangan Keselamatan Tradisional	Rp76.857.100	Rp76.577.000	99,64
																	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pemanfaatan	10,2	10	98,04	Program Pelestaran dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp200.097.600	Rp0	0
																	Persentase Penerapan Uraur Kebudayaan Melayu pada satuan Pendidikan	80	80	100				
MISI III	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas																							
III	Tujuan : Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	T3	Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas	60,23	55,03	91,37	56,90					-91,37	55,03	60,23	91,37	-								
57	Meningkatnya Infrastruktur Kota	57.13	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	64,72	48,39	74,76	66,33	56,40	85,03	10,27	-8,01	64,72	74,76	-	-	Sekretariat Daerah	Persentase Lapaian Penegasan Batas antar Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai	33,3	33,3	100	Program Pemeliharaan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp550.000.000	Rp484.533.195	88,1
																	Persentase kemandapan jalan	61,41	57,48	93,76	program penganggaran jalan	Rp226.896.430.215	#####	77,39
																	Persentase Luas Wilayah Banjir yang ditangani	51,91	51,91	100	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rp66.381.183.990	#####	38,09
																	Tidak Terjadinya Genangan 12 Kali Dalam Setahun	-	-	-	program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp33.700.938.249	#####	49,61
																	Tingkat pengendalian jasa konstruksi daerah	15,00	15,00	100	program pengembangan jasa konstruksi	Rp188.225.800	Rp92.342.433	49,06
																	Tingkat pelayanan infrastruktur pemukiman dan kawasan	75,72	65,07	85,93	Program Kawasan Permukiman	Rp3.996.460.212	Rp2.631.058.601	65,83%

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 terhadap Target RPJMD 2024	Rata - Rata Nasional 2024	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata - Rata Nasional	Perangkat Daerah Terkait	KU PD Yang Terkait	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Nama Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Kota Dumai tanpa kumuh	55,73	30,92	55,49	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp4.811.496.000	Rp2.335.325.084	48,54%
																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan rumah khusus, rumah kebun bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100	100	100	Program Pengembangan Perumahan	Rp525.922.400	Rp166.348.967	31,63%
																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	71,43	64,29	90,00	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Kota	Rp8.368.191.400	Rp6.785.273.095	81,08%
																Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda, dan masyarakat	-	-	-	Program Peningkatan Pelayanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp97.000.000	Rp96.765.680	99,76%
																Dinas Perhubungan	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan	68,5	77,5	113	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp78.044.230.244	#####	69,85
58	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	58.14	Persentase Pemantapan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	50,26	50,26	100,00	30,00	7,75	25,83	-74,17	42,51	50,26	100,00	-	-	Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Program pendudukan berakes ar minimum	100%	15,38%	15,38%	Program Pengelolaan Ruang	Rp41.931.295.447	#####	59,75%
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase penduduk yang berakes sanitasi	100%	82,40%	82,40%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Jajabab	Rp1.955.048.000	Rp842.196.754	48,89%
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00%	45,00%	100%	Program Pemantapan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp112.704.319.220	#####	48,58%
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemantapan ruang dengan zonasi	50,26%	50,26%	100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp2.461.191.200	Rp153.107.694	47,13%
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase kerbangannya TP4/TP2/ST/TP3B	0	0	0	Program Pengembangan Sistem Dan	Rp0	Rp0	0
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian permasalahan penataan per Tahun	60%	100%	166,67%	Program Penyelidikan Sengketa Tanah Garapan	Rp241.000.000	Rp159.071.538	66,00%
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Persentase penggunaan Tanah	60%	100%	166,67%	Program Penyelidikan Sengketa Tanah Garapan	Rp400.000.000	Rp186.071.488	46,54%
59	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	59.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,76	20,83	33,72	61,55	61,55	100,00	66,28	-40,72	61,76	33,72	73,07	-52,24	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	53,3	50,8	95,2	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
																Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	70,5	88	124,8	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.926.023.600	Rp1.129.185.923	58,6
																Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas tutupan Lahan	61,5	58,5	95,2	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
																Dinas Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sampah yang tertangani	65,7	61,1	92,9	Program Pengelolaan Kelembagaan an Hayati (Arban)	Rp7.710.081.459	Rp6.562.073.407	85,1
<b>Subj: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik</b>																								
<b>TIV: Tujuan: Meningkatkan Reformasi Birokrasi</b>																								
			<b>T4</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>			<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B</b>	<b>100</b>								
		510.17	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	0	0	WTP	100,00	WTP	0,00	Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Kejelasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	9	9	10	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.403.946.307	Rp787.319.838	56,08
																Dinas Perencanaan dan Penataan Ruang	Keselarsan dokumen RRPD Kota Dumai dengan dokumen RKP	13	13	100	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi perencanaan pembangunan	9	9	10	Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
																Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Keselesaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	10	10	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp2.451.117.294	Rp1.606.037.930	65,52



No	Sasaran	No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 terhadap Target RPJMD 2024	Rata - Rata Nasional 2024	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata - Rata Nasional	Perangkat Daerah Terkait	KU PO Yang Terkait	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Nama Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																Diya Manusia					Pengembangan sumber daya manusia	Rp178.918.404	Rp141.160.000	78,9
																					Pengembangan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp1.547.690.855	Rp1.090.738.664	70,48
																					Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Penguatan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata	Rp33.894.866.910	#####	95,15
																Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		90	94	104,00		Rp3.533.511.000	Rp2.402.763.150	68,00
																					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp206.479.000	Rp175.102.300	84,80
																					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp1313.034.200	Rp932.628.254	71,03
																					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp43.899.000	Rp39.949.100	91
																					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp5.290.905.800	Rp4.229.899.800	79,95
																					Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Rp100.000.000	Rp0	0
																					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp166.111.100	Rp146.420.000	88,16
																					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.110.080.000	Rp3.382.044.800	82,29
																					Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Rp100.000.000	Rp0	0
																					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			
																					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp5.557.279.600	Rp4.480.288.000	80,6
																					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
																					Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum			

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 terhadap Target RPJMD 2024	Rata - Rata Nasional 2024	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata - Rata Nasional	Perangkat Daerah Terkait	KU/PO Yang Terkait	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Nama Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.00	14	15.00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,87	85,76	95,43	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp135.592.352	Rp100.972.400	74,40
																Kecamatan Dumai Kota	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transilum	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp151.437.203	Rp51.437.203	33,97
																	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	Program Koordinasi Ketransmran dan Ketertiban Umum	Rp5.205.065.800	Rp3.600.581.000	69,10
																Kecamatan Bukit Kapur	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84	98,82	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp11.245.009.135	#####	95
																	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transilum	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp7.366.224.065	Rp6.550.211.038	90
																	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	100	100	Program Koordinasi Ketransmran dan Ketertiban Umum	Rp100.000.000	Rp0	0
																	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,39	86,53	86,53	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp19.120.000	Rp16.544.000	86,53
																Kecamatan Medang Kampai	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	100	89,87	89,87	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp4.248.492.900	Rp3.501.535.530	89,57
																	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan transilum	100	10,62	10,62	Program Koordinasi Ketransmran dan Ketertiban Umum	Rp11.896.000	Rp11.886.000	10,62
																	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88,52	98,36	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp0	Rp0	0
																	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transilum	100	0	0	Program Koordinasi Ketransmran dan Ketertiban Umum	Rp100.000.000	Rp0	0
																Kecamatan Sungai Sembilan	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Transilum	100	0	0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp40.000.000	Rp0	0
																	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	82,48	82,48	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp28.524.000	Rp26.724.000	93,69
																	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100	82,48	82,48	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp6.258.267.100	Rp5.158.827.800	82,43
		511.2.1	Indeks Layanan SPBE	3,00	3,90	1,30	2,85	3,43	120,35	119,05	0,47	3,00	1,30	3,12	0,78		Indeks Layanan SPBE	3	3,90	130	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp772.159.800	Rp595.839.400	77,16
																	Akses jaringan internet yang di sediakan pemerintah daerah							
																	Persentase akses jaringan internet yang di sediakan pemerintah daerah	67,23	98,93	147	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp5.387.237.556	Rp3.529.501.022	65,51
																	Persentase informasi daerah yang di sampaikan melalui media							
																Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan	71	71	100	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp4.769.000.000	Rp2.844.499.191	59,64
																	Kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan (KMT)							
																	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	80	80	100	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Rp230.300.000	Rp159.975.000	69,46
																	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100	80	80	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Rp168.720.000	Rp139.695.370	82,79
																	Persentase Penanganan kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran (WMK)	100	100	100	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp145.974.200	Rp28.689.766	69,64

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%) 2023	Peningkatan / Penurunan Capaian 2024	Peningkatan / Penurunan Realisasi 2024	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024 terhadap Target RPJMD 2024	Rata - Rata Nasional 2024	Perbandingan Realisasi 2024 dengan Rata - Rata Nasional	Perangkat Daerah Terkait	KU PD Yang Terkait	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024	Nama Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	capaian (%)	
1												13,00	14	15,00	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
																Urus Pemadam Kebakaran dan penyelamatan	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	100	100	100	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Rp440.300.000		24,91	
																	Respon time Rate Kejadian Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) tidak lebih dari 15 menit	100	82,25	82,25	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Rp620.000.000		79,79	
																	Persentase Pemeliharaan Keterbacaan Umum, Keselamatan dan Perlindungan Masyarakat	100	100	100	PROGRAM PENINGKATAN DAN KETERBACAAN UMUM	Rp1.111.480.000	Rp1.070.268.000	96,29	
																	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Keindahan)	100	100	100	PROGRAM PENINGKATAN DAN KETERBACAAN UMUM	Rp1.388.948.100	Rp1.374.514.692	98,96
																		Persentase Penegaka	100	60	60	PROGRAM PENINGKATAN DAN KETERBACAAN UMUM	Rp277.662.700	Rp271.665.000	97,84
																		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	100	100	100	Program Penanggulangan Bencana	Rp323.398.573	Rp283.488.200	87,66
																		Persentase Penanggulangan Bencana Daerah	30,56	30,56	100	Program Penanggulangan Bencana	Rp43.423.400	Rp41.729.500	96,10
																		Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,43	83	Program Penanggulangan Bencana	-	-	-
		511,22	Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00	54,70	156,20	42,38	42,38	100,00	0,00	12,32	35,00-60,00	156,20	-	-		Sekretariat DPRD	Persentase Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	95	95	100	-	-	-	-
																		Indeks Inovasi Daerah	35-60	54-70	100	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp181.841.380	Rp161.603.030	89
																		Persentase hasil khiblengan yang implementatif	30	33	222	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp631.628.200	Rp601.655.849	95